



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA 2025



Kerja Keras APBN 2025 Untuk Indonesia

Adaptif dan Responsif Menghadapi Tantangan

“

APBN menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi dinamika global dan domestik”

Menteri Keuangan
Purbaya Yudhi Sadewa



Daftar Isi



Edisi Triwulan IV 2025

Edisi ini tidak hanya merekam capaian kinerja APBN pada Triwulan IV, tetapi juga merangkum kinerja APBN 2025 secara utuh sebagai satu kesatuan siklus fiskal. Penyajian ini memberikan gambaran menyeluruh mengenai bagaimana kebijakan fiskal dirancang dan dijalankan sepanjang tahun dalam merespons dinamika global dan domestik yang terus berkembang.

Edisi ini juga menyajikan kaleidoskop 2025 dalam beberapa halaman khusus tentang cuplikan peristiwa, kebijakan, dan momen penting yang mewarnai perjalanan #UangKita sepanjang tahun 2025.

7 **Ringkasan Eksekutif**
APBN Sepanjang 2025: Kerja Keras, Adaptif dan Responsif Menghadapi Tantangan

Realisasi #UangKita

19 **Postur APBN**
Adaptif Menjaga Stabilitas dan Mendukung Agenda Prioritas

21 **Penerimaan Pajak**
Membaik Secara Bertahap Hadapi Tantangan

24 **Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai**
Tetap Resilien di Tengah Tekanan Perdagangan Global

27 **PNPB**
Melebihi Target di Tengah Moderasi Harga Komoditas

31 **Belanja Pemerintah Pusat**
Responsif dan Antisipatif Mendukung Program Prioritas

10 **Perkembangan Ekonomi Makro**
Perkembangan Ekonomi Makro 2025: Resilien dan Stabil di Tengah Berbagai Dinamika

34 **Transfer ke Daerah**
Efektif dan Efisien Mendukung Pelayanan Publik & Sektor Prioritas

37 **Anggaran Tematik**
Mempertegas Peran Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

39 **Program Unggulan**
Meningkatkan Kualitas Akses Layanan Menyongsong Generasi Emas

41 **Pembiayaan Utang**
Dikelola dengan Hati-Hati, Terukur dan Efisien

44 **Pembiayaan Investasi**
Menjaga Ruang Fiskal dan Memperluas Manfaat

15 **Kinerja Sektor Keuangan**
Kinerja Stabil Sektor Keuangan 2025: Mendukung Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Perjalanan #UangKita

46 **Coretax dan Masa Depan Perpajakan Indonesia**

48 **Pengawasan Kepabeanaan Naik Kelas dengan Trade AI**

50 **APBN 2025**
Dioptimalkan dan Program Stimulus Dijalankan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Secara Merata

51 **Dari TPG sampai dengan Penanganan Bencana, TKD Hadir untuk Masyarakat Daerah**

52 **Penyusunan Regulasi di Tengah Moderasi Harga Telah Mendongkrak PNBPN**

54 **Inovasi SBN, Memperluas Akses, Memperdalam Pasar dan Menjaga Keberlanjutan Pembiayaan**

57 **Menutup APBN 2025 dengan Kuat, Menyambut APBN 2026**

Diterbitkan oleh: Kementerian Keuangan Republik Indonesia. **Pelindung:** Menteri Keuangan dan Wakil Menteri Keuangan. **Pengarah:** Pimpinan Unit Eselon I Kementerian Keuangan **Penanggung Jawab:** Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku Sekretaris Komite *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan. **Pemimpin Redaksi:** Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi, Direktur Strategi dan Portofolio Pembiayaan. **Dewan Redaksi:** Tim Deputies *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan. **Tim Redaksi:** Tim Teknis *Asset-Liability Committee* Kementerian Keuangan **Desain Grafis, Layout dan Foto:** Biro KLI Kementerian Keuangan. **Alamat Redaksi:** Gedung Frans Seda Lantai 8, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta.

KALEIDOSKOP

APBN KITA 2025

Tahun 2025 menjadi potret perjalanan APBN KiTa yang adaptif—merespons tantangan global, menjaga daya beli, dan terus menggerakkan pembangunan Indonesia.



Januari

Peluncuran Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Presiden Menetapkan Inpres Efisiensi Belanja APBN

Penyesuaian Tarif PPN 12% Terbatas Hanya untuk Barang Mewah



Maret

Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) dan Gaji ke-13

Entry Meeting dan Penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) 2024



Mei

BPK Memberi Opini WTP Atas LKPP 2024



Juli

Peresmian Koperasi Desa Merah Putih Untuk Mempercepat Pemerataan Pembangunan

Laporan Semester I Pelaksanaan APBN 2025

Peluncuran Sekolah Rakyat Untuk Pendidikan Berkualitas yang Merata



September

Reshuffle Kabinet Merah Putih

Penempatan Dana Rp200 triliun ke Bank Himbara dan BSI

Pemerintah Menggulirkan Paket Stimulus Triwulan III sebesar Rp15,6 triliun

Pengesahan UU APBN 2026 – Menjaga Kesenambungan Pembangunan



November

Kehadiran Negara Dalam Bencana di Sumatera (Aceh, Sumatera Utara, dan Padang)

Penempatan Dana Tambahan Rp76 triliun di bank Himbara dan BPD



Februari

BPI Danantara Diresmikan untuk Optimalisasi Pengelolaan BUMN

Stimulus Ekonomi Triwulan I sebesar Rp33 triliun



April

Liberation Day (Trump 2.0)

IMF-World Bank Spring Meetings 2025

12th ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting



Juni

Paket Stimulus Triwulan II Rp24 triliun Diluncurkan

Pembukaan Blokir Anggaran untuk Mengantisipasi Dinamika di 2025



Agustus

Pidato Kenegaraan Presiden Penyampaian RUU APBN 2026 dan Nota Keuangan

Penerbitan Kangaroo Bonds Pertama Memperkuat Ketahanan Pembiayaan APBN

Ekonomi Indonesia Triwulan II Tumbuh Kuat



Oktober

Pemusnahan Rokok Ilegal

Penerbitan Perdana Dim Sum Bond untuk Diversifikasi Instrumen dan Perluasan Basis Investor

Yield SUN 10 Y: Terendah dalam 5 Tahun terakhir

Pemulihan Rp13,25 Triliun Kerugian Negara Perkuat PNB



Desember

Pemberian Paket Stimulus Triwulan IV Rp37,4 triliun

Defisit APBN 2025 Terkendali dengan Realisasi Sementara 2,92% PDB

Glosarium

AP	: Administered Price	FTA	: Free Trade Agreement
APBN	: Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Negara	IHSG	: Indeks Harga Saham Gabungan
AS	: Amerika Serikat	IKN	: Ibu Kota Negara
ASEAN	: The Association of Southeast Asian Nations	JKK	: Jaminan Kecelakaan Kerja
ASN	: Aparatur Sipil Negara	JKN	: Jaminan Kesehatan Nasional
Bansos	: Bantuan Sosial	KD	: Kewenangan Kantor Daerah
Bapanas	: Badan Pangan Nasional	KMP	: Koperasi Merah Putih
BBM	: Bahan Bakar Minyak	KMK	: Keputusan Menteri Keuangan
BI	: Bank Indonesia	KND	: Kekayaan Negara Dipisahkan
BK	: Bea Keluar	K/L	: Kementerian/Lembaga
BLT	: Bantuan Langsung Tunai	KPM	: Keluarga Penerima Manfaat
BLU	: Badan Layanan Umum	KPR	: Kredit Perumahan Rakyat
BM	: Bea Masuk	KUR	: Kredit Usaha Rakyat
BMN	: Barang Milik Negara	LMAN	: Lembaga Manajemen Aset Negara
BPI	: Badan Pengelola Investasi	LPG	: Liquefied Petroleum Gas
BPS	: Badan Pusat Statistik	MBG	: Makan Bergizi Gratis
bps	: basis points	MBR	: Masyarakat Berpenghasilan Rendah
Bulog	: Badan Urusan Logistik	Migas	: Minyak dan Gas Bumi
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara	mtm	: Month to Month
BPP	: Belanja Pemerintah Pusat	PBI	: Penerima Bantuan Iuran
CHT	: Cukai Hasil Tembakau	PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
CPO	: Crude Palm Oil	PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
DMO	: Domestic Market Obligation	PPH	: Pajak Penghasilan
DJBC	: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	PPN	: Pajak Pertambahan Nilai
DJP	: Direktorat Jenderal Pajak	SBN	: Surat Berharga Negara
FLPP	: Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan	THR	: Tunjangan Hari Raya
		UU	: Undang-Undang
		Ytd	: Year to date
		YoY	: Year on year

Kritik dan saran scan barcode di bawah ini:



atau klik tautan di bawah ini:
<https://forms.office.com/r/XtsDeF87BD>

Pindai dan unduh versi APBN KiTa selengkapnya di sini.



Pertanyaan lebih lanjut terkait APBN pindai di sini.



www.kemenkeu.go.id/apbnkita

Ringkasan Eksekutif

APBN Sepanjang 2025

Kerja Keras, Adaptif dan Responsif Menghadapi Tantangan

Hingga Triwulan IV 2025, APBN tetap menjadi instrumen kebijakan yang antisipatif dan responsif menghadapi perkembangan dinamika global dan domestik. APBN 2025 tetap ekspansif namun disiplin melalui defisit yang terkendali. Defisit APBN 2025 terjaga dalam batas aman sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen PDB, sejalan dengan ketentuan batas defisit maksimal 3 persen sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17/2003.

Perkembangan kinerja fiskal tersebut ditopang oleh stabilitas makro yang tetap terjaga hingga akhir tahun. Pertumbuhan ekonomi 2025 berada pada level 5,11 persen (*year on year*, *yoy*), dengan inflasi 2,92 persen (*yoy*) yang terkendali melalui kebijakan harga dan penguatan peran Badan Urusan Logistik (Bulog). Di sisi pasar keuangan, *yield* SBN konsisten menurun dan nilai tukar bergerak dalam rentang yang relatif stabil pada akhir tahun.

Di Triwulan IV, kondisi pasar menunjukkan perbaikan. Stabilitas ekonomi makro kembali menguat dan arus modal berbalik positif, dengan *inflow* Rp31,2 triliun setelah *outflow* pada triwulan sebelumnya. Perbaikan ini turut mendukung stabilisasi rupiah dan penguatan pasar keuangan domestik hingga akhir tahun.

Dari sisi pendapatan, realisasi pendapatan negara mencapai Rp2.756,3 triliun (91,7 persen APBN) di tengah berbagai tantangan, terutama dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas, gejala perekonomian global, serta pengalihan pengelolaan

penerimaan dari dividen BUMN ke BPI Danantara.

Penerimaan perpajakan tercatat Rp2.217,9 triliun (89,0 persen APBN) sebagai upaya optimal di tengah dinamika perekonomian yang menantang, dengan dukungan aktivitas ekonomi domestik, perbaikan kepatuhan, dan penguatan pengawasan. Capaian tersebut terdiri atas penerimaan pajak Rp1.917,6 triliun (87,6 persen APBN) dan penerimaan kepabeanan dan cukai Rp300,3 triliun (99,6 persen APBN). Penerimaan pajak dipengaruhi oleh moderasi harga komoditas, peningkatan restitusi seiring relaksasi kebijakan dan percepatan pemeriksaan, serta kebijakan fiskal untuk menjaga daya beli masyarakat dan keberlanjutan usaha. Secara bruto, penerimaan pajak bruto tetap mencatat kinerja positif dengan pertumbuhan 3,7 persen (*yoy*), sejalan dengan kondisi ekonomi serta didukung oleh penyesuaian strategi DJP pada semester II melalui penguatan edukasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum. Upaya tersebut diperkuat dengan intensifikasi penegakan hukum lintas instansi sebagai *deterrent effect*.

Penerimaan Pajak terutama berasal dari PPh Nonmigas Rp986,3 triliun dan Pajak Pertambahan Nilai serta Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN/PPnBM) sebesar Rp790,2 triliun masing-masing 51,4 persen dan 41,2 persen terhadap total penerimaan Pajak). PPh Nonmigas masih ditopang oleh tiga komponen terbesar, yaitu PPh Pasal 25/29 Badan, PPh Pasal 21, dan PPh Final, yang secara kumulatif berkontribusi 70,0 persen.

Sementara itu, penerimaan Pajak yang bersumber dari PPN/PPnBM terutama ditopang oleh penerimaan PPN, khususnya PPN Dalam Negeri dan PPN Impor, masing-masing 55,78 persen dan 40,59 persen terhadap total penerimaan PPN/PPnBM). Secara kumulatif, kinerja penerimaan PPN/PPnBM terkontraksi 4,62 persen (*yoy*), yang terutama disebabkan oleh kontraksi PPN Dalam Negeri 15,95 persen. Di sisi lain, PPN Impor menunjukkan kinerja yang lebih baik dengan pertumbuhan signifikan 16,97 persen (*yoy*).

Penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp300,3 triliun dengan rincian: Cukai Rp221,7 triliun (90,8 persen APBN), dipengaruhi produksi hasil tembakau, Bea Keluar Rp28,4 triliun (636,1 persen APBN), didorong kenaikan harga CPO dan volume ekspor sawit serta relaksasi kebijakan ekspor konsentrat tembaga, dan Bea Masuk Rp50,2 triliun (94,8 persen dari APBN), terkontraksi 5,3 persen (*yoy*) dipengaruhi oleh utilisasi FTA. Selain itu, dalam hal pengawasan kepabeanan dan cukai telah dilakukan penindakan secara konsisten, dengan nilai barang hasil penindakan yang meningkat.

Realisasi PNBP sampai dengan akhir Triwulan IV 2025 mencapai Rp534,1 triliun (104,0 persen dari APBN). Kinerja PNBP terutama didorong capaian PNBP KND dari pendapatan BLU dan capaian PNBP Lainnya dari setoran PNBP K/L.

Meskipun, realisasi PNBP KND dari setoran dividen BUMN tidak mencapai target akibat telah setelah ditetapkannya UU Nomor 1/2025 yang menunjuk BPI Danantara untuk mengelola dividen dimaksud, realisasi Pendapatan BLU mencapai Rp103,7 triliun atau 133,0 persen dari APBN yang didukung oleh Pendapatan BLU Sawit dan PNBP Rumah Sakit (RS) Kementerian Kesehatan.

Sementara itu, realisasi PNBP Lainnya mencapai Rp196,2 triliun atau 153,6 persen APBN. Kinerja positif ini disebabkan oleh PNBP KL yang terealisasi Rp172,5 triliun atau

200,5 persen APBN dan DMO yang terealisasi Rp4,7 triliun atau 105,1 persen APBN.

Pada sisi Belanja Negara, terealisasi Rp3.451,4 triliun (95,3 persen APBN). Belanja negara menjalankan peran *shock absorber* untuk menjaga daya beli melalui berbagai program stimulus (antara lain diskon listrik, dukungan Jaminan Kecelakaan Kerja/JKK, diskon moda transportasi, penebalan bansos, bantuan pangan, dan bantuan subsidi upah), sekaligus memperkuat sinergi pusat dan daerah guna meningkatkan kualitas layanan publik dan mengurangi kesenjangan antarwilayah.

Belanja Negara juga diarahkan pada dukungan program prioritas yang manfaatnya langsung dirasakan masyarakat. Belanja untuk program prioritas terealisasi Rp805,4 triliun, mencakup perlindungan sosial (Program Keluarga Harapan/PKH, Kartu Sembako, PBI JKN, penguatan layanan (seperti Cek Kesehatan Gratis dan revitalisasi RS), program strategis seperti MBG, dan program prioritas lainnya.

Hingga 31 Desember 2025, realisasi BPP yang merupakan bagian dari Belanja Negara tercatat Rp2.602,3 triliun (96,3 persen APBN) dan dikonsolidasikan sebagai instrumen pendorong pertumbuhan, peningkatan kesejahteraan, serta penanganan bencana. BPP didesain fleksibel untuk mengakomodasi program prioritas sekaligus mendukung penyesuaian struktur pemerintahan,

dan stimulus ekonomi. BPP menunjukkan akselerasi pada pos-pos seperti belanja pegawai, belanja barang dan belanja K/L yang dipengaruhi dukungan program prioritas dan bantuan pemerintah.

Dorongan produktif juga berasal dari belanja modal, utamanya untuk penguatan pertahanan negara, dukungan ketahanan pangan, dan infrastruktur IKN, serta belanja bansos untuk menjaga daya beli melalui berbagai bantuan ke masyarakat. Dengan realisasi tersebut, BPP berfungsi ganda sebagai *shock absorber* (menopang daya beli dan stabilisasi) sekaligus *development agent* (mendorong agenda pembangunan) dengan akselerasi belanja yang diarahkan tetap efisien dan produktif.

Di sisi Transfer ke Daerah (TKD), penyaluran TKD 2025 mencapai Rp849,0 triliun, berperan mendukung pelayanan publik dan sektor prioritas, sekaligus mendorong belanja daerah yang lebih efektif dan efisien. Melalui penajaman prioritas dan penguatan tata kelola, realisasi TKD 2025 berperan mendukung pelayanan publik dan sektor prioritas, sekaligus mendorong belanja daerah yang lebih tepat sasaran, efisien, dan berdampak nyata.

Penguatan TKD terlihat dari berbagai langkah kebijakan, antara lain penyaluran Tunjangan Profesi Guru, dukungan Dana Desa untuk pembentukan badan hukum KD/KMP, THR dan Gaji ke-13 ASN daerah, dan penyaluran TKD untuk daerah bencana di 3 provinsi Sumatera.

Kinerja Pembiayaan Anggaran berperan responsif dalam menutupi defisit APBN, membiayai investasi dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Hingga Triwulan IV 2025, realisasi sementara Pembiayaan Anggaran 2025 mencapai Rp744,0 triliun (120,7 persen APBN). Pembiayaan Anggaran terdiri atas Pembiayaan Utang dan Pembiayaan NonUtang dengan masing-masing terealisasi Rp736 triliun dan Rp7,7 triliun.

Realisasi Pembiayaan Utang APBN 2025 dilakukan melalui penerbitan SBN dan pinjaman yang dikelola secara hati-hati dan terukur guna meminimalkan biaya dan mengendalikan risiko. Inovasi instrumen pembiayaan 2025 dilakukan melalui penerbitan *Kangaroo Bond* dan *Dimsum Bond*. Hal ini mendapat respon positif di pasar internasional. Sementara itu, pembiayaan investasi berfokus pada sektor prioritas untuk kesejahteraan masyarakat serta diarahkan untuk meningkatkan pelayanan publik dan memperkuat kerja sama internasional.

Secara keseluruhan, kinerja pengelolaan anggaran menunjukkan bahwa APBN tetap bekerja sebagai peredam gejolak dan penopang pertumbuhan ekonomi. Defisit tetap terjaga dalam batas aman, pendapatan dioptimalkan di tengah tekanan, belanja tetap ekspansif namun fokus dan berorientasi hasil, serta pembiayaan dikelola hati-hati untuk menjaga kesinambungan fiskal dalam menyongsong pelaksanaan APBN 2026.

JANUARI 2025



Foto: Kantor Staf Presiden

Program MBG Resmi Dilaksanakan Sejak Awal Tahun

Pada 6 Januari 2025, Pemerintah resmi memulai program MBG secara nasional guna mempercepat pembangunan SDM unggul dan mendukung cita-cita Indonesia Emas 2045. Program ini fokus pada kelompok rentan, seperti anak sekolah, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.

Penyesuaian Tarif PPN 12% Terbatas Hanya pada Barang Mewah

Pemerintah memutuskan kenaikan tarif 1% dari 11% menjadi 12% dikenakan khusus terhadap barang dan jasa mewah, seperti hunian mewah, kendaraan mewah, kapal pesiar, dan barang elektronik premium. Penyesuaian Tarif PPN 12% dilakukan agar tetap menjaga daya beli masyarakat, inflasi, serta momentum dan aktivitas perekonomian.

Efisiensi Belanja APBN Ditetapkan melalui Inpres

Dalam rangka efisiensi belanja APBN dan APBD 2025 di lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemda, Presiden menerbitkan Inpres No. 1 Tahun 2025 pada 22 Januari 2025. Instruksi ini bertujuan untuk mengoptimalkan alokasi APBN dalam memberikan manfaat yang semakin lebih efektif kepada masyarakat.



Foto: Biro KLI Kementerian Keuangan

Perkembangan Ekonomi Makro

Perkembangan Ekonomi Sepanjang 2025

Resilien dan Stabil di Tengah Berbagai Dinamika

Di tengah kondisi perekonomian global yang dinamis sepanjang 2025, ekonomi Indonesia tetap tumbuh resilien. Ekonomi Indonesia pada Triwulan III 2025 tumbuh 5,04 persen (yoy), atau 5,01 persen (*cumulative to cumulative, etc*), dan diproyeksikan terus tumbuh kuat sepanjang 2025. Momentum pertumbuhan ekonomi domestik yang terus terjaga didukung oleh konsumsi rumah tangga yang tetap kuat dan akselerasi investasi yang berlanjut. Selain itu, inflasi yang tetap terkendali menjadi faktor penting yang mendukung ekonomi masyarakat. Inflasi inti yang menguat, harga pangan yang terkendali, serta inflasi komponen AP yang rendah mampu menopang tumbuhnya konsumsi domestik dan aktivitas usaha. Pemerintah juga melakukan kebijakan stimulus untuk makin mendorong kuatnya ekonomi masyarakat.

Meskipun dinamika global menjadi tantangan, sisi eksternal tetap menunjukkan ketahanan. Neraca Perdagangan terus mencatatkan surplus selama 68 bulan berturut-turut sejalan dengan aktivitas manufaktur domestik yang bergerak positif. Kondisi pasar keuangan domestik kembali menunjukkan sinyal positif dengan *inflow* yang berkontribusi pada kuatnya cadangan devisa. Hal ini juga sejalan dengan IHSG yang terus menguat, mencerminkan kepercayaan pasar yang makin meningkat. Berbagai kondisi ini menunjukkan perekonomian Indonesia selama 2025 sangat adaptif dalam menghadapi tantangan dinamika global dan domestik.



Pada triwulan awal 2025, dinamika kebijakan perdagangan global menjadi faktor risiko yang krusial. Kebijakan tarif agresif oleh Amerika Serikat meningkatkan risiko eksternal bagi sektor riil dan menciptakan tekanan pada pasar keuangan. Tekanan tersebut menjadi tantangan baru di tengah upaya transisi pemerintahan baru. Meskipun demikian, proses transisi domestik tetap dapat dilaksanakan dengan lancar dengan tetap menjaga kredibilitas.

Beberapa kebijakan baru diluncurkan mengawali pemerintahan baru. Dalam rangka penguatan kualitas sumber daya manusia secara jangka panjang, perhatian terhadap gizi

diwujudkan melalui program MBG yang diluncurkan pada 6 Januari 2025. Selain itu, kebijakan di sisi kesehatan, program Cek Kesehatan Gratis mulai dilaksanakan sejak 10 Februari. Terobosan pengelolaan dana juga dilakukan dengan pendirian *Sovereign Wealth Fund* Danantara pada 24 Februari 2025.

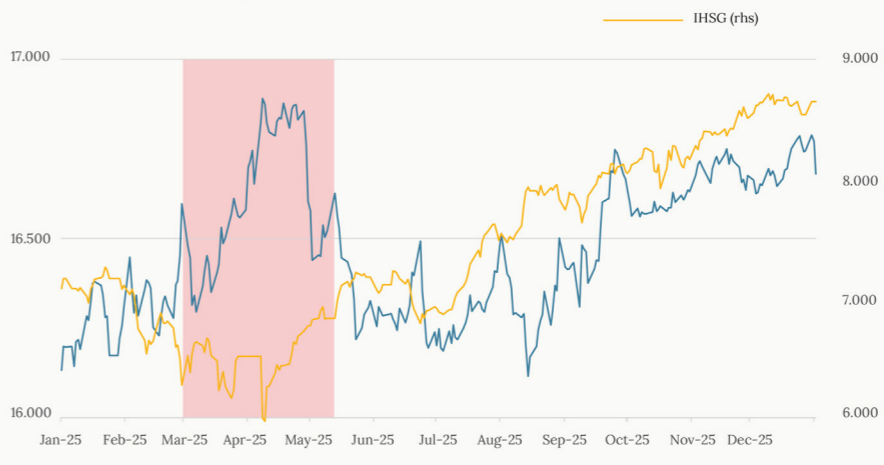
Untuk menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan, sisi produksi dan penawaran terus diperkuat. Penguatan sisi penawaran diarahkan untuk memenuhi kebutuhan program prioritas seperti MBG. Program tersebut didukung kebijakan pupuk bersubsidi dan penguatan peran Bulog untuk penyerapan produksi lokal dan stabilisasi harga. Stok beras Bulog yang mencapai 2,3 juta ton memperkuat cadangan pangan sebagai modal untuk membangun ketahanan pangan nasional. Berbagai program tersebut mampu mendorong tumbuh signifikannya sektor pertanian hingga mencapai 10,5 persen (yoy).

Sejalan dengan perkembangan, Pemerintah mengambil langkah-langkah kebijakan strategis untuk menjaga stabilitas dan mendorong penguatan ekonomi. Kebijakan pengenaan PPN pada barang mewah dan pemberian paket stimulus ekonomi hingga mencapai Rp33,3 triliun ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Untuk menjaga sisi penawaran, Pemerintah juga memberikan dukungan berupa Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), sektor padat karya, perumahan, dan otomotif. Rangkaian kebijakan ini juga didukung pelanggaran kebijakan moneter untuk memberikan ruang pemulihan kredit dan investasi. Penurunan BI Rate sebesar 25 bps mampu menjadi dukungan untuk menggerakkan aktivitas sektor riil. Langkah-langkah pendisiplinan fiskal melalui efisiensi belanja juga ditujukan untuk meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran dengan mengarahkan pada program-program prioritas, seperti ketahanan pangan,

Pergerakan Nilai Tukar dan IHSG 2025

Kebijakan Tarif Resiprokal AS pada Triwulan II 2025 memberikan dampak temporer pada pasar keuangan negara berkembang, termasuk Indonesia

Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg (diolah)



hilirisasi sumber daya alam, serta dukungan pada Danantara. Bauran kebijakan nasional terus konsisten dilakukan untuk memberikan hasil yang optimal bagi peningkatan pendapatan masyarakat.

Dinamika kebijakan perdagangan masih terus berlanjut pada Triwulan II. Kebijakan tarif resiprokal AS pada April menimbulkan guncangan di pasar Keuangan global, tidak terkecuali di Indonesia. Meskipun pangsa ekspor Indonesia ke AS hanya berkisar 10 persen dari total ekspor, pasar AS berperan strategis karena menyerap produk manufaktur domestik yang memiliki nilai tambah tinggi dan bersifat padat karya. Sentimen negatif dari kebijakan tersebut juga menyebabkan koreksi pada IHSG dan tekanan pada nilai tukar Rupiah secara temporer. Selain kebijakan tarif, eskalasi konflik geopolitik di Timur Tengah juga sempat mendorong harga minyak mentah dunia mencapai USD75 per barel. Situasi ini berpotensi memberikan dampak negatif pada perekonomian domestik.

Menghadapi kondisi tersebut, Pemerintah terus berupaya untuk menjaga resiliensi ekonomi domestik. Paket stimulus ekonomi jilid II diluncurkan sebesar Rp24,4 triliun untuk terus memperkuat konsumsi dalam negeri. Kebijakan ini merupakan langkah *counter-cyclical*, tepat sasaran, dan bersifat sementara untuk menjaga

momentum pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan stabilitas. Momen hari besar keagamaan nasional Ramadan dan Idulfitri juga mendorong berbagai kebijakan untuk menjaga permintaan masyarakat tetap tumbuh dalam menopang perekonomian. Beberapa kebijakan diimplementasikan, antara lain diskon transportasi, penguatan bantuan sosial dan bantuan subsidi upah, serta dukungan sektor padat karya. Program prioritas seperti MBG terus diakselerasi dengan meningkatkan penerima manfaat didukung dengan penguatan sisi produksi beras yang mencapai titik tertinggi dan memadainya stok beras Bulog hingga 4,2 juta ton.

Langkah-langkah kebijakan secara konsisten terus dilakukan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Sektor riil terus bergerak sehingga mampu mendukung tumbuhnya ekonomi domestik sebesar 5,12 persen (yoy). Pertumbuhan ekonomi ini ditopang oleh investasi yang tumbuh tinggi yang meningkat di kisaran 11 persen. Semua sektor mencatatkan kinerja yang kuat, terutama sektor manufaktur dan perdagangan yang didukung oleh kuatnya permintaan domestik dan berlanjutnya hilirisasi. Pertumbuhan ekonomi secara regional tetap positif, dengan wilayah Sulawesi dan Jawa mencatat kinerja tertinggi didorong

industri pengolahan, pertambangan, dan layanan teknologi, sementara wilayah lain tumbuh solid sejalan dengan keunggulan sektoral masing-masing.

Situasi ekonomi global dan domestik di Triwulan III kembali mengalami ketidakpastian. Volatilitas sektor keuangan dipengaruhi oleh kekhawatiran investor, sehingga memberikan tekanan pada pasar modal di tengah gejolak sosial yang terjadi di domestik. Terobosan kebijakan dilakukan untuk terus memacu sektor riil agar lebih cepat sehingga ekonomi dapat tumbuh lebih tinggi. Pemerintah mengambil langkah untuk melakukan pemindahan penempatan kas negara sebesar Rp200 triliun dari Bank Indonesia ke Himbara dengan tujuan untuk menciptakan *multiplier effect*. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan penyaluran kredit dan penurunan suku bunga sehingga mendukung tumbuhnya aktivitas usaha.

Paket stimulus ekonomi pada Triwulan III juga diberikan untuk mendorong momentum pertumbuhan. Paket stimulus yang mencapai Rp15,6 triliun ditujukan untuk mendukung sisi penawaran dan daya beli seperti insentif PPh Pasal 21 sektor pariwisata, perpanjangan jangka waktu PPh Final untuk UMKM, bantuan pangan, dan diskon iuran JKK. Berbagai rangkaian kebijakan ini mampu mendorong ekonomi domestik tetap tumbuh di atas level 5 persen pada Triwulan III didukung kinerja konsumsi rumah tangga dan ekspor yang kuat serta peningkatan konsumsi pemerintah. Dari sisi produksi, kinerja sektor-sektor ekonomi tetap solid, terutama Industri Pengolahan yang didukung permintaan domestik dan ekspor. Sektor utama lainnya seperti perdagangan dan transportasi juga tumbuh sejalan dengan aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat, serta implementasi program strategis nasional.

Dinamika kebijakan AS terkait tarif resiprokal yang cukup tinggi mulai mereda. Melalui negosiasi yang intensif Indonesia mampu menurunkan tarif dari 32 persen

Pertumbuhan Ekonomi Triwulan IV 2025 Melampaui Ekspektasi Pasar

Perekonomian Indonesia pada Triwulan IV 2025 tumbuh kuat 5,39 persen (yoy), di atas proyeksi pasar. Sehingga secara keseluruhan sepanjang tahun 2025 tumbuh 5,11 persen (yoy), melampaui proyeksi sejumlah lembaga internasional yang memperkirakan hanya akan tumbuh di bawah 5 persen.

Secara triwulanan, pertumbuhan ekonomi terjaga stabil dan menguat pada paruh kedua 2025. Pada Triwulan I 2025, ekonomi tumbuh 4,87 persen (yoy) dan meningkat pada Triwulan II 2025 menjadi 5,12 persen (yoy). Tren pertumbuhan berlanjut pada Triwulan III 2025 sebesar 5,04 persen (yoy), sebelum mencapai puncaknya pada Triwulan IV 2025, yang merupakan laju pertumbuhan tertinggi sejak Triwulan IV 2022.

Dari sisi produksi, sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di Triwulan IV ditopang oleh transportasi, kemudian diikuti informasi dan komunikasi, jasa keuangan, perdagangan, manufaktur, dan pertanian. Tingginya pertumbuhan transportasi (8,98 persen, yoy) dan infokom (8,09 persen, yoy) seiring peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat yang didorong program stimulus pemerintah. Sedangkan pertumbuhan sektor jasa keuangan 7,92 persen, yoy) didorong semakin membaiknya likuiditas dan kenaikan penyaluran kredit oleh perbankan.

Sektor perdagangan dalam tren meningkat (dari 5,04 persen di Triwulan I menjadi 6,07 persen di Triwulan IV) dan manufaktur tumbuh tinggi (5,40 persen, yoy) seiring implementasi program-program prioritas Pemerintah. Tumbuhnya industri manufaktur juga didorong membaiknya kinerja industri penghasil komoditas ekspor seperti CPO dan logam dasar, serta keberhasilan program hilirisasi. Pertumbuhan sektor pertanian yang cukup tinggi (5,14 persen, yoy) didorong meningkatnya produksi tanaman pangan, peternakan, dan perikanan yang mendukung program unggulan pemerintah seperti MBG dan ketahanan pangan. Di lain pihak, sektor pertambangan mengalami kontraksi 1,31 persen, dampak dari moderasi harga komoditas global dan tekanan perdagangan global.

Dari sisi pengeluaran, sumber pertumbuhan ekonomi tertinggi di Triwulan IV berasal dari konsumsi rumah tangga, kemudian diikuti Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) dan konsumsi pemerintah. Konsumsi rumah tangga

tumbuh di 5,1 persen dimana sebelumnya sejak Triwulan IV 2023 tumbuh di bawah 5 persen. PMTB juga tumbuh kuat 6,12 persen dan konsumsi pemerintah di level 4,5 persen, terjaga di atas 4 persen dalam dua triwulan terakhir.

Pertumbuhan konsumsi rumah tangga selama 2025 konsisten meningkat, sejalan dengan meningkatnya mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, serta dampak dari stimulus yang diberikan oleh pemerintah. PMTB juga mengalami peningkatan didukung akselerasi realisasi investasi fisik. Sedangkan konsumsi pemerintah, setelah berkontraksi di paruh pertama 2025 sebagai dampak efisiensi, tumbuh cukup tinggi di paruh kedua 2025 seiring akselerasi program-program prioritas pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ekspor barang dan jasa juga tumbuh positif, didorong oleh kenaikan nilai ekspor barang nonmigas dan ekspor jasa.

Laju Pertumbuhan Ekonomi Indonesia 2024-2025 Menurut Pengeluaran (% yoy)

Konsumsi domestik dan investasi menjadi pendorong utama pertumbuhan

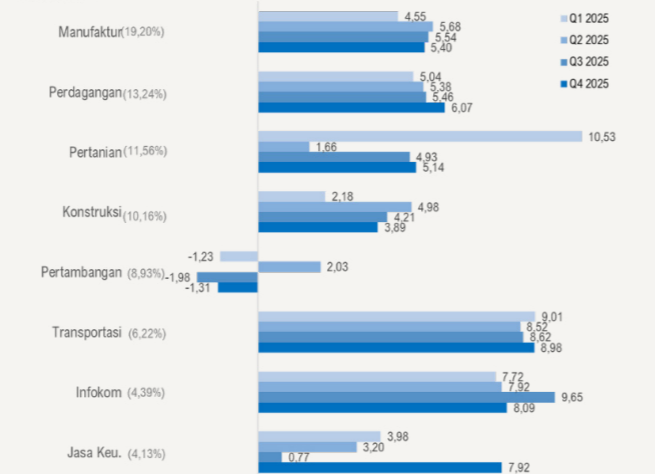
Sumber: BPS

Komponen Pengeluaran	2024	2025				2025
		TW I	TW II	TW III	TW IV	
Konsumsi RT	4,94	4,95	4,97	4,89	5,11	4,98
Konsumsi Pemerintah	6,76	-1,22	-0,32	5,66	4,55	2,50
Konsumsi LNPR	12,48	3,07	7,82	3,76	5,90	5,13
PMTB	4,61	2,12	6,99	5,04	6,12	5,09
Ekspor	6,85	5,91	10,14	9,14	3,25	7,03
Impor	8,15	3,57	11,15	0,86	3,96	4,77
PDB	5,03	4,87	5,12	5,04	5,39	5,11

Pertumbuhan PDB Tahun 2025 dari Sisi Produksi (% yoy)

Kinerja sektoral tetap solid didukung kebijakan ketahanan pangan dan stimulus ekonomi di tengah tren penurunan harga komoditas

Sumber: BPS



menjadi 19 persen. Penurunan tarif ini memberikan keuntungan bagi Indonesia karena daya saing yang lebih tinggi, terutama dibandingkan dengan kawasan ASEAN. Selain itu, Indonesia telah menandatangani kerja sama Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (EU CEPA) yang mendukung perluasan akses pasar ekspor ke kawasan Eropa

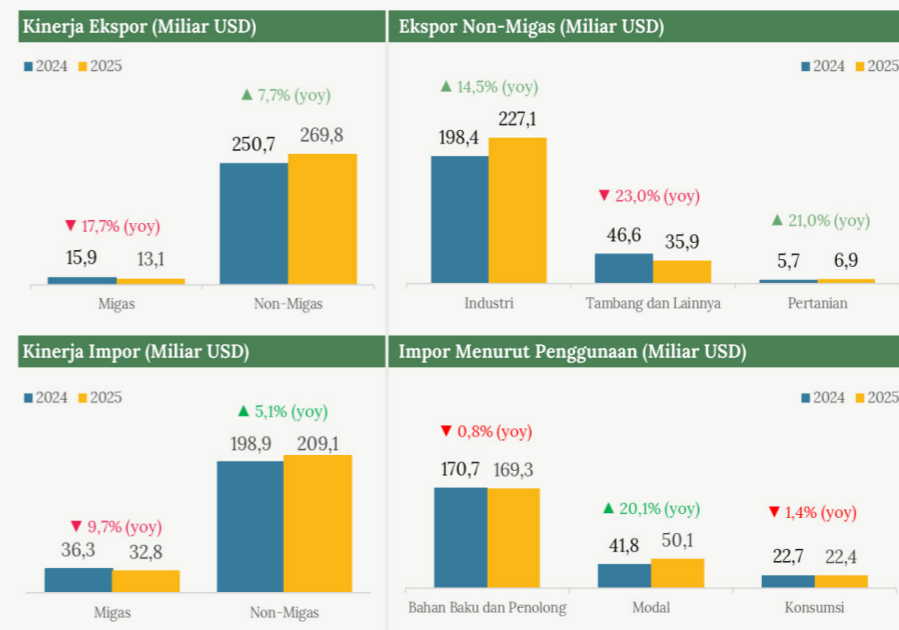
dalam jangka menengah. Kondisi tersebut juga berimplikasi pada kinerja Neraca Perdagangan bulan Januari hingga September yang meningkat hampir 51 persen, ditopang oleh ekspor yang tumbuh lebih dari 8 persen. Selain sisi eksternal, kinerja ini juga didukung oleh kebijakan domestik untuk penguatan nilai tambah produk ekspor.

Situasi global mulai kondusif sehingga mendukung penguatan prospek ekonomi domestik pada Triwulan IV 2025. Kesepakatan gencatan perang dagang AS-Tiongkok serta ekspektasi penurunan suku bunga the Fed yang lebih agresif menciptakan optimisme dan sentimen positif secara global. Membaiknya optimisme publik atas

Kinerja Sektor Eksternal Melanjutkan Surplus 68 Bulan Berturut-turut

Ditopang pertumbuhan ekspor, terutama di sektor industri pengolahan yang semakin berorientasi pada peningkatan nilai tambah.

Sumber: BPS



perekonomian menjadi modal yang baik bagi peningkatan aktivitas ekonomi domestik.

Perkembangan ekonomi domestik memberikan sinyal yang positif. Beberapa indikator konsumsi rumah tangga masih mencerminkan penguatan, seperti Indeks Penjualan Riil yang terus bergerak naik dan Indeks Keyakinan Konsumen yang tetap berada di level optimis. Aktivitas manufaktur yang ditunjukkan dengan *Manufacture Purchasing Manager's Index* (PMI) juga menggambarkan trayektori yang positif, konsisten bergerak pada zona ekspansif selama 5 bulan terakhir hingga mencapai 51,2 pada Desember 2025.

Untuk mengupayakan kesinambungan pertumbuhan, mesin ekonomi terus dipastikan bergerak selaras melalui bauran kebijakan yang padu. Kebijakan fiskal terus dirancang agar terus terarah, sejalan dengan kebijakan untuk menjaga stabilitas sektor keuangan, dan kebijakan untuk perbaikan iklim investasi secara berkelanjutan. Upaya konkret terus dilakukan melalui pemberian stimulus yang mencapai Rp37,4 triliun, yaitu BLT sementara, program magang, serta diskon transportasi pada masa liburan Natal dan Tahun Baru. Upaya

lain yang juga ditempuh melalui tambahan penempatan dana pemerintah di perbankan, perbaikan tata kelola devisa hasil ekspor, serta deregulasi dan *debottlenecking* investasi. Tidak hanya berfokus pada menjaga momentum pertumbuhan, arah kebijakan juga dilakukan untuk memastikan peningkatan kualitas pertumbuhan ekonomi ke depan.

Stabilitas ekonomi makro domestik pada 2025 menopang tetap tumbuhnya ekonomi Indonesia di tengah dinamika situasi global. Ekonomi pada 2025 diproyeksikan dapat tumbuh 5,2 persen sesuai dengan Target. Inflasi tetap terkendali dalam sasaran mencapai 2,92 persen, masih dalam rentang 2,5 persen \pm 1 persen menopang tumbuhnya permintaan. Stabilitas eksternal tetap kuat tercermin dari tetap berlanjutnya surplus Neraca Perdagangan dan cadangan devisa Desember yang masih jauh di atas standar internasional.

Ketahanan Perdagangan Indonesia di Tengah Tekanan Global

Di tengah dinamika perekonomian global yang ditandai oleh meningkatnya tensi geopolitik, menguatnya proteksionisme,

dan berlanjutnya ketidakpastian perdagangan internasional, kinerja perdagangan Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Dukungan kebijakan hilirisasi yang diiringi penguatan fasilitasi perdagangan, perbaikan layanan, serta pengawasan yang efektif berperan penting dalam menjaga ketahanan kinerja ekspor dan impor nasional.

Kinerja Neraca Perdagangan Indonesia hingga 31 Desember 2025 secara kumulatif mencatat surplus USD 46,0 miliar, meningkat 46,8 persen dibandingkan 2024 yang tercatat USD 31,3 miliar. Surplus menguat didorong oleh penurunan defisit migas serta peningkatan kontribusi surplus nonmigas sebagai penopang utama.

Dari sisi kinerja perdagangan, ekspor kumulatif tumbuh 6,2 persen (yoy) mencapai USD 283,0 miliar, dengan ekspor nonmigas USD 269,9 miliar atau tumbuh 7,7 persen. Peningkatan ekspor terutama berasal dari sektor industri pengolahan yang terus menguat seiring implementasi kebijakan hilirisasi, khususnya pada komoditas nikel, dan tembaga. Sementara itu, impor tercatat meningkat 0,8 persen (yoy) menjadi USD 237,0 miliar, terutama ditopang oleh impor barang modal yang mencerminkan keberlanjutan aktivitas produksi dan investasi domestik.

Secara bulanan, pada Desember 2025, neraca perdagangan mencatat surplus USD7,5 miliar, didorong oleh peningkatan ekspor dari sektor industri logam dan kelapa sawit. Capaian ini sekaligus menandai keberlanjutan surplus perdagangan selama 68 bulan berturut-turut, menunjukkan konsistensi kinerja sektor eksternal Indonesia.

Capaian tersebut menegaskan ketahanan sektor eksternal Indonesia serta perannya dalam menopang pertumbuhan ekonomi nasional ke depan. Dengan struktur ekspor yang semakin bernilai tambah, diversifikasi pasar yang konsisten namun adaptif, kinerja perdagangan internasional diharapkan tetap berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

FEBRUARI 2025



Foto: Biro Pers Kepresidenan

Memperkuat Pertumbuhan melalui Stimulus Triwulan I Rp33 Triliun

Stimulus ekonomi tahap I sebesar Rp33 triliun dicairkan dengan tujuan untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha. Stimulus yang diberikan antara lain berupa diskon listrik 50%, Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Perumahan, PPN DTP Tiket Pesawat / stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional, bantuan diskon premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), peningkatan aksesibilitas Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), dan pembiayaan industri padat karya serta insentif otomotif.

BPI Danantara Diresmikan untuk Optimalisasi Pengelolaan BUMN

Presiden Prabowo Subianto resmi membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) pada 24 Februari 2025. Peresmian Danantara ini menandai langkah strategis Pemerintah dalam mengelola investasi nasional guna mendukung pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan.



Foto: Freepik

MARET 2025

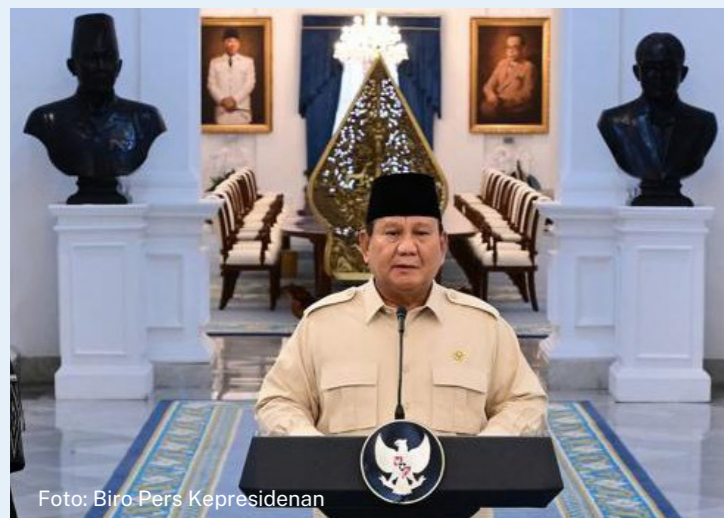


Foto: Biro Pers Kepresidenan

Pemberian THR dan Gaji ke-13 Menjaga Daya Beli

Presiden mengumumkan kebijakan pemberian THR dan Gaji ke-13 Tahun 2025 di Istana Merdeka pada 11 Maret 2025. Pemberian ini ditujukan kepada 9,4 juta Aparatur Negara, termasuk Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), Hakim, prajurit TNI-Polri, serta para pensiunan. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2025.



Foto: Badan Pemeriksa Keuangan

Menjaga Akuntabilitas melalui LKPP 2024

Menkeu menghadiri Entry Meeting Pemeriksaan LKPP TA 2024 (Unaudited) dan menyerahkannya kepada BPK pada 21 Maret 2025. Pemeriksaan LKPP ini merupakan langkah penting dalam memastikan pengelolaan keuangan negara dijalankan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Kinerja Sektor Keuangan

Kinerja Stabil Sektor Keuangan 2025

Mendukung Aktivitas Ekonomi Masyarakat

Pada 2025, sektor keuangan Indonesia tetap stabil dan terjaga di tengah ketidakpastian ekonomi global. Tekanan ekonomi global meningkat akibat kebijakan tarif dan proteksionisme AS yang menahan laju perdagangan internasional dan meningkatkan volatilitas di pasar keuangan. Selain itu, ketidakpastian arah suku bunga bank sentral global juga meningkatkan gejolak di pasar keuangan. Konflik geopolitik juga berperan dalam memengaruhi arus modal global dan mendorong peningkatan permintaan serta harga *asset safe-haven* seperti emas.

Meski sektor keuangan global bergerak dinamis, kondisi sektor keuangan domestik tetap resilien ditandai dengan kinerja positif indikator sektor keuangan. IHSG mampu mencapai *all time high* pada akhir 2025, *yield* SBN terus menurun, kurs Rupiah relatif resilien, dan kinerja industri jasa keuangan juga tetap solid sehingga mampu mendukung fungsi intermediasi keuangan secara lebih optimal.

Sepanjang Triwulan IV 2025, pasar keuangan domestik berkinerja positif. Kondisi ini sejalan dengan peningkatan optimisme pelaku pasar yang didorong oleh ekspektasi pemangkasan suku bunga The Fed dan sentimen positif terhadap saham-saham konglomerasi. IHSG menembus rekor *all-time high* pada 8 Desember 2025 di level 8.710,7. Sepanjang 2025, IHSG menguat 22,1 persen (*year to date, ytd*). Hal itu jauh lebih baik dibandingkan dengan kinerja indeks saham di kawasan, seperti KLCI Malaysia (2,3 persen), PSEI Filipina (-7,3 persen),

dan SET Thailand (-10,0 persen).

Seluruh sektor di IHSG tercatat menguat, terutama di sektor teknologi dan perindustrian, yang menguat lebih dari 100 persen, masing-masing 138,4 persen dan 108,1 persen sepanjang 2025. Namun demikian, pertumbuhan kinerja emiten masih belum merata di seluruh sektor. Beberapa sektor seperti keuangan dan barang konsumsi nonprimer masih tumbuh terbatas, yaitu masing-masing 11,3 persen dan 9,6 persen.

Aktivitas perdagangan saham pada Triwulan IV menunjukkan peningkatan signifikan tercermin dari lonjakan nilai dan volume transaksi harian IHSG. Kenaikan ini juga menandakan membaiknya minat investor dan meningkatnya likuiditas pasar. Peningkatan *turnover* dan volume perdagangan saham juga mencerminkan partisipasi investor yang lebih luas, terutama pada saham-saham berkapitalisasi besar yang mendorong IHSG mencapai rekor tertinggi.

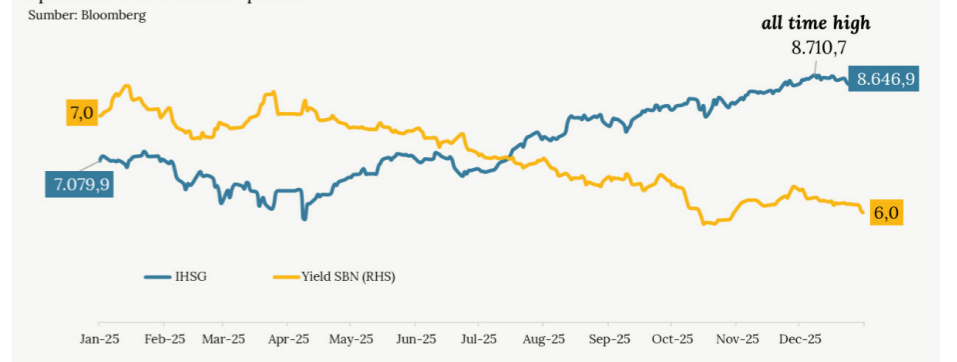
Yield SBN menunjukkan tren penurunan yang konsisten sepanjang 2025, mencerminkan peningkatan kepercayaan investor terhadap prospek ekonomi Indonesia termasuk optimisme di sektor keuangan. Hingga 31 Desember 2025, *yield* SBN tenor 10 tahun berdenominasi Rupiah turun ke level 6,07 persen, lebih rendah dibandingkan posisi per 31 Desember 2024 yang sebesar 7,00 persen. Penurunan ini sejalan dengan perbaikan ekspektasi pasar global dan stabilitas makroekonomi domestik yang terjaga. Selain itu, *spread* antara *yield* UST dan SBN tenor 10 tahun menyempit menjadi 93 bps yang menandakan bahwa risiko nilai tukar (*currency risk*) Indonesia tetap terkendali di tengah dinamika ekonomi global. Kinerja positif ini memperkuat posisi SBN sebagai *safe haven asset* di kawasan, sekaligus menegaskan kepercayaan investor terhadap kebijakan Pemerintah Indonesia yang kredibel.

Sepanjang 2025, arus modal asing menunjukkan dinamika yang cukup fluktuatif dengan *net capital outflow* Rp125,44 triliun, berasal dari aliran keluar di pasar SBN Rp17,34 triliun meskipun terjadi *inflow* di Desember sebesar Rp6,49 triliun, serta aliran keluar di Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) sebesar Rp110,11 triliun, namun sebagian tertahan oleh aliran modal asing masuk di pasar saham sebesar Rp2,01 triliun.

Kepercayaan Investor di Pasar Keuangan Domestik Terus Membaik

Gencatan perang dagang AS-Tiongkok dan pemangkasan suku bunga The Fed lebih agresif mendorong optimisme dan sentimen positif.

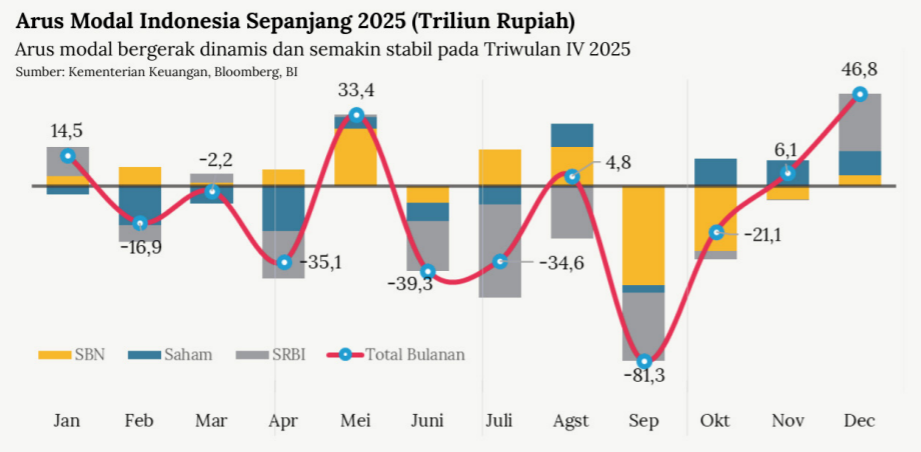
Sumber: Bloomberg



Pada Triwulan IV, arus modal masuk di pasar saham tercatat Rp37,4 triliun dan di pasar SRBI sebesar Rp23,8 triliun, sementara di pasar SBN terdapat arus modal keluar sebesar Rp29,4 triliun. Secara triwulanan, terjadi *capital inflow* Rp31,8 triliun, menandakan kepercayaan investor asing terhadap fundamental ekonomi Indonesia kembali pulih. Kredibilitas kebijakan ekonomi domestik yang diiringi oleh perbaikan sentimen global dan ekspektasi penurunan suku bunga the Fed menjadi faktor utama masuknya aliran modal asing di triwulan terakhir 2025.

Nilai tukar Rupiah cenderung mengalami tekanan, namun masih stabil di tengah dinamika ekonomi global yang penuh dengan tantangan. Nilai tukar Rupiah sempat diwarnai pelemahan cukup dalam pada periode April 2025 ketika AS mengumumkan tarif resiprokal. Namun, perlahan menguat secara bertahap seiring dengan perbaikan kepercayaan pasar terhadap ekonomi domestik. Pada Triwulan IV 2025, nilai tukar Rupiah bergerak dengan kecenderungan melemah di tengah peningkatan kembali tekanan global dan arus modal asing keluar di Oktober 2025.

Sementara itu, volatilitas dan tekanan terhadap nilai tukar yang tercermin dari nilai *spread spot-forward* menunjukkan ekspektasi pasar yang masih terkelola tanpa tekanan spekulatif berlebihan.



Secara keseluruhan, pelemahan Rupiah pada Triwulan IV 2025 lebih merefleksikan normalisasi di tengah tekanan global, dengan risiko yang tetap terkendali. Secara *year-to-date*, hingga 31 Desember 2025 nilai tukar Rupiah terdepresiasi 4,22 persen dan ditutup di level Rp16.782.

Namun demikian, *capital flow* di pasar modal tetap menunjukkan pola yang terkendali, menandakan kepercayaan investor asing terhadap fundamental ekonomi Indonesia yang masih terjaga. Kredibilitas kebijakan ekonomi domestik yang diiringi oleh perbaikan sentimen global dan ekspektasi penurunan suku bunga the Fed menjadi faktor utama menahan tekanan arus keluar dan menjaga stabilitas pasar keuangan nasional.

Kinerja sektor perbankan hingga November 2025 menunjukkan fundamental yang tetap solid

dengan pertumbuhan yang positif dan mampu menjaga fungsi intermediasi. Pertumbuhan kredit melaju positif, meskipun tren pertumbuhannya sempat melambat dari 9,2 persen pada akhir Triwulan I ke 7,8 persen pada akhir Triwulan II dan 7,7 persen pada akhir Triwulan III, menjadi 7,74 persen (*yoy*) pada November 2025. Di sisi lain, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh kuat 12,03 persen (*yoy*), menandakan kepercayaan masyarakat terhadap perbankan tetap tinggi.

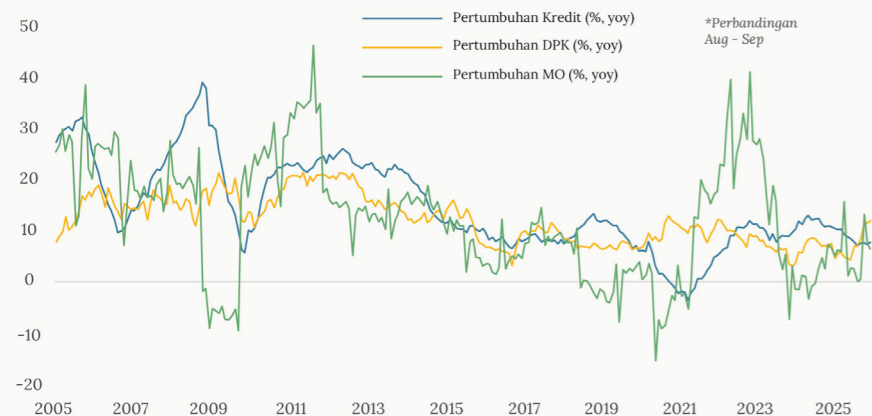
Likuiditas yang tercermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) melanjutkan tren pelonggaran setelah penyaluran likuiditas pemerintah Rp200 triliun pada September dan Rp76 triliun pada November ke sektor perbankan. Pada November 2025, LDR berada pada level 83,99 persen setelah berada pada posisi 84,19 persen di September dan 84,26 persen di Oktober. Capaian ini tidak seketat pada Juli yang tercatat 86,54 persen dan Agustus 86,05 persen. Lebih lanjut, kualitas aset tetap terjaga dengan rasio kredit bermasalah (NPL *gross*) stabil di level 2,21 persen. Ini menunjukkan risiko kredit masih terkendali. Secara keseluruhan, perkembangan indikator perbankan menandakan perbankan nasional berkinerja solid dalam mendorong pertumbuhan ekonomi domestik di tengah dinamika ekonomi global.

Injeksi likuiditas oleh pemerintah di Perbankan juga berhasil menurunkan suku bunga, terutama pada kredit modal kerja dan kredit investasi guna mendukung aktivitas

Perkembangan Likuiditas 2005 s.d 2025

Penempatan dana Pemerintah di perbankan berkontribusi terhadap peningkatan likuiditas dan penurunan suku bunga kredit

Sumber: Bank Indonesia, Bloomberg (diolah)



perekonomian. Di sisi intermediasi, kinerja perbankan cukup solid, meskipun penyaluran kredit masih tertahan. Hal ini tercermin dari nominal *undisbursed loan* yang masih tinggi. Posisi *undisbursed loan* sepanjang 2025 mencapai titik tertinggi pada November sebesar Rp2.509,40 triliun atau setara dengan 23,18 persen dari plafon yang tersedia. Penyaluran kredit yang belum optimal dipengaruhi oleh perilaku *wait and see* pelaku usaha dan pembiayaan internal oleh korporasi. Posisi *undisbursed loan* menunjukkan masih terdapat ruang ekspansi yang lebar dalam penyaluran kredit perbankan.

Secara sektoral, penyaluran kredit sepanjang 2025 masih ditopang oleh sektor manufaktur serta retail dan perdagangan besar. Kredit sektor manufaktur berkontribusi paling besar terhadap total kredit nasional, yaitu 21,4 persen, dengan pertumbuhan 8,29 persen (*yoy*), menandakan ekspansi aktivitas industri yang tetap solid. Sementara itu, sektor konstruksi dan sektor pertanian mencatat pertumbuhan yang juga positif masing-masing 9,13 persen (*yoy*) dan 8,08 persen (*yoy*). Di sisi lain, sektor retail dan perdagangan besar serta sektor keuangan dan asuransi tumbuh lebih moderat 2,74 persen (*yoy*) dan 2,69 persen (*yoy*), mencerminkan normalisasi konsumsi domestik.

Di sektor Industri Keuangan NonBank (IKNB), pada November 2025 kinerja industri asuransi tetap risilensi dengan struktur permodalan yang kuat. Rasio kecukupan modal (RBC) tercatat tinggi, yaitu 342,88 persen untuk asuransi umum dan 488,69 persen untuk asuransi jiwa, atau jauh di atas ambang batas minimum yang ditetapkan *regulator*, yaitu 120 persen. Hal ini mencerminkan perbaikan tata kelola risiko, dan peningkatan kinerja asuransi secara umum. Ke depan, untuk menjaga cakupan penyediaan pendanaan jangka panjang kinerja IKNB perlu terus ditingkatkan untuk mendorong pendalaman sektor keuangan.

Perkembangan Kredit Perbankan 2025

Pertumbuhan *undisbursed loan* yang sempat meningkat di paruh kedua tahun 2025, kembali membaik di bulan Desember. *Undisbursed loan* perlu terus dioptimalkan untuk penyaluran kredit ke depan.

Sumber: Bank Indonesia

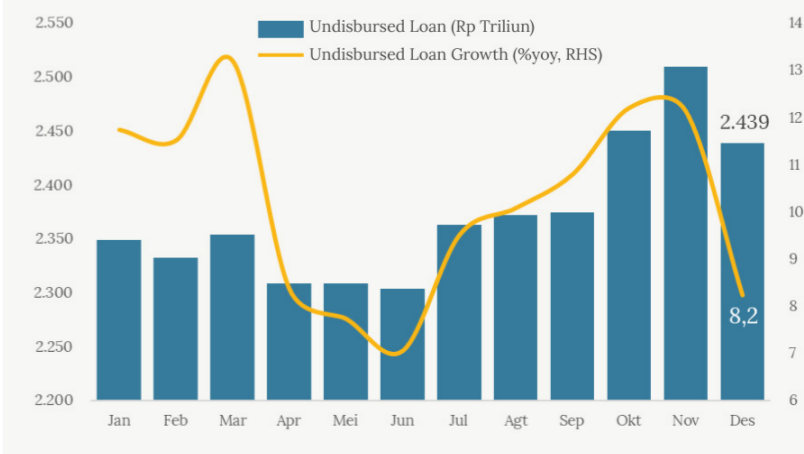


Foto: pexels

APRIL 2025



Foto: Kementerian Keuangan

Menkeu Indonesia dan AS Bertemu, Bahas Arah Kebijakan AS

Di sela-sela agenda Spring Meeting World Bank Group dan IMF, Menkeu juga bertemu Menkeu AS Scott Bessent membahas hubungan Indonesia-AS dan arah kebijakan global AS melalui peranannya di lembaga-lembaga multilateral seperti World Bank dan IMF. Menkeu Sri Mulyani menyampaikan bahwa posisi AS tetap akan menjadi anggota dan sekaligus memimpin lembaga-lembaga internasional, yang juga menjadi ajang bagi pelaksanaan berbagai agenda nasional AS.

12th AFMGM Perkuat Sektor Keuangan

Menkeu Sri Mulyani Indrawati bersama Wamenkeu Thomas Djiwandono menghadiri pertemuan ke-12 Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (12th ASEAN Finance Ministers' and Central Bank Governors' Meeting/AFMGM) pada 10 April 2025 di Malaysia. Pertemuan ini menjadi ajang penting untuk menyampaikan capaian dan komitmen berkelanjutan Indonesia dalam memperkuat integrasi sektor keuangan ASEAN di tengah tantangan global.

Meningkatnya Kewaspadaan Global Dampak Liberation Day (Trump 2.0)

Presiden Trump mengumumkan "Liberation Day" dengan tarif impor dasar 10%, serta tarif khusus hingga 32% untuk Indonesia. Kebijakan ini berpotensi menekan ekspor Indonesia ke AS, menurunkan penerimaan pajak ekspor, dan melemahkan rupiah, sehingga dapat menambah tekanan pada APBN. Berkat negosiasi yang intensif, AS sepakat menurunkan tarif menjadi 19% pada

IMF-World Bank Spring Meetings Diskusikan Isu-Isu Sensitif Global

Menkeu Sri Mulyani Indrawati menghadiri Pertemuan Musim Semi (*Spring Meeting*) yang diselenggarakan World Bank dan IMF pada 21-25 April 2025 di Washington, DC, Amerika Serikat. Pertemuan ini membahas berbagai isu antara lain proyeksi ekonomi dunia, pembangunan ekonomi, pengentasan kemiskinan, perubahan iklim, hingga kebijakan tarif resiprokal AS.



Foto: Kementerian Keuangan

MEI 2025

BPK Putuskan Opini WTP LKPP 2024

Dalam rapat paripurna DPR pada 27 Mei 2025, BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas LKPP 2024. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2024 dalam LKPP 2024 secara material telah disajikan sesuai standar akuntansi pemerintahan, diungkapkan secara memadai sesuai peraturan, dan didasarkan pada efektifitas sistem pengendalian intern.



Foto: Kementerian Keuangan

Postur APBN

Kebijakan Fiskal 2025

Adaptif Menjaga Stabilitas dan Mendukung Agenda Prioritas

Realisasi APBN 2025, mencatatkan Pendapatan Negara mencapai Rp2.756,3 triliun, 91,7 persen APBN. Sementara itu, di sisi belanja negara terealisasi Rp3.451,4 triliun, 95,3 persen APBN. Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Belanja Negara tersebut, APBN tercatat defisit Rp695,1 triliun atau 2,92 persen PDB (defisit APBN pada LKPP Audited 2024 yang tercatat Rp509,2 triliun atau 2,30 persen PDB). Keseimbangan primer tercatat defisit Rp180,7 triliun (defisit keseimbangan primer pada LKPP Audited 2024 Rp20,7 triliun). Di sisi pembiayaan anggaran, terealisasi Rp744,0 triliun.

APBN 2025 menjadi instrumen fiskal Pemerintah dalam merespons dinamika perekonomian dan keuangan global guna melaksanakan kebijakan yang antisipatif dan mendukung berbagai program prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Kebijakan Pemerintah yang ekspansif mendukung tercapainya

defisit APBN yang terkendali pada level 2,92 persen PDB.

Realisasi APBN Triwulan IV 2025

Kinerja pendapatan negara pada 2025 sangat menantang di tengah tekanan moderasi harga komoditas dan gejolak perekonomian global. Namun demikian, pendapatan negara menunjukkan perbaikan yang nyata pada triwulan IV. Penerimaan pajak sektor utama membaik pada triwulan akhir, didorong penguatan sektor keuangan dan pemulihan terbatas sektor lain, meski sepanjang tahun masih tertahan moderasi harga komoditas dan tingginya restitusi. PNBP Triwulan IV meningkat sebagai dampak implementasi PP Nomor 19/2025 serta tren kenaikan Harga Mineral Acuan (HMA).

Pada Triwulan IV pendapatan negara mencapai Rp893,0 triliun atau 29,7 persen APBN, meningkat Rp239,9 triliun dari Triwulan III. Realisasi pendapatan negara tersebut terdiri atas:

1. Penerimaan Pajak yang mencapai Rp622,4 triliun atau 28,4 persen APBN (meningkat Rp164,9 triliun dari realisasi triwulan III);
2. Penerimaan Kepabeanan dan Cukai mencapai Rp79,0 triliun atau 26,2 persen APBN (meningkat Rp5,1 triliun dari realisasi Triwulan III);
3. PNBP mencapai Rp 189,2 triliun atau 36,8 persen APBN (meningkat Rp68,5 triliun dari realisasi triwulan III);
4. Penerimaan Hibah Rp2,5 triliun (meningkat Rp1,4 triliun dari realisasi triwulan III).

Belanja Negara pada Triwulan IV mencatat akselerasi 47,0 persen dari Triwulan III, mencapai Rp1.216,6 triliun (naik Rp388,9 triliun dari Triwulan III), didukung oleh akselerasi Belanja K/L Rp699,4 triliun (naik signifikan dari Triwulan III) dan Belanja nonK/L Rp313,0 triliun (naik 21,6 persen dari Triwulan III). TKD pada Triwulan IV tercatat Rp204,2 triliun, lebih rendah dari Triwulan III (Rp244,3 triliun).

Defisit anggaran pada Triwulan IV menjadi Rp323,6 triliun atau 1,36 persen PDB. Keseimbangan primer pada periode ini juga tercatat defisit Rp198,7 triliun. Pembiayaan anggaran pada Triwulan IV mencapai Rp286,1 triliun, naik 63,9 persen terhadap Triwulan III.

Realisasi APBN 2025

Pendapatan Negara 91,7%
Rp2.756,3 Triliun

Belanja Negara 95,3%
Rp3.451,4 Triliun

Defisit APBN 2,92%
Rp744,0 Triliun

APBN 2025 (triliun rupiah)	APBN	Tw1	Tw2	Tw3	Tw4	Growth (%) q-t-q	Realisasi (Sementara)	%
A. Pendapatan Negara	3.005,1	516,1	694,0	653,1	893,0	36,7	2.756,3	91,7
1. Pajak	2.189,3	322,6	515,2	457,5	622,4	36,0	1.917,6	87,6
2. Kepabeanan dan Cukai	301,6	77,5	70,0	73,8	79,0	7,0	300,3	99,6
3. PNBP	513,6	115,9	108,3	120,7	189,2	56,7	534,1	104,0
4. Penerimaan Hibah	0,6	0,1	0,5	1,1	2,5	120,9	4,3	733,3
B. Belanja Negara	3.621,3	620,3	786,8	827,7	1.216,6	47,0	3.451,4	95,3
1. Belanja Pemerintah Pusat	2.701,4	413,2	593,3	583,4	1.012,4	73,5	2.602,3	96,3
a. Belanja K/L	1.160,1	196,1	278,9	326,0	699,4	114,6	1.500,4	129,3
b. Belanja Non K/L	1.541,4	217,1	314,4	257,5	313,0	21,6	1.102,0	71,5
2. Transfer Ke Daerah	919,9	207,1	193,5	244,3	204,2	(16,4)	849,0	92,3
C. Keseimbangan Primer	(63,3)	17,5	41,6	(41,2)	(198,7)	382,0	(180,7)	285,3
D. Surplus/(Defisit) Anggaran	(616,2)	(104,2)	(92,8)	(174,5)	(323,6)	85,4	(695,1)	112,8
% thd PDB	(2,59)	(0,44)	(0,39)	(0,73)	(1,36)		(2,92)	
E. Pembiayaan Anggaran	616,2	250,0	33,5	174,5	286,1	63,9	744,0	120,8

*Realisasi Sementara, angka final menunggu LKPP (Audited) 2025

JUNI 2025



Foto: Denny Aulia

Stimulus Triwulan II Rp24 Triliun, Pertahankan Daya Beli

Pada 5 Juni 2025, Pemerintah meluncurkan Paket Stimulus Ekonomi Triwulan II senilai Rp24,44 triliun yang mencakup bansos, subsidi motor listrik, diskon listrik, tiket pesawat, tol, dan bantuan subsidi upah. Paket stimulus ini diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat di tengah libur sekolah dan tekanan pasar akibat kebijakan tarif Trump.

Antisipasi Dinamika di 2025, Automatic Adjustment Direlaksasi

Di akhir Juni, relaksasi Automatic Adjustment Rp134,9 triliun dilakukan untuk mendukung belanja K/L APBN 2025, didesain fleksibel untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi sepanjang 2025, seperti penyesuaian struktur pemerintahan, penguatan kebijakan stimulus ekonomi serta pelaksanaan program prioritas.

JULI 2025



Foto: Biro Pers Kepresidenan

KDMP untuk Pemerataan Pembangunan

Pada 21 Juli 2025, Presiden meresmikan 80.081 Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih (KDMP/KKMP) di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Peluncuran ini menandai dimulainya gerakan nasional untuk memperkuat ekonomi rakyat melalui koperasi yang tersebar di seluruh pelosok desa dan kelurahan.

Laporan Semester I Cerminan APBN 2025 yang Adaptif

Dalam Laporan Semester I APBN 2025, outlook defisit diproyeksikan melebihi target awal sebesar 2,53% PDB menjadi 2,78% PDB. Hal ini merupakan bagian kebijakan countercyclical untuk menjalankan program prioritas serta menjaga momentum ekspansi ekonomi di tengah tantangan global.

Pemerataan Pendidikan Berkualitas dengan Sekolah Rakyat

Program Sekolah Rakyat (SR) resmi diluncurkan dengan dimulainya kegiatan belajar-mengajar pada 14 Juli 2025. SR dilaksanakan untuk pendidikan inklusif bagi keluarga miskin dengan target 9.755 siswa di 100 titik rintisan awal di seluruh Indonesia. SR hadir untuk pemerataan pendidikan, penguatan karakter dan keterampilan hidup demi pengembangan sumber daya manusia sesuai cita-cita nasional.



Foto: Sekretariat Negara

Penerimaan Pajak

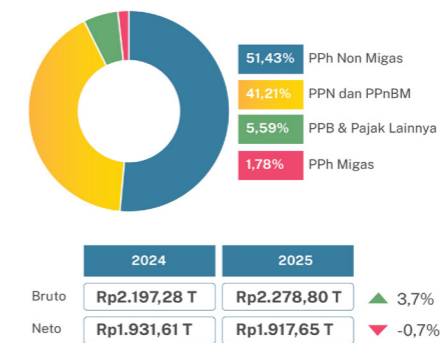
Kinerja Penerimaan 2025

Membaik Secara Bertahap Hadapi Tantangan

Kinerja penerimaan pajak sepanjang 2025 mencerminkan daya tahan yang tangguh di tengah dinamika ekonomi global dan domestik yang penuh tantangan. Secara neto, penerimaan pajak tercatat Rp1.917,65 triliun, kontraksi tipis 0,7 persen (yoy) dibandingkan perolehan 2024 yang mencapai Rp1.931,61 triliun. Sekalipun demikian, indikator kekuatan fundamental justru tampak pada capaian bruto. Penerimaan pajak secara bruto tetap tumbuh solid 3,7 persen (yoy) dengan total nilai Rp2.278,80 triliun, meningkat dari angka Rp2.197,28 triliun pada tahun sebelumnya.

Awal tahun 2025 menjadi periode yang cukup menantang dimana tekanan mendalam terlihat dari penurunan penerimaan pajak pembayaran PPh Pasal 21 pada Januari dan Februari. Fenomena ini diantaranya merupakan dampak langsung dari transisi kebijakan penerapan Tarif Efektif Rata-rata (TER) yang memengaruhi pola penyetoran pajak penghasilan

Kinerja Penerimaan Pajak 2025



karyawan oleh pemberi kerja. Kondisi tersebut diperburuk oleh beberapa faktor eksternal dan kebijakan, seperti moderasi harga komoditas global yang menurunkan profitabilitas perusahaan serta adanya kebijakan relaksasi melalui pemberian restitusi dipercepat. Selain itu, penerbitan regulasi terkait percepatan jangka waktu penyelesaian pemeriksaan juga menjadi katalisator bagi tingginya angka pengembalian pajak yang harus dibayarkan pemerintah pada Triwulan I 2025.

Data statistik pajak menunjukkan penerimaan terkontraksi sangat dalam hingga 41,9 persen (yoy) pada Januari dan 17,2 persen (yoy) pada Februari 2025. Namun, tren ini berbalik arah secara positif memasuki Maret dan April, yang merupakan momentum krusial karena bertepatan dengan batas waktu penyampaian serta pembayaran SPT Tahunan PPh bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Pada Maret dan April, penerimaan pajak tercatat tumbuh masing-masing 3,5 persen (yoy) dan 5,8 persen (yoy). Penerimaan Triwulan I tercatat kontraksi 19,87 persen (yoy) namun berbalik tumbuh 4,87 persen (yoy) pada Triwulan II.

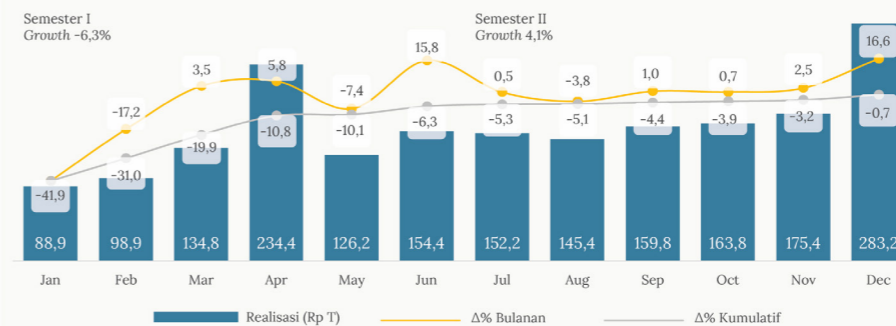
Meskipun fluktuasi kembali terjadi pada Mei dan Agustus, secara keseluruhan tren bulanan sepanjang 2025 menunjukkan pemulihan yang konsisten dibandingkan tahun sebelumnya. Kinerja semester II berhasil berbalik tumbuh 4,1 persen (yoy) dari kondisi semester I yang terkontraksi 6,3 persen (yoy). Hingga akhir tahun, level kontraksi kumulatif terus menyusut, yang mengindikasikan bahwa akselerasi pemungutan pajak berhasil mengejar ketertinggalan yang terjadi di awal tahun dan tercatat tersisa 0,7 persen (yoy).

Apabila ditinjau menurut jenis pajak, penerimaan terbesar ditopang oleh PPN & PPhBM Rp790,2 triliun, yang kemudian diikuti oleh PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 yang tercatat Rp345,7 triliun. Selain itu, PPh Badan menyumbang penerimaan Rp321,4 triliun sedangkan PPh Orang Pribadi dan PPh 21 mencapai Rp248,2 triliun. Sepanjang semester I 2025, terlihat masing-masing jenis pajak tersebut tertekan, namun dapat tumbuh kembali di Semester II.

PPh Orang Pribadi dan PPh 21 berhasil tumbuh 17,5 persen (yoy) yang mencatatkan pertumbuhan paling tinggi, meskipun sempat tertahan di awal tahun, terkontraksi 19,4 persen (yoy). Penguatan ini terutama disebabkan oleh

Kinerja Penerimaan Pajak Bulanan Sepanjang Tahun 2025

Kinerja penerimaan pajak menunjukkan perbaikan yang signifikan pada Semester II (turnaround), setelah tekanan pada Triwulan I.

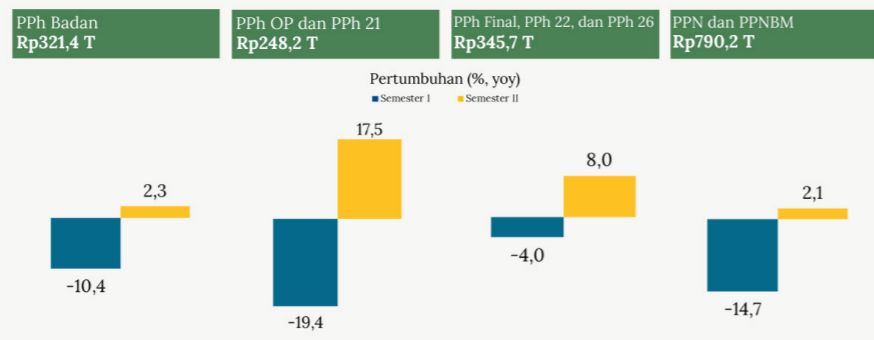


meningkatnya setoran pajak penghasilan dari segmen pekerja bebas dan profesional. Sedangkan PPN dan PPNBM yang berkontraksi 14,7 persen (yoy) pada Semester I kemudian dapat berbalik tumbuh 2,1 persen (yoy) pada Semester II. Pertumbuhan tersebut mengindikasikan meningkatnya level konsumsi rumah tangga dan perdagangan yang juga tercermin dari penguatan Indeks penjualan riil hingga 5,94 pada November 2025.

Selain itu, PPh Badan yang semula turun 10,4 persen (yoy) pada Semester I juga berhasil tumbuh 2,3 persen (yoy) pada Semester II. Begitu juga penerimaan PPh Final, PPh 22, dan PPh 26 yang semula berkontraksi 4,0 persen (yoy) pada Semester I dapat tumbuh 8,0 persen (yoy) pada Semester II. Pertumbuhan tersebut didorong oleh aktivitas dunia usaha dan ekonomi masyarakat yang kembali pulih secara bertahap ke jalur pertumbuhan yang sehat setelah melewati tekanan di awal tahun. Di luar jenis-jenis pajak tersebut,

Realisasi Penerimaan Pajak Neto 2025 Menurut Jenis Pajak

Penerimaan pajak pada Semester II membaik seiring penyesuaian strategi edukasi, pengawasan, pemeriksaan, dan penegakan hukum
Sumber: Kementerian Keuangan



penerimaan pajak juga diperoleh dari PBB & Pajak Lainnya serta PPh Migas yang berkontribusi terhadap seluruh penerimaan pajak masing-masing 5,59 persen dan 1,78 persen.

Ditinjau dari penerimaan pada sektor-sektor utama, tampak bahwa tekanan yang mengakibatkan kontraksi terjadi di semua sektor pada Triwulan I. Kemudian pada Triwulan II, kondisi tersebut cenderung membaik atau bahkan berbalik tumbuh seiring dengan semakin dekatnya tenggat waktu

pembayaran serta pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi di Maret dan SPT Tahunan PPh Badan di April. Tren pertumbuhan kembali melambat di Triwulan III, namun penguatan terjadi lagi di Triwulan IV.

Analisis sektoral turut memberikan gambaran yang lebih spesifik mengenai dinamika lapangan usaha di Indonesia. Penerimaan pada sektor industri pengolahan secara bruto mampu tumbuh terutama di subsektor

industri minyak kelapa sawit karena peningkatan harga CPO dan industri logam dasar bukan besi yang mendapatkan manfaat dari program hilirisasi. Namun, secara neto, kinerja sektor ini tertekan akibat restitusi sektor industri minyak kelapa sawit terutama pada Triwulan I. Secara kumulatif, sektor ini berkontraksi tipis 0,9 persen (yoy, neto), namun secara bruto sebenarnya berhasil tumbuh 4,3 persen (yoy).

Pergerakan penerimaan pajak pada sektor perdagangan secara bruto dipengaruhi Perdagangan Balas Jasa dengan Fee dan Perdagangan Mobil. Namun, restitusi yang meningkat signifikan pada Subsektor Perdagangan Besar BBM berdampak pada tertekannya penerimaan khususnya secara neto. Secara kumulatif, Sektor Perdagangan berkontraksi 1,0 persen (yoy) secara bruto dan 7,7 persen (yoy) secara neto.

Di tengah tekanan yang kuat pada harga komoditas, kondisi menggembarakan tampak pada

sektor keuangan dan asuransi. Meskipun sempat berkontraksi pada Triwulan I, sektor ini langsung berbalik tumbuh signifikan di triwulan-triwulan berikutnya. Performa yang tangguh ini sejalan dengan pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan penyaluran kredit perbankan yang ekspansif. Hingga akhir tahun, sektor keuangan dan asuransi berhasil tumbuh 12,6 persen (yoy) secara bruto dan 11,3 persen (yoy) secara neto.

Penerimaan pada sektor pertambangan sangat dipengaruhi oleh harga komoditas dan energi yang termoderasi seperti batu bara dan migas. Sektor ini mengalami tekanan akibat tren penurunan harga komoditas, sehingga berdampak pada profitabilitas kegiatan usaha serta kecenderungan besarnya Pajak Masukan dibandingkan Pajak Keluaran PPN pada usaha bidang pertambangan. Dengan begitu, peningkatan restitusi juga semakin menekan penerimaan terutama pada Subsektor Pertambangan batu

bara. Penerimaan secara kumulatif hingga akhir tahun tercatat mengalami kontraksi masing-masing 0,6 persen (yoy) secara bruto dan 10,6 persen (yoy) secara neto.

Kinerja penerimaan pajak 2025 semestinya dipandang dalam konteks APBN secara komprehensif. Pemerintah mengambil langkah kebijakan fiskal yang lebih akomodatif dengan tidak memaksakan target penerimaan secara agresif di tengah dinamika perekonomian global dan domestik. Fokus utama dialihkan pada menjaga daya beli masyarakat, keberlanjutan lapangan kerja, dan stabilitas dunia usaha melalui pemberian insentif serta penundaan beberapa kebijakan yang berpotensi membebani aktivitas ekonomi. Dengan penguatan kepatuhan melalui instrumen edukasi, pengawasan, dan pemeriksaan yang terukur, perbaikan kinerja pada semester kedua memberikan fondasi yang kuat bagi keberlanjutan fiskal di

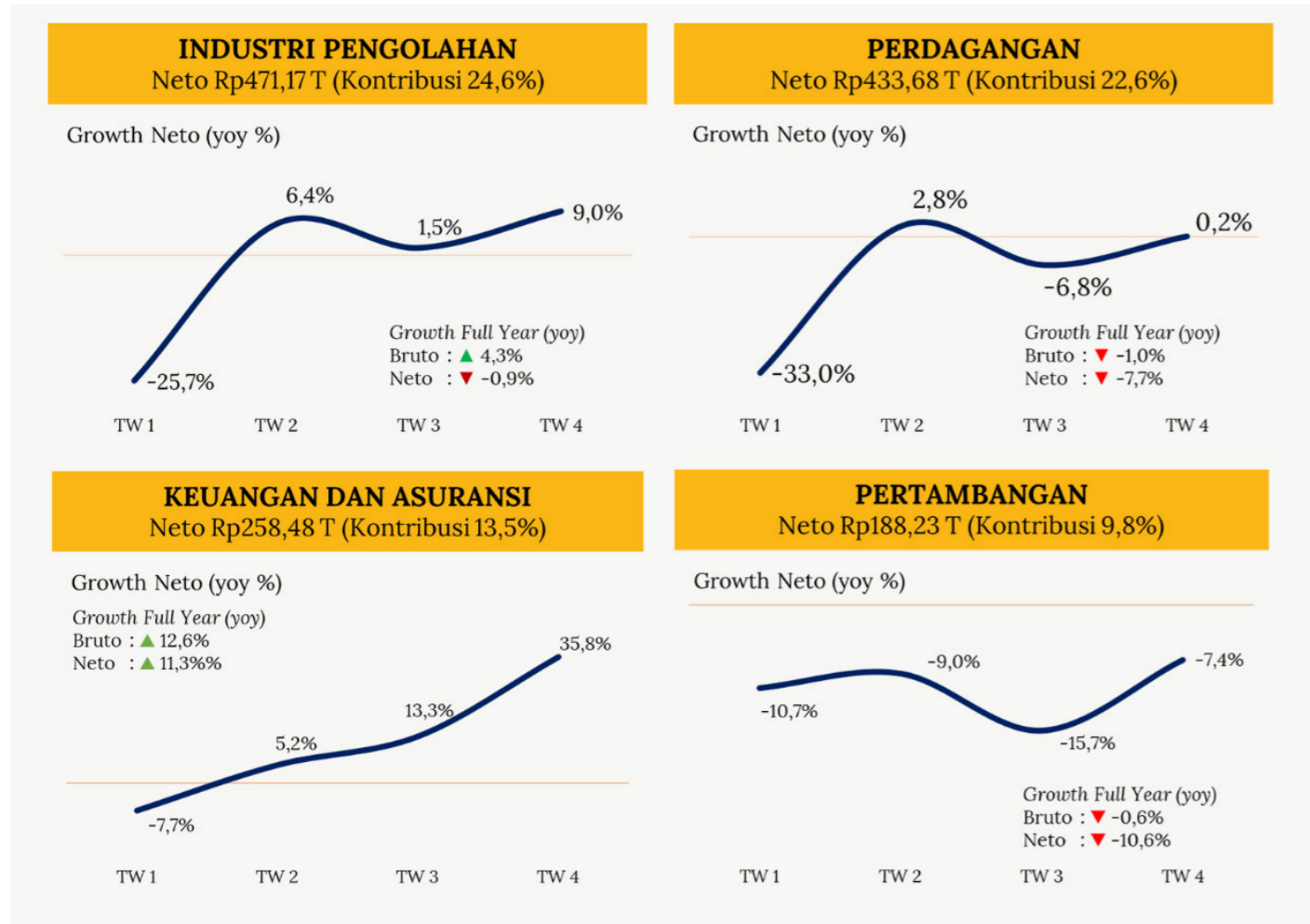


Foto: Kementerian Keuangan

Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai

Kinerja 2025

Tetap Resilien di Tengah Tekanan Perdagangan Global

Hingga 31 Desember 2025, penerimaan Kepabeanaan dan Cukai mencapai Rp300,3 triliun, atau 99,6 persen dari target APBN. Capaian ini tumbuh 0,02 persen (yoy), dipengaruhi oleh bea keluar yang tumbuh signifikan meskipun penerimaan cukai dan bea masuk tercatat turun.

Cukai tetap menjadi kontributor terbesar dengan porsi 73,8 persen dari total penerimaan Kepabeanaan dan Cukai. Namun demikian, kinerjanya berkontraksi seiring penurunan produksi hasil tembakau.

Selain faktor produksi, tidak terdapat kebijakan kenaikan tarif yang turut berpengaruh pada kinerja cukai 2025. Di samping itu, terdapat rencana pengenaan cukai Minuman Berpermanis Dalam Kemasan (MBDK) yang belum diimplementasikan. Kebijakan tersebut ditunda dengan mempertimbangkan kondisi perekonomian dan daya beli masyarakat. Adapun prinsip penerapan kebijakan cukai tidak semata berorientasi pada penerimaan, melainkan juga memperhatikan pengendalian

konsumsi, keberlangsungan industri dan tenaga kerja, serta penguatan pengawasan, misalnya terhadap peredaran rokok ilegal.

Penerimaan Bea Keluar mencatat kinerja paling menonjol dengan realisasi Rp28,4 triliun, tumbuh 36,1 persen (yoy) dan telah mencapai 636,1 persen dari Target. Capaian tersebut didukung oleh peningkatan harga dan volume ekspor CPO. Selain itu, relaksasi kebijakan ekspor konsentrat tembaga pada Maret–September serta November–Desember 2025 turut berkontribusi terhadap tambahan penerimaan.

Sepanjang 2025, rata-rata harga referensi CPO mencapai USD942 per metrik ton, meningkat 10,2 persen (yoy), sementara volume ekspor produk sawit tumbuh 8,3 persen (yoy). Kondisi tersebut menjadi faktor utama yang memperkuat kinerja Bea Keluar di tengah fluktuasi harga komoditas.

Sementara itu, Bea Masuk terealisasi Rp50,2 triliun, berkontraksi 5,3 persen (yoy) atau mencapai 94,8 persen dari target. Kinerja tersebut dipengaruhi oleh perlambatan impor serta

meningkatnya pemanfaatan skema FTA yang berdampak pada penurunan tarif impor. Meski demikian, impor barang modal tetap tumbuh dan menunjukkan tetap terjaganya momentum investasi di dalam negeri.

Selain beberapa faktor tersebut, penurunan kinerja Bea Masuk juga dipengaruhi oleh menguatnya ketahanan pangan sehingga importasi komoditas strategis seperti beras, gula, dan jagung menurun. Di sisi global, meningkatnya tensi geopolitik, menguatnya proteksionisme, serta penerapan kebijakan tarif Trump oleh Amerika Serikat terhadap sejumlah mitra dagang utama turut menekan volume dan aktivitas perdagangan internasional.

Fasilitasi dan Pengawasan untuk Mendukung Daya Saing dan Kepatuhan

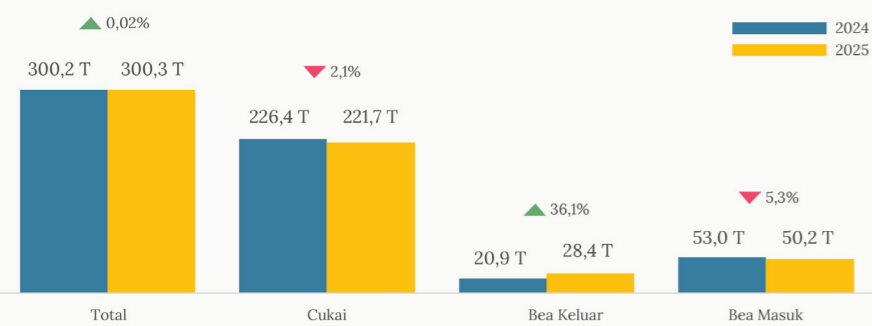
Selain menjaga capaian penerimaan negara, peran Kepabeanaan dan Cukai juga diarahkan pada penguatan pelayanan, optimalisasi fasilitasi perdagangan, serta efektivitas pengawasan. Pendekatan yang seimbang ini berperan penting dalam menopang kinerja ekspor dan impor nasional.

Sepanjang 2025, upaya fasilitasi perdagangan dan industri terus diperkuat untuk mendukung kelancaran arus barang serta peningkatan daya saing nasional. Nilai insentif kepabeanaan yang diberikan untuk mendukung sektor industri mencapai Rp40,4 triliun, tumbuh 10,0 persen (yoy).

Nilai insentif tersebut terutama berasal dari penangguhan Bea Masuk Kawasan Berikat sebesar Rp27,5 triliun, diikuti pembebasan Bea Masuk Pasal 25 dan 26 UU Kepabeanaan sebesar Rp6,8 triliun, serta fasilitas di Kawasan Ekonomi Khusus sebesar Rp3,8 triliun. Selain itu, dukungan bagi industri berorientasi ekspor diberikan melalui pengembalian Bea Masuk skema KITE sebesar Rp336,3 miliar. Sedangkan pembebasan Bea Masuk

Penerimaan Kepabeanaan dan Cukai 2024-2025

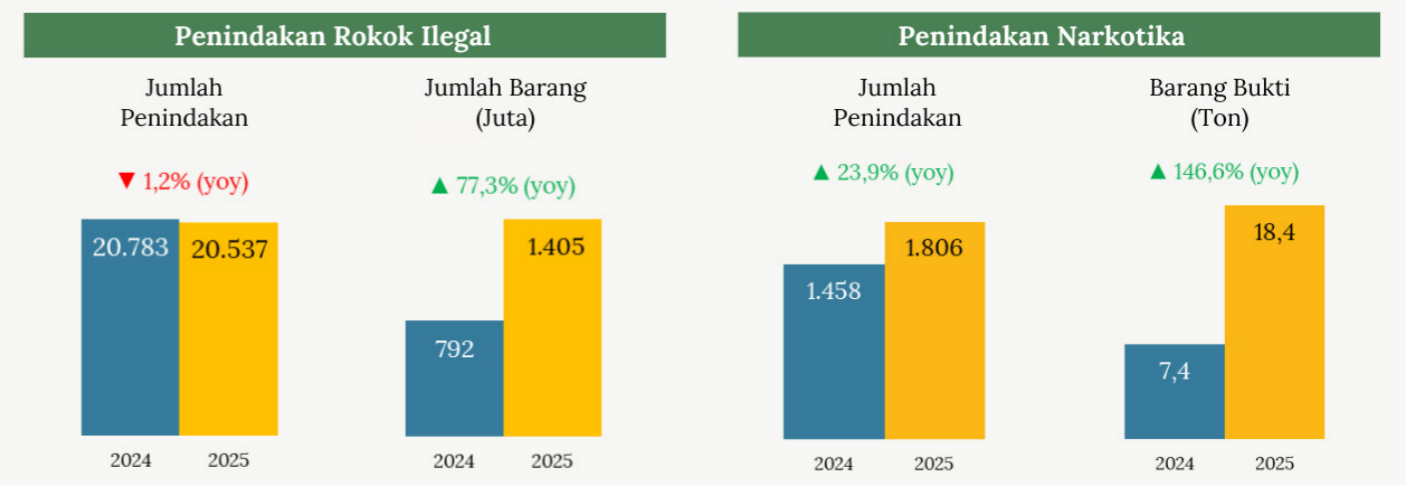
Stabil di tengah volatilitas harga komoditas dan gejolak perdagangan global



Kinerja Kepabeanaan dan Cukai Diperkuat dengan Penindakan Barang Ilegal

Penindakan dilakukan secara konsisten, dengan nilai barang hasil penindakan yang meningkat

Sumber: Kementerian Keuangan



untuk kegiatan usaha hulu minyak, gas bumi, dan panas bumi mencapai Rp271,7 miliar.

Dampak positif fasilitasi tercermin pada peningkatan ekspor, penyerapan tenaga kerja, dan investasi di kawasan berfasilitas. Nilai ekspor tercatat mencapai USD139,8 miliar, tumbuh 21,6 persen (yoy). Penyerapan tenaga kerja mencapai 2,03 juta orang, meningkat 0,5 persen (yoy). Sejalan dengan itu, total investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) mencapai Rp314,0 triliun, tumbuh signifikan 19,2 persen (yoy).

Selain itu, jumlah UMKM binaan meningkat menjadi 1.616 usaha, tumbuh 18,5 persen (yoy). Dari jumlah tersebut, 745 UMKM telah berhasil melakukan ekspor. Capaian ini menunjukkan semakin efektifnya pemanfaatan fasilitas kepabeanaan dan pendampingan usaha. Perkembangan tersebut turut mendorong UMKM naik kelas, memperluas akses ke pasar global, serta memperkuat kontribusi UMKM terhadap ekspor nonmigas dan ketahanan ekonomi nasional.

Efektivitas fasilitasi juga tercermin pada perbaikan kinerja logistik. Dwelling time menurun dari 3,52 hari menjadi 3,02 hari. Sementara itu customs clearance impor membaik 0,49 hari pada 2024 menjadi 0,42 hari pada 2025, menunjukkan peningkatan efisiensi layanan dan kelancaran arus barang

Di sisi lain, pengawasan dan penindakan tetap diperkuat guna menjaga kepatuhan dan melindungi penerimaan negara. Sepanjang 2025, kegiatan penindakan dilaksanakan sebanyak 36.453 kali, dengan nilai barang hasil penindakan (BHP) mencapai Rp9,9 triliun, meningkat 2,2 persen (yoy). Penindakan didominasi oleh sektor cukai sebanyak 21.470 kasus, sementara nilai BHP terbesar berasal dari sektor impor Rp7,1 triliun. Jumlah penyidikan tercatat 266 kasus, tumbuh 4,3 persen (yoy), dengan penerimaan dari ultimatum

remedium mencapai Rp211 miliar, melonjak 168,5 persen (yoy).

Penindakan terhadap rokok ilegal dilaksanakan sebanyak 20.537 kali, relatif stabil dibandingkan tahun lalu, namun jumlah barang bukti yang diamankan meningkat signifikan menjadi 1,4 miliar batang, tumbuh 77,3 persen (yoy). Sementara itu, penindakan narkotika tercatat sebanyak 1.806 kasus, meningkat 23,9 persen (yoy), dengan barang bukti mencapai 18,4 ton, melonjak tajam 146,6 persen (yoy).

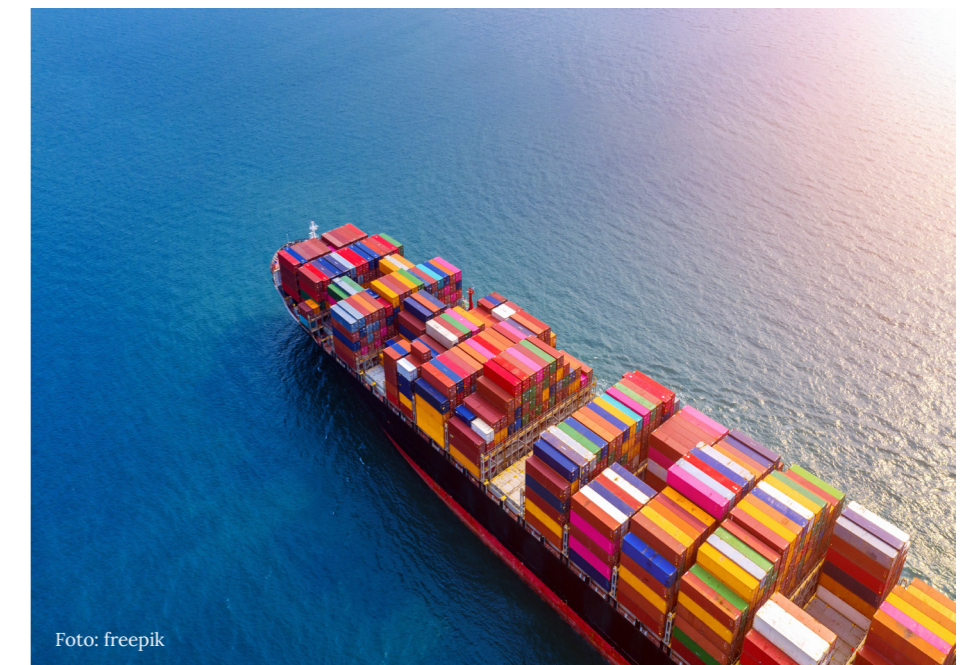


Foto: freepik

AGUSTUS 2025



APBN Akan Terus Melindungi Rakyat

Pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025-2026, 15 Agustus 2025, Presiden menyampaikan RUU APBN 2026 beserta Nota Keuangan. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan Indonesia harus merdeka dari kemiskinan dan kelaparan, serta mampu memenuhi kebutuhan pangan sendiri agar terbebas dari kelaparan. APBN akan terus dimanfaatkan demi melindungi rakyat.

Kangaroo Bonds Perkokoh Ketahanan Pembiayaan APBN

Pemerintah Indonesia pertama kalinya berhasil menerbitkan Surat Utang Negara (SUN) dalam mata uang Australian Dollar (AUD) atau dikenal dengan Kangaroo Bond. Transaksi perdana ini dilakukan melalui program Australian Medium-Term Notes (AMTN) dengan yield untuk tenor 5 tahun adalah 4,427%, sementara untuk

tenor 10 tahun sebesar 5,380%. Penerbitan ini menjadi tonggak penting dalam mendukung diversifikasi instrumen pembiayaan dan perluasan basis investor, serta mendukung ketahanan pembiayaan APBN di tengah dinamika pasar global

Ekonomi Indonesia Triwulan II Tumbuh Kuat

Berdasarkan data BPS yang disampaikan per Agustus 2025, ekonomi Indonesia Triwulan II 2025 tumbuh 5,12% (yoy). Angka ini menunjukkan peningkatan dibandingkan pertumbuhan Triwulan I sebesar 4,87% dan lebih tinggi dari capaian Triwulan II 2024 (5,05%). Peningkatan ini melampaui konsensus pasar dan prediksi lembaga internasional, didorong oleh kuatnya kemampuan daya beli, investasi, dan ekspor.



Foto: Fajar Patriawan

Penerimaan Negara Bukan Pajak

Capaian 2025

Melebihi Target di Tengah Moderasi Harga Komoditas

Selama 2025, harga minyak mentah dunia dan batubara mengalami stabilisasi pada level yang lebih rendah dibandingkan periode sebelumnya. Demikian pula penurunan *lifting* minyak bumi dan volume produksi batubara turut memengaruhi kinerja PNBPN 2025. Dengan diberlakukannya UU Nomor 1/2025 jo UU Nomor 16/2025 (tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 19/2003 tentang BUMN) juga ikut menekan capaian PNBPN KND 2025. Namun, berbagai tantangan tersebut dapat dilalui bahkan realisasi PNBPN melampaui APBN.

Realisasi sementara PNBPN sampai akhir 2025 mencapai Rp534,1 triliun (103,98 persen APBN). Secara perbandingan dengan PDB, kontribusi PNBPN mencapai 2,24 persen, sedikit lebih tinggi dari APBN awal dalam APBN 2025 yang sebesar 2,15 persen. Peningkatan kinerja PNBPN tersebut didorong perbaikan tata kelola PNBPN SDA Minerba dan BLU melalui implementasi PP Nomor 19/2025 (tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN pada Kementerian ESDM) dan PMK Nomor 30/2025 (tentang Tarif Layanan BLU Pengelola Dana Perkebunan pada Kementerian Keuangan).

Mendorong Kinerja PNBPN SDA

Realisasi PNBPN Migas mencapai Rp105,0 triliun, terkontraksi 9,0 persen (yoy) atau mencapai 83,7 persen APBN. Pelambatan ini disebabkan tren pelemahan ICP sepanjang tahun, meskipun terdapat kenaikan *lifting* minyak dan gas bumi, serta pelemahan

nilai tukar. ICP rata-rata selama Januari sampai dengan Desember 2025 tercatat USD67,38/barel jauh di bawah asumsi APBN USD82,00/barel. Beberapa faktor yang memengaruhi penurunan harga minyak mentah utama di pasar internasional antara lain peningkatan pasokan minyak dunia dan penumpukan stok pada Semester II 2025. Faktor struktural dalam negeri juga turut mempengaruhi *lifting* minyak seperti penurunan alami produksi lapangan tua, keterlambatan proyek pengembangan baru, dan tantangan dalam menarik investasi di tengah transisi energi.

Namun, Pemerintah tetap berupaya mendorong peningkatan *lifting* migas, antara lain melalui peningkatan produksi dari blok Cepu sebesar 30 ribu barel/hari, optimalisasi sumur-sumur baru migas seperti Lapangan Forel dan Terubuk, serta mendorong kerja sama pengelolaan sumur masyarakat dengan BUMD/Koperasi/UMKM (Peraturan Menteri ESDM Nomor 14/2025).

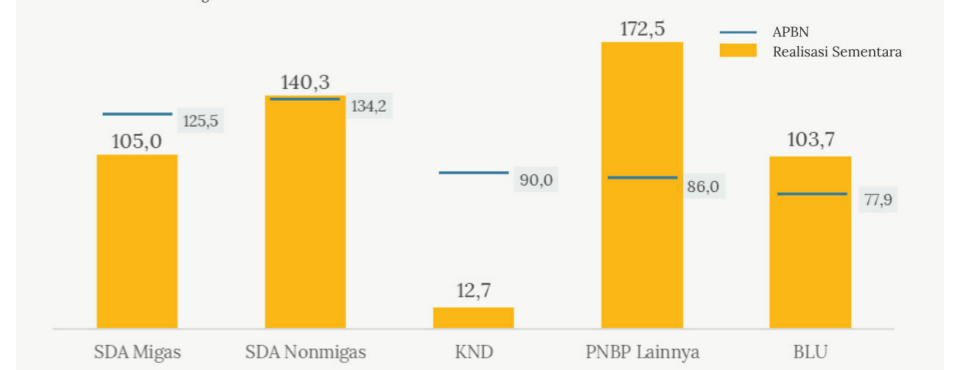
Di samping itu, juga mendorong efektivitas implementasi kebijakan HGBT (Harga Gas Bumi Tertentu) dan perbaikan tata kelola (antara lain digitalisasi proses bisnis industri hulu migas).

Sementara itu, PNBPN SDA Nonmigas terealisasi Rp140,3 triliun, terkontraksi 5,4 persen (yoy) atau mencapai 104,5 persen APBN. Capaian ini merupakan prestasi di tengah penurunan HBA 8,9 persen (yoy) dan berkurangnya volume produksi batubara dalam negeri 7,0 persen (yoy). Pada Triwulan I hingga III terjadi pelambatan disebabkan moderasi HBA dan penurunan volume produksi batubara dalam negeri. Sedangkan Triwulan IV mengalami peningkatan dampak implementasi PP Nomor 19/2025 dan tren peningkatan Harga Mineral Acuan (HMA).

Perbaikan tata kelola PNBPN SDA Minerba dengan terbitnya PP Nomor 19/2025 (tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN pada Kementerian ESDM) mendorong peningkatan capaian SDA Nonmigas. PP tersebut mengatur penyesuaian tarif royalti komoditas mineral secara progresif antara lain royalti logam timah murni, emas, nikel, dan tembaga. Pasca pemberlakuan PP tersebut, realisasi bulanan PNBPN dari royalti minerba meningkat dari rata-rata Rp7,4 triliun per bulan menjadi Rp9,6 triliun per bulan. Kenaikan tersebut juga didukung kenaikan Harga Mineral Acuan (emas,

Realisasi PNBPN 2025 Melampaui Target (Triliun Rupiah)

Di tengah Moderasi Harga Komoditas dan Penurunan Volume Produksi
Sumber: Kementerian Keuangan



tembaga, perak, mangan, seng, dan aluminium) di pasaran.

PNBP SDA Kelautan dan Perikanan mencapai Rp1,0 triliun atau 63,1 persen APBN. Realisasi ini seluruhnya disumbang dari sektor Perikanan, sedangkan dari sektor Kelautan belum menyumbang realisasi PNBP. Sektor Perikanan mencapai 85,5 persen APBN atau tumbuh 7,8 persen (yoy) dampak perbaikan tata kelola sektor perikanan tangkap, migrasi kapal perikanan dari izin daerah ke izin pusat, serta peningkatan jumlah produksi perikanan tangkap. Adapun sektor Kelautan hingga Desember 2025 belum menyumbang pendapatan disebabkan belum terdapat izin pemanfaatan pasir laut hasil sedimentasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.

PNBP SDA Kehutanan terealisasi Rp6,6 triliun, terkontraksi 1,8 persen (yoy) atau 116,7 persen APBN. Capaian ini terutama didorong dari pendapatan Penggunaan Kawasan Hutan (PKH) yang mencapai 170,5 persen APBN.

Realisasi PNBP SDA Panas Bumi mencapai Rp2,5 triliun atau 112,1 persen APBN. Capaian ini terutama didorong dari peningkatan Setoran Bagian Pemerintah (SBP) dampak

peningkatan produksi akibat beroperasinya COD Salak Binary serta kegiatan retrofit PLTP *Star Energy Darajat Geothermal II* (SEDG II) dan *Star Energy Geothermal Wayang Windu Limited* (SEGWL).

Pengalihan Setoran Dividen BUMN ke BPI Danantara

Target Pendapatan KND dalam APBN 2025 ditetapkan Rp90,0 triliun. Dengan disahkannya UU Nomor 1/2025, dividen BUMN tidak lagi disetor ke Pemerintah, tetapi dialihkan ke Badan Pengelola Investasi Danantara. Pada tahun 2024, realisasi Pendapatan KND mencapai Rp86,4 triliun.

Realisasi Pendapatan KND mencapai Rp12,7 triliun, terkontraksi 85,3 persen (yoy) atau 14,1 persen APBN. Selain setoran dividen interim BUMN TB 2024, terdapat setoran dari dividen *Special Mission Vehicle* (SMV), perum, dan Danantara Asset Management.

Kinerja PNBP K/L Meningkat Signifikan

Kinerja PNBP K/L 2025 mencatatkan performa yang signifikan di tengah normalisasi harga komoditas dan penurunan

volume produksi batubara sehingga menjadi penyeimbang (*buffer*) saat PNBP SDA mengalami moderasi. PNBP K/L teralisasi Rp172,5 triliun, tumbuh 35,9 persen (yoy) atau 200,5 persen APBN. Capaian ini merupakan realisasi tertinggi dibanding jenis PNBP lainnya. Kenaikan signifikan ini didorong antara lain oleh penegakan hukum, optimalisasi layanan, dan pemanfaatan aset. Kontributor utama PNBP K/L diantaranya dari Kemenkomdigi, Kejaksaan, Kemenhub, Kementerian Imipias, POLRI, dan Kementerian ESDM.

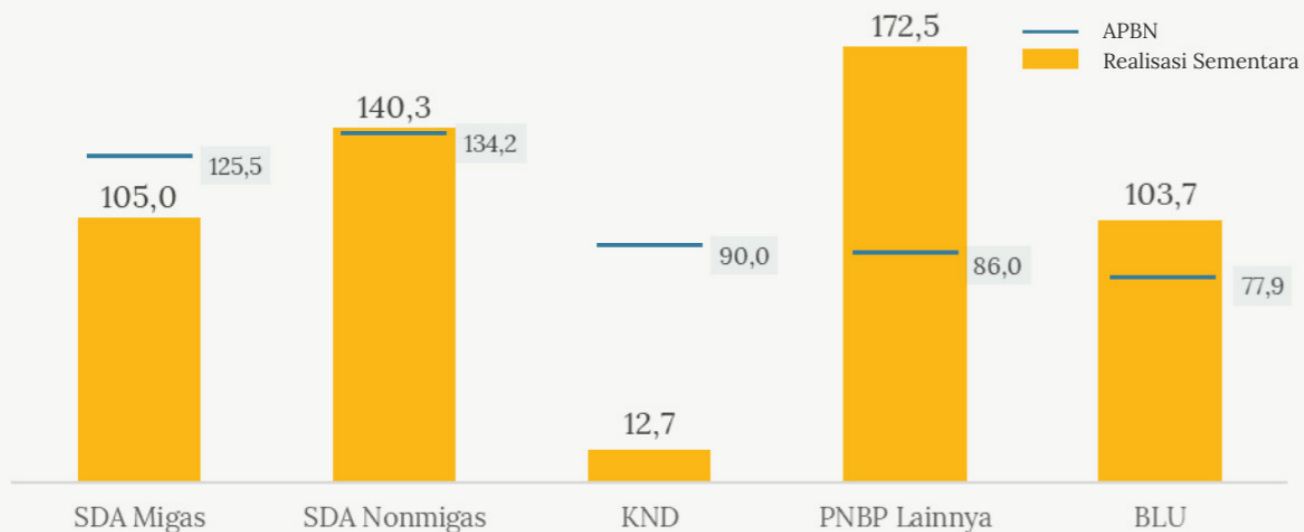
PNBP Kejaksaan mencapai 755,9 persen APBN terutama dari setoran Uang Pengganti (UP) yang telah inkraht. Kasus terbesar pada 2025 adalah vonis kasasi Mahkamah Agung (MA) yang menghukum korporasi besar untuk membayar Uang Pengganti kerugian negara terkait kasus korupsi ekspor CPO dan turunannya sebesar Rp17,8 triliun.

Sementara itu realisasi PNBP Kemenhut mencapai 216,6 persen APBN. Capaian ini sebagian besar berasal dari denda administrasi dan dari wisata alam dampak terbitnya Peraturan Presiden Nomor 5/2025 (tentang Penertiban Kawasan Hutan) yang mendorong peningkatan PNBP dari denda administrasi.

Realisasi PNBP 2025 Melampaui Target (Triliun Rupiah)

Di tengah Moderasi Harga Komoditas dan Penurunan Volume Produksi

Sumber: Kementerian Keuangan



Selanjutnya, PNBP Kementerian Imipias mencapai 160,5 persen APBN. Capaian ini mayoritas disumbang dari pendapatan visa, paspor, dan izin keimigrasian dampak pemberlakuan jenis dan tarif baru sesuai PP Nomor 45/2024. Di samping itu, terdapat *extra effort* yang dilakukan Kementerian Imipias untuk meningkatkan PNBP melalui digitalisasi layanan (antara lain pembayaran dari luar negeri), penyediaan *immigration lounge* di beberapa daerah, dan inovasi layanan di satker (antara lain *eazy passport*, *passport drive thru*, penyediaan loket layanan bagi lansia, ibu hamil dan anak-anak, serta pelayanan paspor simpatik/sabtu-minggu).

PNBP BLU Melejit Dampak Penerbitan PMK 30/2025

PNBP BLU teralisasi Rp103,7, terkontraksi 1,0 persen (yoy) atau 133,0 persen APBN. Realisasi ini disumbang dari BLU Sawit Rp31,4 triliun (236,4 persen APBN) dan BLU Nonsawit Rp72,3 triliun (111,8 persen APBN).

Peningkatan capaian PNBP BLU Sawit tersebut dampak implementasi PMK Nomor 30/2025 tentang Tarif Layanan BLU Pengelola Dana Perkebunan pada Kemenkeu. PMK ini mengatur kenaikan tarif Pungutan Ekspor Sawit dari 7,5 persen menjadi 10 persen. Di samping itu, faktor kenaikan volume pungutan dan perluasan basis pungutan ke

komoditas pungutan ke komoditas kakao turut mendorong capaian.

Sementara itu, peningkatan PNBP BLU Nonsawit mayoritas disumbang BLU rumpun Pendidikan melalui pendapatan Pengelolaan Dana Pengembangan Pendidikan Nasional (mencapai Rp11,4 triliun). Di samping itu, pembukaan prodi baru turut mendorong pendapatan Jasa Layanan Pendidikan (mencapai Rp15,4 triliun). Selanjutnya, kontribusi signifikan juga disumbang BLU rumpun kesehatan terutama dari RS rujukan nasional di lingkungan Kemenkes (akibat bertambahnya kapasitas dan volume layanan sebagai dampak kenaikan belanja modal pada tahun sebelumnya).



Foto: Ardyanto_Patandung

SEPTEMBER 2025



Pak Purbaya Dilantik Menjadi Menteri Keuangan

Presiden RI resmi melantik empat jabatan menteri dan satu wakil menteri Kabinet Merah Putih pada 8 September 2025 di Istana Negara. Bapak Purbaya Yudhi Sadewa yang sebelumnya menjabat Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dilantik sebagai Menteri Keuangan menggantikan Ibu Sri Mulyani Indrawati.

Foto: Biro Pers Kepresidenan

Dukung Pertumbuhan, Stimulus Berlanjut ke Triwulan III Rp15,6 Triliun

Pemerintah menggulirkan paket stimulus ekonomi Rp15,66 triliun untuk mendorong daya beli dan mobilitas serta sektor padat karya. Beberapa alokasi stimulus ditujukan dalam bentuk diskon transportasi selama libur sekolah, potongan tarif tol untuk sekitar 110 pengendara, penebalan bansos dengan kartu sembako dan bantuan pangan untuk 18,3 juta keluarga. Pemerintah juga memberikan bantuan subsidi upah bagi pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta dan diskon JKK 50 persen bagi pekerja di sektor padat karya.



Foto: Kementerian Keuangan

Penempatan Dana Rp200 Triliun Pompa Likuiditas

Pada September 2025, Pemerintah menempatkan dana Rp200 triliun ke Bank Himbara (BRI, Mandiri, BNI, BTN) dan BSI. Penempatan ini ditujukan untuk meningkatkan likuiditas perbankan dan menggerakkan sektor riil dengan tetap memastikan kas negara cukup memadai.

Pengesahan UU APBN 2026, Menjaga Kesenjangan Pembangunan

Pada 23 September 2025, Paripurna DPR RI mengesahkan RUU APBN 2026 menjadi Undang-Undang No. 17 Tahun 2025. APBN 2026 menjadi penegas visi Pemerintah dalam mewujudkan kedaulatan pangan, energi, serta membangun ekonomi Indonesia yang tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemerintah berkomitmen agar instrumen fiskal ini tidak hanya menjaga kesinambungan pembangunan, tetapi juga mampu menjawab tantangan dinamika global dan aspirasi masyarakat.

Belanja Pemerintah Pusat

Belanja 2025

Responsif dan Antisipatif Mendukung Program Prioritas

Komponen terbesar dari Belanja Negara adalah Belanja Pemerintah Pusat (BPP) yang pada APBN 2025 ditetapkan pagunya Rp2.701,4 triliun. Pada awal 2025 diterbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1/2025 mengenai kebijakan efisiensi belanja dalam pelaksanaan APBN dan APBD sebesar Rp306,7 triliun yang terdiri atas anggaran belanja K/L Rp256,1 triliun dan TKD Rp50,6 triliun. Efisiensi atas anggaran belanja negara 2025 tersebut tidak menyentuh belanja pegawai, operasional dasar K/L serta belanja bantuan sosial. BPP tersebut dianggarkan untuk menjalankan peran pemerintah sebagai: (i) *Development Agent* melalui dukungan terhadap berbagai Program Prioritas Pemerintah yang dijalankan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat; (ii) *Shock Absorber* untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika perekonomian melalui berbagai program stimulus serta untuk penanggulangan bencana dan (iii) *Fiscal Sustainability Policy Maker*. APBN 2025 didesain fleksibel

untuk mengantisipasi dinamika yang terjadi sepanjang 2025. Hal ini terlihat dengan dilakukannya relaksasi atas efisiensi anggaran 2025 berupa pembukaan blokir efisiensi Rp206,4 triliun. Pembukaan ini ditujukan untuk mengakomodir dinamika yang terjadi, seperti penyesuaian struktur pemerintahan, kebijakan stimulus ekonomi dan mendukung berbagai program unggulan presiden, serta penanggulangan bencana alam yang terjadi pada akhir 2025.

Realisasi BPP hingga akhir Triwulan IV 2025 mencapai Rp2.602,3 triliun (96,30 persen APBN). Realisasi BPP tersebut terdiri atas realisasi Belanja K/L dan Belanja NonK/L. Realisasi Belanja K/L mencapai Rp1.500,4 triliun (129,30 persen APBN) atau tumbuh 13,3 persen (yoy). Belanja K/L tersebut dimanfaatkan antara lain untuk penyaluran berbagai program Bansos (PBI JKN, kartu sembako BLTS Kesra, PKH, PIP, dan KIP Kuliah); dukungan pelaksanaan MBG dan berbagai bantuan pemerintah; serta pengadaan infrastruktur (tanah, peralatan dan mesin, pembangunan/perbaikan jalan, irigasi dan jaringan, gedung

dan bangunan).

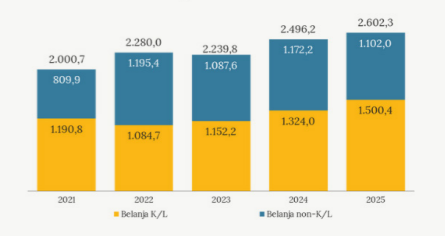
Selanjutnya, Realisasi Belanja NonK/L mencapai Rp1.101,96 triliun (71,50 persen APBN) atau terkontraksi 5,99 persen (yoy). Belanja NonK/L tersebut dimanfaatkan antara lain untuk pembayaran manfaat pensiun dan subsidi tepat waktu.

Belanja K/L

Belanja K/L terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Modal dan Belanja Bantuan Sosial (Bansos). Realisasi Belanja Pegawai K/L mencapai Rp321,3 triliun atau tumbuh 10,12 persen (yoy). Realisasi Belanja Pegawai tersebut terdiri atas komponen gaji dan tunjangan Rp211,0 triliun serta komponen tunjangan kinerja Rp110,3 triliun. Peningkatan realisasi 2025 antara lain dipengaruhi oleh pembayaran tunjangan pendidik dan pengangkatan CASN baru sebanyak 355,4 ribu orang.

Realisasi Belanja Barang K/L mencapai Rp564,9 triliun atau tumbuh 8,27 persen (yoy).

Perkembangan Capaian BPP 2021 - 2025 (Triliun Rupiah)
BPP terus dijaga untuk mendukung program prioritas Pemerintah
Sumber: Kementerian Keuangan



Realisasi Belanja Pemerintah Pusat

Diefisiensikan untuk mendukung program prioritas Pemerintah





Foto: Biro Pers Kepresidenan

Peningkatan realisasi tersebut utamanya untuk mendukung pelaksanaan MBG serta penyaluran berbagai bantuan pemerintah. Selain itu, Belanja Barang juga dimanfaatkan antara lain untuk: (i) layanan masyarakat (penyaluran BOS, operasional dan layanan pendidikan, subsidi biodiesel, layanan telekomunikasi dan informasi, layanan Kesehatan masyarakat dan beasiswa LPDP); (ii) barang diserahkan ke masyarakat/pemda (penyaluran MBG, BSU dan bantuan pangan); serta (iii) pemeliharaan sarana dan prasarana.

Belanja Modal mencapai Rp427,5 triliun atau tumbuh 20,26 persen (yoy). Peningkatan tersebut utamanya dipengaruhi oleh antara lain penguatan alutsista, dukungan ketahanan pangan, dan infrastruktur IKN. Kinerja realisasi Belanja Modal dimanfaatkan antara lain untuk: (i) pengadaan tanah; (ii) pengadaan peralatan dan mesin; (iii) pembangunan/rehabilitasi jalan, irigasi dan jaringan; (iv) pengadaan gedung dan bangunan; serta (v) pengadaan modal lainnya.

Sementara itu, realisasi Belanja Bansos mencapai Rp186,6 triliun atau tumbuh 20,45 persen (yoy).

Peningkatan realisasi tersebut terutama dipengaruhi antara lain oleh kebijakan stimulus ekonomi berupa penyaluran Bantuan Langsung Tunai Sementara Kesejahteraan Rakyat (BLTS Kesra). Realisasi Belanja Bansos antara lain dimanfaatkan untuk: (i) penyaluran bantuan iuran bagi 96,8 juta peserta PBI Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN); (ii) penyaluran bantuan program kartu sembako bagi 18,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM); (iii) penyaluran BLTS Kesra untuk 33,2 juta KPM; (iv) penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) bagi 10 juta KPM; (v) penyaluran bantuan Program Indonesia Pintar (PIP) bagi 20,3 juta siswa; serta (6) penyaluran Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa.

Belanja NonK/L

Realisasi Belanja NonK/L hingga akhir Triwulan IV 2025 mencapai Rp1.101,9 triliun atau berkontraksi 5,99 persen (yoy). Realisasi Belanja NonK/L dipengaruhi antara lain oleh pembayaran manfaat pensiun, penyaluran subsidi dan kompensasi. Pembayaran manfaat

pensiun terealisasi Rp166,50 triliun atau tumbuh 3,7 persen (yoy) yang dipengaruhi oleh peningkatan jumlah pensiunan ASN/TNI/Polri.

Belanja Subsidi mencapai Rp281,6 triliun atau berkontraksi 3,8 persen (yoy). Capaian itu dipengaruhi oleh fluktuasi ICP, depresiasi nilai tukar Rupiah, serta peningkatan volume BBM, LPG, listrik dan pupuk. Realisasi Belanja Subsidi terdiri atas: (i) Subsidi Energi Rp185,2 triliun, untuk penyaluran BBM bersubsidi 19,0 juta kiloliter, LPG tabung 3 kg sebesar 8,5 juta metrik ton, dan listrik bersubsidi untuk 42,8 juta pelanggan; dan (ii) Subsidi NonEnergi Rp96,4 triliun terutama dimanfaatkan untuk Subsidi Bunga KUR kepada 4,6 juta debitur dengan plafon penyaluran KUR Rp270,1 triliun, Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) Perumahan untuk 278,9 ribu unit rumah bersubsidi, serta penyaluran pupuk bersubsidi sebanyak 8,1 juta ton.

Belanja Lain-Lain mencapai Rp124,3 triliun, berkontraksi 42,5 persen (yoy). Capaian tersebut dimanfaatkan untuk pembayaran Kompensasi BBM dan Listrik Rp120,0 triliun.

OKTOBER 2025



Foto: Biro Pers Kepresidenan

Pemulihan Rp13,25 Triliun Kerugian Negara Perkuat PNBP

Pemulihan kerugian negara sebesar Rp13,25 triliun dari perkara korupsi fasilitas ekspor CPO dan turunannya yang diserahkan oleh Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan secara langsung meningkatkan kapasitas fiskal negara melalui penguatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Langkah ini menjadi bagian dari pemulihan total kerugian perekonomian negara Rp17 triliun dan mencerminkan upaya konkret penegakan hukum untuk menjaga keberlanjutan penerimaan negara.

Penerbitan Perdana Dim Sum Bond untuk Pendalaman dan Diversifikasi Pembiayaan

Pemerintah Indonesia kembali berhasil menerbitkan SUN dalam mata uang asing. Pada akhir Oktober 2025, Dim Sum Bonds dalam mata uang Chinese Renminbi (CNH) untuk pertama kalinya diterbitkan pemerintah dengan nilai total CNH6 miliar setara sekitar USD842,34 juta.

Indonesia dinilai responsif dalam melakukan pendalaman dan diversifikasi sumber pembiayaan serta menjaga pengelolaan pembiayaan yang pruden dan inovatif serta adaptif.

Yield SUN 10 Tahun Mencapai Titik Terendah dalam 5 Tahun Terakhir

Setelah mengalami gejolak pada bulan September 2025, pasar keuangan domestik berangsur pulih. Arus keluar modal asing mulai mereda. Di pasar SBN yield SUN 10 tahun mencapai titik terendah dalam 5 tahun terakhir. Yield SUN 10 tahun sempat menyentuh kisaran 5,91% pada pertengahan Oktober 2025. Level ini menandai penurunan tajam dari level di awal tahun 2025 sekitar 106bps. Penurunan yield ini mencerminkan kepercayaan pasar keuangan terhadap fundamental ekonomi Indonesia.

Pemusnahan Rokok Ilegal Ciptakan Keadilan Industri

Pada 2 Oktober 2025, Menkeu Purbaya memimpin pemusnahan 235,4 juta batang rokok ilegal hasil dari penindakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Menkeu menegaskan bahwa langkah ini merupakan upaya dalam menjaga pasar dari kontaminasi barang ilegal dan menciptakan ekosistem industri rokok yang lebih adil.



Foto: Kementerian Keuangan

Transfer ke Daerah

Penyaluran TKD 2025

Efektif dan Efisien Mendukung Pelayanan Publik & Sektor Prioritas

Dalam mewujudkan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan, sinergi kebijakan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi hal yang fundamental. Di 2025, efisiensi dan penguatan program prioritas nasional menjadi arah kebijakan fiskal nasional. Hal ini tentunya membawa implikasi dalam penerapan kebijakan TKD. Pada 2025 TKD mengalami penyesuaian, namun hal ini tidak mengurangi layanan bagi masyarakat. Jika dilihat secara total, anggaran belanja untuk masyarakat (belanja pusat, TKD, dan pembiayaan) meningkat signifikan. Sinergi dan kolaborasi menjadi salah satu kunci untuk memperkuat efisiensi dan efektivitas APBN agar setiap rupiah uang APBN dapat bermanfaat optimal bagi seluruh masyarakat dan daerah.

Pada 2025, kebijakan Efisiensi TKD ditandai dengan Inpres Nomor 1/2025, yang diatur dalam KMK Nomor 29/2025 terkait penyesuaian alokasi TKD. Pagu TKD yang semula berdasarkan Perpres 201/2024 tercatat Rp919,9 triliun disesuaikan menjadi Rp869,3 triliun. Meskipun pagu penurunan, hal tersebut tidak mengurangi manfaat yang diterima oleh masyarakat, karena hasil ini digunakan untuk kegiatan prioritas pemerintah yang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Efisiensi TKD bahkan mendorong pemerintah, khususnya pemerintah daerah (pemda) untuk berinovasi dan berkolaborasi serta bersinergi agar pembangunan berjalan terpadu, saling melengkapi, dan berkelanjutan. Adapun bagi pemerintah desa (pemdes),

pengaruh efisiensi TKD tidak terlalu berdampak karena Dana Desa yang telah dialokasikan per Desa tidak berubah meski Insentif Desa urung dialokasikan.

Secara keseluruhan, TKD di 2025 terealisasi Rp849,0 triliun (92,3 persen APBN), atau terkontraksi 1,7 persen (yoy), dampak adanya pencadangan nilai TKD sesuai dengan Inpres. Jika dilihat per jenis dana, dimulai dengan Dana Bagi Hasil (DBH), realisasi penyaluran di 2025 tercatat Rp168,9 triliun (87,8 persen APBN). Realisasi tersebut termasuk penyelesaian sebagian Kurang Bayar (KB) DBH Rp18,5 triliun. Selama 2025, DBH mendukung penyediaan layanan kepada masyarakat, antara lain berupa bantuan iuran Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) untuk 4,9 juta orang, bantuan iuran Jamsostek untuk 696 ribu orang, serta perlindungan dan pengamanan hutan seluas 1.302 hektar.

Penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU), menunjukkan kinerja yang baik yaitu Rp433,3 triliun (97,0 persen APBN). Realisasi tersebut mengindikasikan bahwa secara umum mekanisme penyaluran DAU telah berjalan sesuai harapan, didukung oleh kesiapan pemda dalam memenuhi persyaratan penyaluran serta konsistensi pemerintah pusat dalam menyalurkan dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Capaian ini menegaskan peran strategis DAU dalam menjaga kesinambungan fiskal daerah dan mendukung penyelenggaraan pelayanan publik.

Ditinjau lebih rinci, DAU terbagi atas DAU Tidak Ditentukan Penggunaannya (DAU *Block Grant*) dan DAU Ditentukan

Penggunaannya (DAU *Specific Grant*). *Block Grant* menunjukkan kinerja penyaluran yang optimal dengan tingkat realisasi mencapai 100 persen APBN yang ditetapkan. Sementara itu, DAU *Specific Grant* telah tersalurkan 93,17 persen yang terdiri atas (i) DAU dukungan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), (ii) DAU dukungan pembangunan sarana dan prasarana pemberdayaan masyarakat di kelurahan, (iii) DAU dukungan bidang pendidikan, (iv) DAU dukungan bidang kesehatan, dan (v) DAU dukungan bidang pekerjaan umum (termasuk dalam efisiensi TKD). Penyaluran DAU tersebut termasuk juga DAU dukungan THR dan gaji ketiga belas bagi guru ASN daerah yang telah disalurkan pada Desember 2025.

Pemanfaatan DAU pada 2025 diantaranya untuk pembayaran gaji PPPK atas pengangkatan tenaga honorer sebanyak 565.194 orang, pembangunan 3.375 ruang kelas baru, pembangunan 259 unit puskesmas dan rumah sakit beserta sarana dan prasarana pendukungnya, serta pengadaan alat kesehatan sebanyak 8.241 unit.

Selanjutnya, Dana Alokasi Khusus (DAK) pada 2025 telah terealisasi Rp162,9 triliun (88,0 persen APBN). Kinerja ini tetap terjaga di tengah kebijakan efisiensi yang dilakukan secara terukur tanpa mengurangi fokus pada manfaat dan hasil nyata bagi masyarakat.

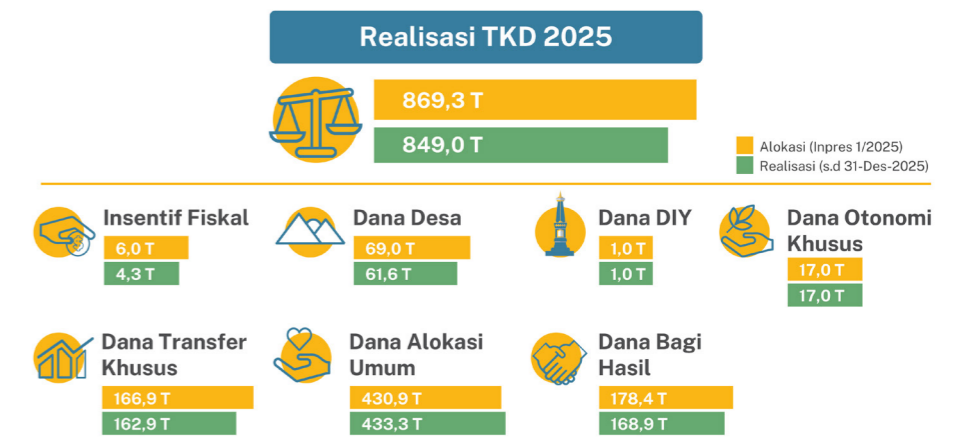
Di sisi lain, DAK Fisik terealisasi Rp17,6 triliun (47,7 persen APBN). Capaian ini dipengaruhi oleh kesiapan pelaksanaan kegiatan di sebagian daerah, terutama terkait aspek perencanaan teknis dan proses pengadaan barang dan jasa. Penyaluran DAK Fisik menunjukkan kinerja yang solid dan terfokus pada bidang prioritas nasional, dengan tingkat penyaluran tertinggi pada bidang Sanitasi, Kesehatan dan Keluarga Berencana, Perumahan dan Permukiman, Air Minum, serta Pendidikan, yang langsung menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Sementara itu, realisasi

DAK Nonfisik di 2025 mencapai Rp145,1 triliun atau 98,9 persen APBN, sejalan dengan kebijakan penyaluran tunjangan profesi guru secara langsung ke rekening guru serta penguatan layanan pendidikan dan kesehatan di daerah.

Dari segi penyaluran Hibah kepada Daerah tercatat Rp240,7 miliar (15,0 persen APBN) telah terealisasi di 2025 sejalan dengan tahapan pelaksanaan proyek strategis di daerah, seperti pembangunan *Mass Rapid Transit* koridor East–West. Hibah kepada Daerah tetap difokuskan pada dukungan transportasi umum massal perkotaan, penguatan sektor pertanian dataran tinggi, pelestarian lingkungan hidup, serta pemulihan infrastruktur dan perekonomian daerah pascabencana.

Sepanjang 2025, DAK berdampak langsung bagi peningkatan layanan dasar dan kesejahteraan masyarakat. Pemanfaatan DAK antara lain mendukung pendanaan untuk operasional satuan pendidikan bagi 50,4 juta peserta didik, pembangunan dan renovasi lebih dari 1.000 puskesmas, operasionalisasi lebih dari 10 ribu puskesmas dan 6,4 ribu balai penyuluh kesehatan, pembangunan jalan usaha tani sepanjang 88 km, serta perluasan layanan air minum dan sanitasi melalui pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) bagi puluhan ribu sambungan rumah.

Sementara itu, Dana Otonomi Khusus (Dana Otsus) dan Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) terealisasi Rp17 triliun (97,1 persen APBN). Penggunaan Dana Otsus dan DTI 2025 telah menghasilkan beberapa output utama, khususnya di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Adapun output yang dihasilkan antara lain: (i). Pendanaan Beasiswa Siswa Unggul Papua (SUP) untuk 1.097 mahasiswa, (ii). Kartu cerdas/siswa miskin sebanyak 15.200 siswa, (iii). Layanan kesehatan untuk 91.173 orang, (iv). Jaminan kesehatan untuk 2.138 orang, (v). Pembangunan jalan sepanjang 210 km, dan (vi). Pembangunan jembatan 18 unit.



Selanjutnya, Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta terealisasi Rp1,0 triliun (83,3 persen APBN) dengan capaian realisasi fisik 95,69 persen. Penggunaan Dana Keistimewaan D.I. Yogyakarta pada 2025 telah menghasilkan beberapa output, diantaranya: (i). Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rumah Tidak Layak Huni di 280 kelurahan, (ii). Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Rumah sebanyak 95 unit, (iii). Beasiswa Retrieval SMA kepada 250 Siswa, (iv). Kartu Cerdas/ Siswa Miskin untuk 15.200 siswa, dan (v). Verifikasi Tanah Kelurahan sebanyak 3.450 bidang.

Sementara itu, penyaluran Dana Desa tercapai Rp61,6 triliun (86,8, persen APBN) mengalami penurunan 13,09 persen (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh: (1) tingkat kepatuhan dalam pemenuhan persyaratan penyaluran; (2) kebijakan pengendalian anggaran Dana Desa Tahap II untuk mendukung kebijakan pengendalian defisit dalam rangka mendukung prioritas nasional, dengan nilai Rp7,27 T pada Dana Desa *non-earmarked*.

Penggunaan Dana Desa tetap diarahkan untuk mendukung penanganan kemiskinan ekstrem di desa melalui penyaluran BLT Desa. Hingga periode ini, BLT Desa telah disalurkan ke Rekening Kas Desa Rp6,73 triliun kepada 1,87 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang tersebar pada 74.639 desa. Selain itu, fokus Dana Desa juga mendukung program ketahanan pangan yang bertujuan untuk: (i) meningkatkan ketersediaan pangan,

baik dari hasil produksi masyarakat Desa maupun dari lumbung pangan Desa; (ii) meningkatkan keterjangkauan pangan bagi warga masyarakat Desa; serta (iii) meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang, aman, higienis, bermutu, serta berbasis pada potensi sumber daya lokal. Untuk mendukung program Ketahanan Pangan tersebut, Dana Desa telah disalurkan Rp 15,17 triliun kepada 74.600 desa.

Pada 2025, Insentif Fiskal mencatat realisasi penyaluran Rp4,27 triliun (71,2 persen APBN). Capaian ini mengalami penurunan 38,9 persen (yoy). Penurunan tersebut dipengaruhi oleh: (i) penurunan pagu dibandingkan tahun sebelumnya; (ii) kebijakan pengendalian anggaran Dana Insentif Fiskal untuk Kinerja Tahun Berjalan yang hanya dialokasikan Rp.300 miliar dari pagu Rp2 triliun. Dari sisi capaian output, penggunaan Dana Insentif Fiskal 2025 telah menghasilkan beberapa output utama, diantaranya adalah: (i). Iuran JKN 1,3 juta orang, (ii). Bantuan Benih Tanaman Pangan 376.231 kg, (iii). Jalan Usaha Tani 419 KM, dan (iv). Bantuan Penyediaan Rumah Layak Huni 5.769 unit.

NOVEMBER 2025



Foto: Denny Aulia

Negara Hadir Dalam Bencana di Aceh dan Sumatera

Pada akhir November 2025, bencana banjir dan tanah longsor melanda sejumlah wilayah di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, yang berdampak pada ratusan ribu warga serta menimbulkan kerusakan yang sangat parah. Negara melalui APBN hadir dalam penanganan bencana tersebut melalui sinergi Pemerintah Pusat dan Daerah bersama relawan, dengan menyalurkan bantuan darurat berupa pangan, air bersih, obat-obatan, layanan dasar lainnya, serta memulai penyiapan hunian permanen.

untuk menurunkan *cost of fund*, memperkuat dampak pelonggaran suku bunga Pasar Uang Antarbank oleh Bank Indonesia, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Penempatan Dana Tambahan Rp76 Triliun Dorong Penurunan Suku Bunga

Pemerintah kembali menempatkan tambahan dana BRI, Mandiri, BNI, dan Bank DKI senilai Rp76 triliun. Penambahan penempatan dana tersebut ditujukan

Stimulus Triwulan IV Rp37,4 Triliun Dukung Dunia Kerja

Pemerintah kembali memberikan paket stimulus ekonomi Triwulan IV 2025 sebesar Rp37,4 triliun. Stimulus ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya beli di akhir tahun, dukungan bagi dunia kerja khususnya pemberdayaan generasi muda, serta kelancaran mobilitas masyarakat. Stimulus ekonomi juga memberikan BLT sementara, program magang, serta diskon transportasi Hari Raya Natal dan tahun baru.

APBN 2025 Tetap Terjaga, Ekonomi Nasional Tumbuh Solid

Kinerja APBN 2025 terjaga baik dengan realiasi sementara defisit APBN Rp695,1 triliun atau 2,92% PDB. Meskipun melebar dari outlook Semester I 2025 (sekitar 2,78%), defisit ini masih aman di bawah batas maksimal 3% yang diatur



Foto: Kementerian Perhubungan

UU Keuangan Negara. Pelebaran defisit merupakan kebijakan fiskal yang bersifat *countercyclical* guna menjaga daya beli masyarakat di tengah tekanan makroekonomi. Dari sisi pelaksanaan, realisasi pendapatan negara mencapai 91,7% APBN dan belanja negara *on-track* sebesar 95,3% APBN. Sejalan dengan itu, Badan Pusat Statistik mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia sepanjang tahun

2025 sebesar 5,11 persen (yoy), mencerminkan ketahanan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dengan capaian tersebut, APBN 2025 ditutup dengan kondisi yang terkendali dan memberikan ruang yang memadai bagi pengelolaan fiskal yang berkelanjutan serta dukungan terhadap agenda pembangunan pada periode selanjutnya.

DESEMBER 2025

Anggaran Tematik

Berbagai Output Tematik 2025

Mempertegas Peran Pemerintah dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat

Selain kelompok anggaran BPP dan TKD, pemerintah juga mengelompokkan anggaran secara tematik untuk mempertegas kinerja pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan rakyat. Anggaran Tematik dapat bersumber dari BPP, TKD maupun Pembiayaan. Anggaran Tematik yang dibentuk utamanya adalah pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, infrastruktur, dan perlindungan sosial.

Tematik Pendidikan

Realisasi Anggaran Tematik Pendidikan pada Triwulan IV mencapai Rp233,4 triliun yang direalisasikan melalui BPP sebesar Rp121,5 triliun, melalui TKD sebesar Rp85,2 triliun, serta melalui pembiayaan sebesar Rp26,7 triliun. Realisasi Anggaran Tematik Pendidikan pada Triwulan IV lebih tinggi dibanding Triwulan III 2025 seiring dengan semakin tingginya penyerapan anggaran pada program-program pendidikan, antara lain penyaluran BOS, PIP dan KIP Kuliah, pembangunan sekolah rakyat (SR), pelaksanaan revitalisasi sekolah, dan pembangunan sekolah unggulan serta semakin luasnya cakupan MBG.

Secara tahunan, realisasi Anggaran Tematik Pendidikan 2025 mencapai Rp645,1 triliun, tumbuh 13,4 persen (yoy) terutama karena adanya program baru seperti MBG, SR, revitalisasi sekolah, dan sekolah unggulan. Anggaran Tematik Pendidikan 2025 direalisasikan melalui pos BPP Rp274,9 triliun, TKD Rp343,5 triliun, dan Pembiayaan Rp26,7 triliun. Realisasi tersebut dimanfaatkan

utamanya untuk meningkatkan akses pendidikan kepada seluruh peserta didik dan mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas.

Tematik Kesehatan

Realisasi Anggaran Tematik Kesehatan pada Triwulan IV mencapai Rp76,1 triliun yang direalisasikan melalui BPP Rp51,6 triliun dan melalui TKD sebesar Rp24,5 triliun. Realisasi Anggaran Kesehatan pada triwulan IV lebih tinggi dibandingkan triwulan III 2025 yang antara lain dipengaruhi oleh penyediaan MBG bagi ibu hamil dan anak balita (di luar PAUD), serta layanan rumah sakit.

Secara tahunan realisasi Anggaran Tematik Kesehatan 2025 mencapai Rp208,5 triliun tumbuh 7,9 persen (yoy) yang direalisasikan melalui BPP Rp137,2 triliun dan TKD Rp71,3 triliun. Realisasi tersebut dimanfaatkan antara lain untuk peningkatan sarana dan prasarana bidang kesehatan Rp72,2 triliun, serta pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat Rp123,6 triliun. Beberapa manfaat realisasi anggaran tematik kesehatan antara lain cek kesehatan gratis (CKG) bagi 70,8 juta penduduk, revitalisasi rumah sakit sebanyak 32 RS di daerah, bantuan iuran PBI JKN bagi 96,8 juta peserta, dan penanganan TB 9,2 juta skrining.

Tematik Ketahanan Pangan

Realisasi Anggaran Tematik Ketahanan Pangan pada Triwulan IV mencapai Rp62,7 triliun yang dikontribusikan melalui BPP Rp59,7 triliun dan melalui TKD

Rp3,0 triliun. Realisasi Anggaran Ketahanan Pangan pada Triwulan IV lebih tinggi dari periode sebelumnya, antara lain dipengaruhi oleh akselerasi program yang mendukung lumbung pangan, pengembangan infrastruktur pertanian, dan penyaluran bantuan pangan.

Secara tahunan, realisasi Anggaran Tematik Ketahanan Pangan 2025 mencapai Rp143,9 triliun yang dikontribusikan melalui BPP Rp105,9 triliun, melalui TKD Rp15,9 triliun, serta melalui pembiayaan Rp22,1 triliun. Capaian itu terutama dimanfaatkan untuk program cetak sawah 69 ribu hektare dan optimalisasi lahan 381 ribu hektare sebesar Rp8,9 triliun, pengembangan 55 ribu hektare irigasi dan 20 unit bendungan sebesar Rp15,6 triliun, penyaluran 8,1 juta ton pupuk bersubsidi sebesar Rp32,7 triliun, bantuan pangan beras dan minyak untuk 17,9 juta KPM sebesar Rp11,3 triliun, serta pembelian gabah, beras, dan jagung melalui dana Operator Investasi Pemerintah BULOG Rp22,1 triliun. Sampai dengan akhir 2025, stok cadangan beras BULOG mencapai 3,4 juta ton, tertinggi dalam 57 tahun terakhir, yang menunjukkan stok pangan dalam kondisi aman.

Tematik Infrastruktur

Realisasi Anggaran Tematik Infrastruktur pada Triwulan IV mencapai Rp173,6 triliun yang direalisasikan melalui BPP Rp134,0 triliun, melalui TKD Rp14,8 triliun, serta melalui pembiayaan sebesar Rp24,9 triliun. Realisasi Anggaran Infrastruktur pada Triwulan IV lebih tinggi dari periode sebelumnya, antara lain dipengaruhi oleh pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, pembangunan jaringan irigasi, pembangunan sekolah rakyat dan revitalisasi sekolah dan madrasah, cetak sawah, serta pelaksanaan program FLPP.

Realisasi Anggaran Tematik Infrastruktur 2025 mencapai

Rp343,7 triliun, berkontraksi 13,0 persen (yoy), terutama disebabkan percepatan penyelesaian proyek infrastruktur konektivitas jalan pada 2024 (termasuk pembangunan jalan tol) dan infrastruktur ketahanan pangan (antara lain bendungan dan jaringan irigasi).

Anggaran Tematik Infrastruktur 2025 dikontribusikan melalui pos BPP Rp234,3 triliun, TKD Rp59,7 triliun, dan Pembiayaan Rp49,7 triliun. Realisasi tersebut dimanfaatkan terutama untuk mendukung pembangunan perumahan dan fasilitas umum, pendidikan, ketahanan pangan, ketahanan energi, dan konektivitas. Adapun realisasinya antara lain pelaksanaan program FLPP Rp29,2 triliun untuk penyediaan 278,9 ribu unit rumah; pelaksanaan revitalisasi sekolah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (PAUD/SD/SMP/SMA dan sederajat) Rp18,7 triliun untuk pembangunan 17.575 unit sekolah; pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan Rp27,5 triliun. Selain itu

juga dilakukan pembangunan dan preservasi jembatan, pelabuhan laut, bendungan, jaringan irigasi, pembangunan pipa transmisi gas bumi ruas Cirebon-Semarang, dan infrastruktur listrik perdesaan.

Tematik Perlindungan Sosial

Realisasi Anggaran Tematik Perlindungan Sosial (Perlinsos) pada Triwulan IV mencapai Rp171,7 triliun, direalisasikan melalui BPP Rp170,4 triliun dan melalui TKD Rp1,3 triliun. Realisasi Anggaran Perlinsos pada Triwulan IV lebih tinggi dari periode sebelumnya, antara lain dipengaruhi oleh penyaluran bantuan PIP Semester II 2025, bantuan pelaksanaan kebijakan stimulus ekonomi Triwulan IV berupa penyaluran BLTS Kesra, serta pelaksanaan tanggap darurat bencana.

Realisasi Anggaran Tematik Perlinsos 2025 mencapai Rp469,9 triliun, tumbuh 3,1 persen (yoy). Peningkatan ini terutama didorong oleh pelaksanaan berbagai

kebijakan stimulus ekonomi sepanjang 2025. Pada Triwulan II pemerintah melakukan penebalan bantuan sosial serta menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) guna menjaga daya beli masyarakat dan menopang aktivitas ekonomi. Sementara itu, pada Triwulan IV belanja kembali meningkat seiring dengan penyaluran BLTS Kesra sebagai bagian dari upaya perlindungan kelompok rentan dan penguatan jaring pengaman sosial menjelang akhir tahun.

Anggaran Tematik Perlinsos 2025 direalisasikan melalui pos BPP Rp463,2 triliun dan TKD Rp6,7 triliun. Capaian itu dimanfaatkan terutama untuk penyaluran berbagai bansos, jamsos, dan subsidi antara lain PKH bagi 10 juta KPM, kartu sembako bagi 18,3 juta KPM, PIP bagi 20,3 juta siswa, KIP Kuliah bagi 1,2 juta mahasiswa, bantuan iuran PBI Jaminan Kesehatan bagi 96,8 juta jiwa, subsidi energi dan nonenergi, serta BLT Desa bagi 1,9 juta KPM.



Foto: pexels-fahry-samalew

Program Unggulan

Kegiatan Prioritas Berdampak Nyata Bagi Rakyat

Meningkatkan Kualitas Akses Layanan Menyongsong Generasi Emas

Makan Bergizi Gratis (MBG)

Realisasi Belanja MBG pada Triwulan IV 2025 mencapai Rp31,7 triliun antara lain untuk makan bergizi gratis kepada 22,62 juta penerima manfaat. Pada periode ini juga telah beroperasi 8.497 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Realisasi Belanja MBG Triwulan IV dibanding periode Triwulan III lebih tinggi seiring dengan penambahan SPPG yang beroperasi, semakin luasnya cakupan pemberian program dan bertambahnya jumlah penerima manfaat.

Realisasi Belanja MBG 2025 mencapai Rp51,5 triliun, antara lain untuk MBG kepada 56,13 juta penerima manfaat (per 7 Januari 2026) di 38 provinsi dari target 89,2 juta penerima manfaat. Pada periode ini telah beroperasi sebanyak 19.343 unit SPPG, melibatkan 789.319 pekerja.

Sekolah Rakyat

Realisasi Belanja Sekolah Rakyat (SR) pada Triwulan IV 2025 mencapai Rp5,8 triliun yang dimanfaatkan antara lain untuk pelaksanaan renovasi sentra pendidikan dan penyelenggaraan pendidikan. Realisasi Belanja SR Triwulan IV lebih tinggi dibanding periode Triwulan III seiring dengan penambahan jumlah sentra pendidikan yang direnovasi serta pengadaan sarana dan prasarana SR.

Sampai dengan Triwulan IV, realisasi Belanja SR pada Kementerian Sosial sudah mencapai Rp1,1 triliun. Realisasi tersebut dimanfaatkan antara lain untuk



Foto: Badan Gizi Nasional

biaya operasional SR pada 166 lokasi, pengadaan sarana dan prasarana (antara lain laptop, smart board, perlengkapan kelas dan asrama), penyusunan kurikulum SR, proses rekrutmen/seleksi, pelatihan bagi guru, pembayaran gaji (termasuk juga tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru), dan biaya jaringan komunikasi data untuk mendukung akses internet di seluruh lokasi SR.

Selanjutnya, realisasi SR pada Kementerian Pekerjaan Umum sampai dengan Triwulan IV Rp5,4 triliun yang dimanfaatkan antara lain untuk perencanaan dan pelaksanaan fisik yang meliputi perbaikan struktural bangunan, penyediaan dan perbaikan sistem air bersih dan sanitasi, serta pengadaan meubelair.

Sebanyak 15.895 siswa dalam 641 rombongan belajar/kelas telah menikmati keberadaan SR tersebut. Siswa tidak hanya mengikuti kegiatan sekolah tetapi juga kegiatan keasramaan. Fasilitas yang memadai, layak dan nyaman menjadi pendukung bagi peserta didik untuk mengikuti proses belajar di SR. Proses pembangunan

dan pelaksanaan SR masih akan dilaksanakan pemerintah untuk mendukung peningkatan akses dan kualitas pendidikan yang merata bagi seluruh peserta didik.

Sekolah Unggul Garuda (SUG)

Realisasi Belanja SUG pada Triwulan IV mencapai Rp112,0 miliar antara lain untuk pembangunan SUG baru dan SUG transformasi. Realisasi Belanja SUG Triwulan IV lebih tinggi dari periode sebelumnya seiring dengan penambahan jumlah/wilayah pembangunan SUG.

Sampai dengan Triwulan IV, SUG terealisasi Rp176,8 miliar yang terdiri atas Rp97,8 miliar untuk SUG baru dan Rp79,0 miliar untuk SUG transformasi. Realisasi ini dimanfaatkan antara lain untuk proses penetapan lokasi SUG baru dan transformasi 12 SMA unggulan di 11 provinsi. Pembangunan SUG baru diutamakan pada daerah 3T, semakin memperluas akses kepada seluruh peserta didik.

Revitalisasi Sekolah dan Madrasah

Realisasi Belanja Revitalisasi Sekolah pada Triwulan IV mencapai Rp6,3 triliun antara lain untuk pelaksanaan revitalisasi sekolah dan madrasah. Pada Triwulan IV telah diselesaikan sebagian besar pekerjaan revitalisasi yang mencapai Rp18,9 triliun, atau 94,5 persen. Capaian tersebut dikontribusikan oleh revitalisasi sekolah yang dibiayai melalui Kemendikdasmen Rp16,7 triliun, Kemenag Rp240 miliar, dan KemenPU Rp1,9 triliun. Adapun total penerima program revitalisasi sekolah selama 2025 mencapai 16.178 satuan pendidikan dan revitalisasi pada 2.120 Madrasah.

Cek Kesehatan Gratis (CKG) dan Revitalisasi Rumah Sakit

Layanan CKG berperan penting untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan guna mencegah penyakit dan meningkatkan kesehatan

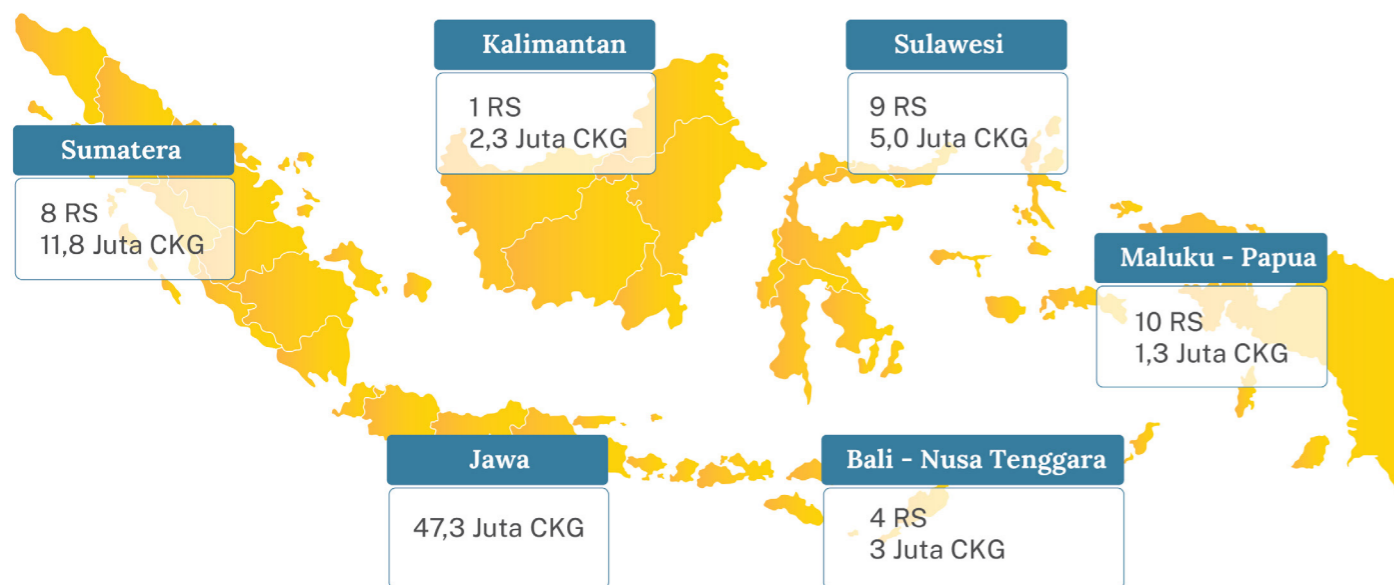
masyarakat, baik balita (prasekolah), anak usia sekolah, dewasa, hingga lanjut usia. Realisasi Belanja CKG 2025 mencapai Rp2,1 triliun antara lain untuk pemeriksaan kesehatan bagi 70,8 juta penduduk.

Di sisi lain, revitalisasi Rumah Sakit bertujuan untuk meningkatkan kelas D/D Pratama menjadi Kelas C, utamanya memperkuat sarana prasarana KJSU (Kanker, Jantung, Stroke, dan Urologi). Realisasi Belanja Revitalisasi RS 2025 mencapai Rp1,6 triliun melalui Kemenkes dan Rp1,6 triliun melalui DAK Fisik. Pada 2025 dilakukan revitalisasi RS sebanyak 32 unit yang tersebar di Indonesia.



Foto: Biro Pers Kepresidenan

Sebaran CKG dan Revitalisasi Rumah Sakit di Indonesia



Pembiayaan Utang

Utang Membiayai Defisit Fiskal

Dikelola dengan Hati-Hati, Terukur dan Efisien

Strategi pembiayaan utang dilaksanakan melalui kombinasi penerbitan SBN dan penarikan pinjaman, yang dikelola secara *prudent* dengan memperhatikan keseimbangan antara biaya dan risiko, serta menjaga fleksibilitas pembiayaan di tengah dinamika pasar keuangan global.

Dari sisi SBN, strategi penerbitan tetap memprioritaskan pasar domestik sebagai sumber pembiayaan utama, sejalan dengan upaya pendalaman pasar keuangan domestik. Sementara itu, penerbitan SBN dalam valuta asing (valas) dilakukan secara selektif sebagai pelengkap pembiayaan dan diversifikasi, dengan tetap memperhatikan risiko nilai tukar. Pemerintah juga mengelola portofolio SBN secara aktif melalui diversifikasi instrumen dan tenor untuk mendukung pengembangan pasar sekaligus mengendalikan risiko utang.

Selain itu, penerbitan SBN dilakukan dengan memanfaatkan momentum pasar yang kondusif agar efisiensi biaya utang dapat tetap terjaga dalam jangka menengah. Seluruh strategi tersebut didukung oleh penguatan infrastruktur pasar, optimalisasi peran *primary dealers* dan mitra distribusi, penyempurnaan kerangka manajemen risiko dan pengawasan, serta penguatan komunikasi dan edukasi kepada stakeholder guna menjaga permintaan yang solid dan berkelanjutan.

Sementara itu, dari sisi pinjaman, strategi pembiayaan diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional melalui perluasan manfaat pinjaman

kegiatan/proyek yang berdampak langsung, serta penarikan pinjaman tunai yang dilakukan secara selektif. Pengadaan pinjaman kegiatan/proyek mempertimbangkan secara cermat prioritas program, kapasitas fiskal, kesiapan proyek dan *executing agency*. Untuk meningkatkan efektivitas dan produktivitas pinjaman, Pemerintah memperkuat kualitas perencanaan dan pelaksanaan melalui peningkatan koordinasi antara Kementerian Keuangan, Bappenas, dan K/L terkait, serta penguatan monitoring dan evaluasi.

Untuk mengoptimalkan portofolio utang dan meningkatkan efisiensi pembiayaan, Pemerintah juga melakukan strategi *liabilities management* seperti *debt switch*, *debt swap*, konversi pinjaman, dan instrumen pengelolaan kewajiban lainnya.

Strategi pembiayaan utang tersebut diimplementasikan secara konsisten sepanjang tahun 2025, dengan tetap menjaga kehati-hatian dalam merespons dinamika pasar keuangan global dan domestik. Pemerintah secara aktif memantau perkembangan pasar serta menyesuaikan langkah pembiayaan agar kebutuhan pendanaan negara dapat dipenuhi secara tepat waktu dan efisien.

Pada Triwulan I 2025, pelaksanaan pembiayaan utang berlangsung di tengah tingginya volatilitas pasar keuangan global, antara lain dipicu oleh kebijakan tarif agresif AS yang menimbulkan gejolak di pasar keuangan negara berkembang. Di sisi lain, pelaku pasar juga masih bersikap *wait and see* terhadap dinamika transisi pemerintahan serta implementasi

awal program pemerintah baru. Dalam konteks tersebut, hingga akhir Triwulan I 2025, realisasi pembiayaan utang (neto) tercatat sebesar Rp270,3 triliun, yang terdiri atas SBN neto Rp282,6 triliun dan pinjaman neto negatif Rp12,3 triliun.

Selanjutnya, tekanan global yang sempat meningkat terutama akibat pengumuman kebijakan tarif AS pada *Liberation Day*, pada Triwulan II 2025 berangsur mereda. Kondisi ini didukung adanya penundaan sebagian kebijakan tarif AS dan meningkatnya ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter di negara-negara maju. Di dalam negeri, perbaikan kinerja pasar keuangan domestik, penurunan suku bunga acuan BI, serta pertumbuhan ekonomi yang tetap solid turut memperkuat optimisme pasar dan memberikan ruang bagi Pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan utang secara lebih efisien. Sejalan dengan perkembangan tersebut, hingga akhir Triwulan II 2025, realisasi pembiayaan utang tercatat sebesar Rp315,0 triliun, yang terdiri atas SBN neto Rp308,6 triliun dan pinjaman neto Rp6,4 triliun.

Memasuki Triwulan III 2025, kondisi pasar keuangan global menunjukkan perbaikan yang semakin konsisten. Volatilitas mereda dan arus modal asing kembali mengalir ke negara berkembang, seiring pelemahan Dolar AS dan meningkatnya ekspektasi pemangkasan lanjutan suku bunga kebijakan The Fed. Namun demikian, pasar keuangan domestik sempat mengalami tekanan akibat dinamika sosial dan politik pada bulan Agustus, yang memicu pelemahan sementara di pasar saham dan nilai tukar serta mendorong arus modal keluar. Melalui respons kebijakan yang cepat dan terkoordinasi, stabilitas pasar dapat segera dipulihkan. Sejalan dengan hal tersebut, penurunan suku bunga kebijakan BI turut memperkuat sentimen pasar dan mendukung kondisi pembiayaan utang yang lebih kondusif. Pada periode ini,

dukungan likuiditas juga diperkuat melalui penempatan dana pemerintah di perbankan Himbara. Realisasi pembiayaan utang hingga akhir Triwulan III 2025 mencapai Rp501,5 triliun, terdiri atas penerbitan SBN neto Rp471,4 triliun dan penarikan pinjaman neto Rp30,1 triliun.

Pada Triwulan IV 2025, kondisi pasar keuangan domestik dan global relatif kondusif, ditopang oleh membaiknya prospek pertumbuhan ekonomi, terjaganya stabilitas sektor keuangan, serta meredanya tekanan volatilitas global. Di dalam negeri, indikator aktivitas ekonomi menunjukkan tren perbaikan yang berkelanjutan, didukung oleh stimulus fiskal, penguatan kepercayaan pelaku usaha, serta membaiknya iklim investasi. Di pasar keuangan, kinerja pasar saham yang menguat dan tren penurunan imbal hasil SBN mencerminkan peningkatan optimisme investor. Dalam kondisi tersebut, pengelolaan pembiayaan utang dapat dilakukan secara lebih optimal dan efisien. Hingga akhir 2025, pembiayaan utang tercatat sebesar Rp736,3 triliun, lebih rendah Rp39,6 triliun dari APBN, antara lain didukung oleh pemanfaatan Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp85,6 triliun.

Sebagai bagian dari strategi pengelolaan kas negara yang efisien dan mendukung stabilitas sistem keuangan, Pemerintah melakukan penempatan dana di bank Himbara. Penempatan dana yang dilakukan sebesar Rp200 triliun pada September dan Rp76 triliun pada November 2025 meningkatkan likuiditas perbankan, yang turut mendorong suku bunga pasar uang dan suku bunga deposito cenderung menurun. Kondisi pendanaan yang lebih longgar ini memberi ruang bagi perbankan untuk menyalurkan kredit dengan biaya yang lebih efisien, sehingga mendukung aktivitas ekonomi secara berkelanjutan.

Pembiayaan utang pada 2025 ditopang oleh SBN neto yang mencapai Rp639,3 triliun, dengan dukungan permintaan investor yang kuat serta diimbangi oleh strategi penerbitan yang terukur.

Di pasar perdana, minat investor terhadap SBN tetap solid sepanjang tahun, ditunjukkan oleh stabilnya kinerja lelang SBN dengan rata-rata incoming bid sekitar tiga kali lipat target, masing-masing sekitar 3,2 kali untuk SUN dan 3,4 kali untuk SBSN.

Sejalan dengan penguatan di pasar perdana, penerbitan SBN ritel terus diperkuat sebagai bagian dari upaya memperluas partisipasi masyarakat dalam pembiayaan negara. Sepanjang tahun 2025, Pemerintah menerbitkan delapan seri SBN ritel dengan total nominal mencapai Rp153,0 triliun yang berhasil menarik partisipasi lebih dari 429 ribu investor. Partisipasi investor ritel menunjukkan tren yang positif, dengan dominasi investor milenial dan generasi Z, yang menjadi fondasi penting bagi pengembangan basis investor jangka panjang. Tingginya minat masyarakat tersebut membuktikan kepercayaan publik yang terus meningkat, sekaligus menegaskan peran aktif masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional melalui instrumen SBN ritel.

Untuk melengkapi penerbitan di pasar domestik, pemerintah juga menerbitkan SBN valas yang dioptimalkan secara selektif. Penerbitan dilakukan secara oportunistis pada saat kondisi pasar mendukung, sehingga biaya pembiayaan dapat ditekan dan risiko tetap terkendali. Sepanjang 2025, DJPPR memanfaatkan peluang di pasar keuangan global melalui berbagai penerbitan SBN valas, antara lain *Global Bonds*, *Samurai Bonds*, dan *Global Sukuk*, yang seluruhnya berhasil terealisasi dengan baik dan mencerminkan kepercayaan kuat investor internasional terhadap Indonesia.

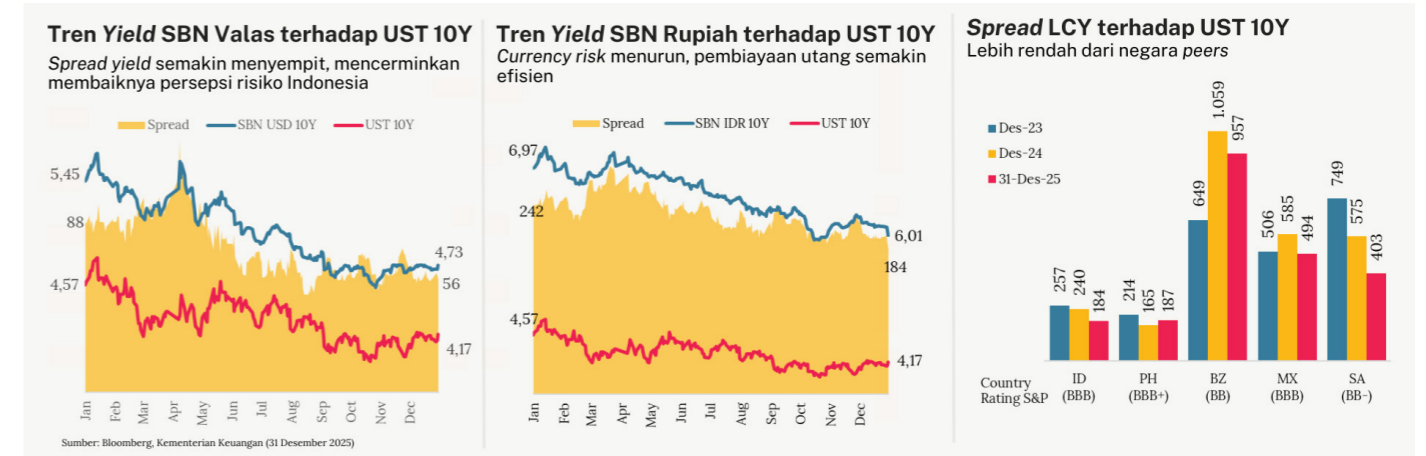
Tahun 2025 juga menjadi momentum penting dengan hadirnya dua instrumen baru yang memperluas akses pembiayaan global. Untuk pertama kalinya, Pemerintah menerbitkan *Kangaroo Bond* senilai AUD800 juta, yang berhasil menarik minat sangat tinggi dengan orderbook mencapai AUD8 miliar. Selain itu, penerbitan perdana *Dim Sum Bond* senilai CNH6 miliar turut membuka akses

pembiayaan baru di pasar global, dengan partisipasi investor yang solid dan mencerminkan keyakinan terhadap stabilitas ekonomi serta kredibilitas fiskal Indonesia.

Atas keberhasilan penerbitan SBN di pasar global tersebut, pada tahun 2025, DJPPR kembali memperoleh pengakuan internasional, antara lain: *Domestic Bond of the Year* dari IFR Asia Awards dan *Best Bond Deal* dari Finance Asia Achievement Awards 2025 untuk penerbitan perdana *Kangaroo Bond*, serta *Best Islamic Finance Deals* dari Finance Asia Achievement Awards 2025 untuk penerbitan *Global Sukuk*. Rangkaian penghargaan ini menegaskan posisi Indonesia sebagai *benchmark* global dalam pembiayaan syariah dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat reputasi Indonesia sebagai pelopor inovasi pembiayaan negara di pasar keuangan global.

Komitmen Indonesia terhadap pembiayaan berkelanjutan semakin diperkuat melalui penerbitan berbagai *thematic bonds* sepanjang 2025, meliputi *Green Sukuk*, *SDG Bonds*, dan *Blue Bonds*, termasuk *Samurai Blue Bond* serta *SDG Bond* berdenominasi Euro. Penerbitan *thematic bonds* dilakukan sebagai upaya perluasan basis investor dan diversifikasi sumber pembiayaan. Inovasi ini juga menegaskan posisi Indonesia sebagai pelopor pembiayaan berkelanjutan di kancah global, sekaligus untuk memastikan pembiayaan negara memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan lingkungan.

Pengelolaan pembiayaan utang yang disiplin sepanjang 2025 turut tercermin dari membaiknya persepsi risiko Indonesia. *Spread yield* SBN valas terhadap US Treasury tenor 10 tahun menyempit signifikan dari 88 basis poin pada Januari menjadi 56 basis poin di akhir 2025, menunjukkan penurunan *country risk*. Perbaikan tersebut juga diikuti oleh penurunan risiko nilai tukar (*currency risk*), dengan *spread yield* SBN Rupiah terhadap US Treasury tenor 10 tahun berada di level 184 basis poin, jauh lebih rendah dibandingkan posisi Januari (242 bps) dan menjadi salah satu yang



terendah di antara negara peers. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan pasar terhadap stabilitas ekonomi dan kredibilitas kebijakan fiskal Indonesia, sekaligus memberikan dampak nyata berupa penurunan biaya pembiayaan dan meningkatnya efisiensi pengelolaan utang APBN.

Melengkapi strategi pembiayaan melalui SBN, Pemerintah juga mengelola pembiayaan melalui pinjaman. Pinjaman neto hingga Desember 2025 mencapai Rp97,0 triliun terdiri atas Pinjaman Dalam Negeri neto Rp8,1 triliun dan Pinjaman Luar Negeri neto Rp88,9 triliun.

Dalam rangka mengelola risiko dan biaya utang, Pemerintah secara aktif melakukan *liability management*, antara lain melalui *debt switch*, *buyback*, *debt swap*, dan *loan conversion*. Konversi

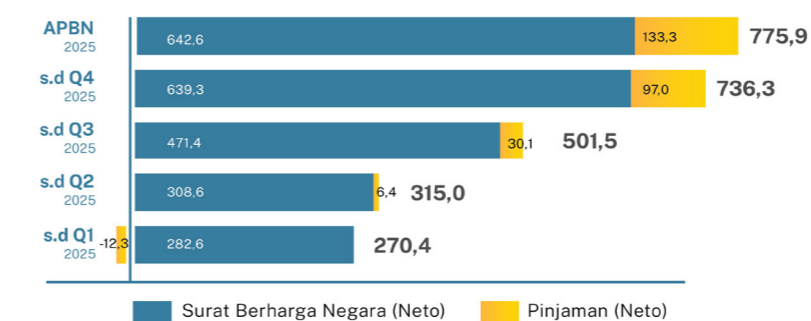
pinjaman dilakukan sebagai upaya mengurangi eksposur risiko nilai tukar, meningkatkan kepastian beban pembayaran utang, serta memperkuat struktur portofolio utang dalam jangka menengah. Pada 2025, Kementerian Keuangan kembali mencatat capaian penting melalui konversi 21 pinjaman dari Asian Development Bank dalam mata uang JPY dan USD dengan nilai ekuivalen USD1,9 miliar ke dalam mata uang Rupiah. Transaksi ini berhasil dicapai dengan net bunga pinjaman sebesar 0 persen, sehingga memberikan efisiensi biaya yang signifikan sekaligus mengurangi risiko nilai tukar. Keberhasilan ini memperkuat posisi Indonesia sebagai pelopor global dalam strategi manajemen utang berbasis mata uang lokal dan menjadikan Indonesia sebagai *benchmark* internasional dalam

inovasi pengelolaan utang yang *prudent*, adaptif, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, pembiayaan utang dikelola secara *prudent*, adaptif, dan kredibel di tengah dinamika global dan domestik yang menantang. Melalui strategi penerbitan yang fleksibel, diversifikasi instrumen dan investor, inovasi pembiayaan yang berkelanjutan, serta pengelolaan risiko yang terukur, Pemerintah berhasil menjaga stabilitas pasar SBN, menekan biaya pembiayaan, dan memastikan kesinambungan fiskal tetap terjaga. Pemerintah terus menjaga disiplin fiskal dan kehati-hatian dalam pengelolaan utang, melakukan pendalaman dan pengembangan pasar keuangan secara aktif, serta memastikan pembiayaan negara semakin efektif dalam mendukung pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya tahan.

Realisasi Pembiayaan Utang

*per 31 Desember 2025 (realisasi sementara)
angka ekuivalen dalam triliun Rupiah



Melalui strategi penerbitan yang fleksibel, diversifikasi instrumen dan investor, inovasi pembiayaan yang berkelanjutan, serta pengelolaan risiko yang terukur, Pemerintah berhasil menjaga stabilitas pasar SBN, menekan biaya pembiayaan, dan memastikan kesinambungan fiskal tetap terjaga.



Pembiayaan Investasi

Investasi Pemerintah 2025

Menjaga Ruang Fiskal dan Memperluas Manfaat

Kebijakan pembiayaan investasi pemerintah pada 2025 diarahkan untuk memastikan pemanfaatan uang negara dilakukan secara terukur, hati-hati, dan berorientasi pada manfaat jangka menengah dan panjang bagi masyarakat. Kebijakan ini menekankan pada kualitas belanja dan ketetapan sasaran, terutama dalam mendukung program-program prioritas yang berdampak langsung pada kehidupan sehari-hari.

Pembiayaan investasi digunakan sebagai instrumen untuk memperkuat fondasi ekonomi, menjaga keberlanjutan program publik, serta mendukung kelompok masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok menengah dan rentan. Fokus pembiayaan diarahkan pada sektor perumahan, pangan, pendidikan, dan transportasi; sektor-sektor yang memiliki keterkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat dan aktivitas ekonomi.

Hingga 31 Desember 2025, realisasi pembiayaan investasi tercatat Rp92,83 triliun. Dana tersebut terutama dimanfaatkan untuk Program FLPP, penguatan cadangan pangan melalui Perum Bulog (cadangan beras dan jagung), Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada BUMN, serta pembiayaan investasi kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Sektor Perumahan

Di sektor perumahan, pembiayaan investasi melalui FLPP direalisasikan sebesar Rp29,2 triliun melalui Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP

Tapera) dan Rp6,6 triliun melalui PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)/PT SMF. Hingga akhir 2025, pembiayaan ini digunakan untuk mendukung penyaluran 278.876 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di 33 provinsi (401 Kab/Kota). Selain memberikan akses pembiayaan perumahan, program ini juga memiliki keterkaitan dengan aktivitas ekonomi di sektor konstruksi dan industri pendukung yang secara bertahap berkontribusi pada penciptaan lapangan kerja dan penggunaan produk dalam negeri.

Sektor Pangan

Dalam rangka menjaga stabilitas pangan, pemerintah melalui Perum Bulog merealisasikan pembiayaan Rp16,5 triliun untuk pengadaan 488,9 ribu ton beras dan 1,64 juta ton gabah, sesuai target yang ditetapkan. Selain itu, pembiayaan Rp5,5 triliun dialokasikan untuk pengadaan 1 juta ton jagung, dengan realisasi hingga 31 Desember 2025 sebesar 474 ribu kg. Dukungan ini diharapkan dapat membantu menjaga kesinambungan penyerapan hasil produksi petani dan harga pangan di tingkat konsumen.

Sektor Pendidikan

Pembiayaan investasi melalui LPDP direalisasikan sebesar Rp26,70 triliun, yang dialokasikan untuk Dana Abadi Pendidikan Rp23,70 triliun serta masing-masing Rp1 triliun untuk Dana Abadi Penelitian, Dana Abadi Perguruan Tinggi, dan Dana Abadi Kebudayaan. Hingga

akhir 2025, pembiayaan ini telah dimanfaatkan untuk mendukung 3.707 proyek riset, serta penyaluran dana kepada 23 Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) dan 3.451 penerima untuk bidang kebudayaan. Jumlah penerima beasiswa LPDP tercatat 680.192 orang. Investasi ini menjadi bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah dalam memperkuat ekosistem pendidikan, riset, dan pengembangan sumber daya manusia.

Sektor Transportasi

Di sektor transportasi, pemerintah menyalurkan PMN kepada sejumlah BUMN untuk mendukung penyediaan dan peningkatan layanan transportasi publik serta penguatan industri pendukungnya.

PMN sebesar Rp1,8 triliun telah direalisasikan kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero)/PT KAI untuk pemenuhan setoran modal dalam rangka pengadaan sarana Kereta Rel Listrik (KRL) Jabodetabek, sebagai bagian dari upaya mendukung layanan kereta api perkotaan dan mobilitas masyarakat. Selain itu, PMN Rp0,5 triliun direalisasikan kepada PT Industri Kereta Api (Persero)/PT INKA yang digunakan untuk pengembangan kapasitas produksi bogie serta pengembangan sistem propulsi di pabrik PT INKA Madiun, dalam mendukung penyediaan sarana perkeretaapian dan penguatan industri nasional.

Pemerintah juga merealisasikan PMN Rp2,5 triliun kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)/PT PELNI yang dimanfaatkan untuk pembelian kapal dalam rangka pelaksanaan penugasan *Public Service Obligation* (PSO), guna mendukung layanan angkutan laut penumpang kelas ekonomi dan konektivitas antarwilayah.

Kerja Sama Internasional

Pada 2025, pemerintah melalui APBN melaksanakan penyertaan modal negara kepada tiga Lembaga Keuangan Internasional (LKI), yaitu *International Development Association* (IDA), *Islamic Development Bank* (IsDB), dan *International Fund for Agricultural Development* (IFAD), yang merupakan bagian dari komitmen Indonesia dalam mendukung pembiayaan pembangunan global sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam tata kelola lembaga multilateral.

Penyertaan modal kepada IDA tercatat Rp203,84 miliar (setara USD12,5 juta) untuk memenuhi komitmen IDA 19th dan 20th *Replenishment*, yang menegaskan kesinambungan kontribusi Indonesia meskipun telah berstatus *graduate country*. Sementara itu, penyertaan modal kepada IsDB mencapai Rp1,64 triliun (setara USD101,59 juta) melalui skema *General Capital Increase* dan *Special Capital Increase* untuk

memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan, khususnya di sektor pendidikan dan permukiman. Penyertaan modal kepada IFAD direalisasikan Rp49,07 miliar (setara USD3 juta) diarahkan untuk mendukung pembangunan pertanian dan perdesaan, pengurangan kerentanan, pembiayaan perubahan iklim, serta penguatan agenda inklusi sosial.

Penyertaan modal negara ini mencerminkan peran aktif Indonesia sebagai kontributor pembangunan global yang sejalan dengan kepentingan pembangunan nasional.

Sektor Infrastruktur

Pemerintah melakukan penambahan investasi nonpermanen kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero)/PT SMI Rp1,5 triliun. Investasi ini dikelola oleh PT SMI selaku OIP untuk mendukung pengembangan pembiayaan publik kepada pemerintah daerah, BLU, dan

BUMD. Penyaluran pembiayaan, untuk meningkatkan kapasitas pembiayaan pembangunan yang produktif dan berkelanjutan juga menghasilkan imbal hasil bagi pemerintah, dengan tetap mengedepankan tata kelola yang baik. Pembiayaan ini diharapkan mendorong penyediaan infrastruktur layanan dasar di daerah, pada sektor jalan, kesehatan, persampahan, air bersih, dan sektor prioritas lainnya.

Pembiayaan investasi dalam APBN 2025 sebagai instrumen kebijakan pembangunan, bukan sebagai solusi tunggal atas berbagai tantangan. Melalui pengelolaan yang terukur dan berkelanjutan, pemerintah menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan saat ini dan ketahanan fiskal ke depan. Pemerintah terus menjaga APBN yang sehat, kebijakan yang selaras dengan program prioritas, dan investasi negara yang dikelola secara bertanggung jawab untuk kesejahteraan bersama.



Foto: Muhammad_Ryan_Sasmika

Coretax dan Masa Depan Perpajakan Indonesia

Reformasi struktural bukan tentang perubahan cepat, melainkan tentang keberanian dalam membangun fondasi yang kokoh dan agar kebijakan fiskal tetap relevan di tengah perubahan ekonomi yang semakin kompleks. Dalam konteks reformasi fiskal, keberanian tersebut diwujudkan melalui pembenahan mendasar sistem administrasi perpajakan agar mampu menjawab tantangan kompleksitas ekonomi saat ini. Bagi DJP, pembenahan tersebut menjadi semakin mendesak seiring meningkatnya kompleksitas ekonomi, jumlah transaksi, serta tuntutan layanan publik yang cepat, transparan, dan akuntabel.

Sebelum 2018, sistem administrasi perpajakan DJP menghadapi tantangan mendasar. Teknologi informasi yang digunakan relatif out of date, basis data yang tersebar di berbagai unit/instansi vertikal, standar kualitas dan integritas data belum optimal, serta sistem konsolidasi seluruh proses inti administrasi perpajakan belum terintegrasi. Kondisi ini menjadi tantangan berat dalam merespons tuntutan organisasi dan ekspektasi masyarakat. Beban kerja meningkat sekitar dua kali lipat, yaitu secara agregasi sebanyak 568 juta 2016 menjadi 1.135 juta pada 2023. Beban kerja ini mencakup output e-faktur, SSP, SPT, e-Bupot, dan jumlah WP.

Selain beban kerja yang meningkat signifikan, DJP juga menghadapi kebutuhan pertukaran informasi yang semakin masif, sekaligus tuntutan untuk menjamin validitas, kerahasiaan, dan kecepatan arus data. Tantangan tersebut semakin kompleks dengan pesatnya perkembangan teknologi, seperti perubahan rekayasa keuangan dan bisnis, perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat (disruption), ancaman keamanan sistem, serta tren perkembangan transformasi digital di masa depan. Berangkat dari kondisi inilah, Coretax hadir sebagai sebuah sistem terintegrasi yang dirancang untuk memperkuat sistem perpajakan nasional.

Coretax merupakan proyek jangka panjang dan berkelanjutan, bukan proyek instan. Pada 2016, Pemerintah menginisiasi pembangunan Coretax dan menjadikannya sebagai agenda strategis jangka panjang hingga 2025. Melalui regulasi Kementerian Keuangan, pembentukan tim kerja, penyusunan perencanaan dokumen kerja, dan project management Coretax ditetapkan. Hal ini dilakukan selain mendukung proses kerja yang terarah, juga untuk menjaga tata kelola yang transparan dan akuntabel. Komitmen pembangunan Coretax semakin diperkuat melalui landasan hukum yang lebih tinggi, yaitu dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 40/2018. Regulasi ini juga mengatur skema penganggaran multi years contract, serta pengaturan tata kelola proyek yang ketat



Jaga Kredibilitas Tata Kelola

Dalam pembangunannya, DJP juga mendapat pendampingan dari institusi global yang kredibel sepanjang 2018-2020, seperti tim IT World Bank dalam penyiapan dokumen pengadaan, Prospera dan German Agency for International Cooperation (GIZ) dalam penyiapan transisi dokumen, dan World Bank, GIZ, serta Prospera dalam membangun kapasitas tim kerja (capacity building). Pada tahun 2020, demi pengembangan Coretax yang terfokus dan optimal, DJP menetapkan dedicated team melalui Keputusan Menteri Keuangan. Terakhir, pada 2021 s.d. 2025, DJP menyiapkan proses manajemen perubahannya sebagai dukungan paska-implementasi, diantaranya penyediaan fitur Go-Live (Saat Mulai Operasi/SMO), Post Implementation Support, Closing Kontrak, dan dukungan teknis lainnya seperti pengembangan surrounding environment.

Pemerintah menyadari besarnya skala dan risiko proyek, untuk itu pembangunan Coretax dijalankan dengan tata kelola yang ketat dan berlapis. Untuk memastikan pembangunan dan proses kerja Coretax yang cukup panjang dapat berjalan sebagaimana mestinya, setiap tahapan pembangunannya dilandasi regulasi sebagai dasar hukum. Hal ini mengokohkan keseriusan Pemerintah dalam memastikan bahwa reformasi sistem perpajakan tidak berhenti di tengah jalan. Meskipun dalam proses berjalan, DJP dihadapkan dengan tantangan teknis dan institusional yang berkembang dan mungkin di luar ekspektasi.

Tidak hanya itu, pembangunan Coretax ini diawasi dan didampingi berbagai lembaga pengawasan nasional, serta dukungan teknis dari lembaga internasional untuk akuntabilitas, transparansi, dan kredibilitas proyek di mata publik.

Untuk menjawab tantangan terhadap kompleksitas ekonomi, volume transaksi, serta tuntutan layanan

publik yang cepat dan transparan, Coretax dirancang dengan prinsip dan persyaratan yang komprehensif. Pembangunan Coretax mencakup 21 modul proses bisnis utama DJP dengan empat cluster utama, mulai dari 1) Layanan dan Pengumpulan Data, diantara meliputi pendaftaran, ekstensifikasi, pembayaran, pelaporan, dan pertukaran informasi, 2) Data Analytics, seperti Kepatuhan Wajib Pajak Berbasis Risiko, Business Intelligence, 3) Pengawasan dan Penegakan Hukum, seperti pengawasan, pemeriksaan, penilaian, penyidikan, intelijen Perpajakan, Keberatan dan Banding, dan terakhir 4) Pendukung, seperti sistem pengelolaan dokumen, pengelolaan kualitas data, dan pengelolaan pengetahuan (knowledge management).

Sistem ini juga dibangun dengan 1.344 persyaratan fungsional dan 111 persyaratan nonfungsional yang mencakup aspek performa, keamanan, ketersediaan, dan skalabilitas. Selain itu, sistem ini juga harus memenuhi prinsip interoperabilitas dengan sistem Internal Kemenkeu (beberapa diantaranya seperti CEISA, Wise Kemenkeu, LNSW, DJKN Lelang, dan SAKTI) dan Eksternal Kemenkeu (SIPINA-OJK, PLN, Dukcapil, PERURI, dan lain-lain). Hal ini untuk memastikan integrasi data lintas sistem, meningkatkan kepatuhan dan efisiensi, serta memperkuat pengawasan dan layanan perpajakan berbasis risiko dalam rangka mendukung kebijakan fiskal yang berkelanjutan. Persyaratan dan prinsip ini menunjukkan bahwa Coretax bukan sekadar digitalisasi layanan, melainkan transformasi menyeluruh atas cara kerja administrasi perpajakan.

Selanjutnya, DJP memilih pendekatan Commercial Off-The-Shelf (COTS) dikarenakan platform ini telah digunakan secara luas di berbagai negara. Beberapa negara yang telah menggunakan sistem COTS adalah Finlandia, New Zealand, Polandia, Australia, Kanada, Belanda, Prancis, Maroko, Estonia, Arab Saudi, India, Vietnam, Brasil, Meksiko, dan beberapa negara bagian di Amerika Serikat (South Carolina, North Carolina, Pennsylvania, Washington DC, Georgia, Kentucky).

Pilihan ini memungkinkan adopsi praktik terbaik administrasi perpajakan global, pemanfaatan teknologi yang telah matang, serta percepatan pembangunan sistem. Namun, pendekatan ini juga menuntut keberanian untuk melakukan penyesuaian proses bisnis dan regulasi agar selaras dengan desain sistem. Beberapa pelajaran penting dari penerapan COST di beberapa negara, sangat diperlukan komitmen kuat pimpinan, pembentukan tim khusus dengan dukungan memadai, serta penyesuaian regulasi dan proses bisnis yang adaptif dengan kondisi terbaru. Namun demikian, dengan pemanfaatan COTS, pengembangan sistem dan layanan digital ke depan menjadi lebih mudah dan efisien.

Transparansi Perbaikan Sistem

Seperti pengalaman berbagai negara pengguna, implementasi sistem COTS tidak terlepas dari pemasalahan pada tahap awal. Tantangan ini diakui sejak awal dan disertai dengan strategi mitigasi yang

jelas, termasuk pembelajaran dari praktik negara tersebut.

Transparansi dalam mengelola risiko menjadi bagian penting dari reformasi yang bertanggung jawab, sekaligus memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan.

Dengan Coretax, Wajib Pajak dan Negara diharapkan menerima berbagai manfaat secara konkret, seperti pengurangan penggunaan faktur pajak fiktif, pencegahan penyelewengan oleh wakil wajib pajak, khususnya WP Badan, serta pengendalian melalui pengaturan role access management. Selain itu, sistem ini mampu memperluas kanal perpajakan berbasis omni-channel melalui Portal Wajib Pajak, menyediakan profil dan riwayat transaksi 360 derajat, memudahkan pemantauan, dan menurunkan compliance cost.

Pengembangan Coretax DJP terus berjalan secara progresif. Dengan komitmen jangka panjang, tata kelola yang kuat, serta adopsi praktik global, Coretax merupakan investasi strategis untuk membangun sistem perpajakan Indonesia yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan. Coretax membuktikan reformasi fiskal Indonesia tidak sekadar direncanakan, tetapi dijalankan secara konsisten, transparan, dan berkelanjutan.

Permasalahan Implementasi Commercial Off-The-Shelf (COTS) di Berbagai Negara

Menjadi dasar pembelajaran bagi penerapan di Indonesia

Negara	Permasalahan
 INDIA	<ul style="list-style-type: none"> System breakdowns saat periode puncak pelaporan pajak, menyebabkan portal tidak dapat diakses. Pemrosesan lambat akibat server overload. Pesan kesalahan saat pencocokan faktur, membutuhkan intervensi manual.
 BRASIL	<ul style="list-style-type: none"> Data corruption saat pengiriman file XML. Kegagalan integrasi dengan sistem payroll lama. Kesalahan kriptografi pada tanda tangan digital.
 MEKSIKO	<ul style="list-style-type: none"> Kegagalan autentikasi untuk sertifikat digital. Downtime selama musim audit pajak. Aplikasi seluler mengalami crash saat mengunggah tanda terima.
 SELANDIA BARU	<ul style="list-style-type: none"> Keterlambatan performa dalam perhitungan pajak secara real-time. Aplikasi seluler crash setelah autentikasi biometrik. Pengembalian dana tertunda akibat batch processing bottlenecks.
 AUSTRALIA	<ul style="list-style-type: none"> Gangguan portal selama periode pelaporan akhir tahun keuangan. Sinkronisasi aplikasi seluler gagal dengan data perbankan. Data pre-filled tidak akurat untuk bisnis kecil.

Pengawasan Kepabeanaan Naik Kelas dengan Trade AI



Foto: Kementerian Keuangan

Arus perdagangan internasional tumbuh semakin cepat dan kompleks. Barang bergerak lintas negara dalam hitungan jam, dokumen berpindah dalam format digital, dan nilai transaksi membesar seiring integrasi ekonomi global. Di balik peluang tersebut, risiko juga meningkat. Manipulasi nilai transaksi, penyelundupan, dan pencucian uang berbasis perdagangan menjadi tantangan serius bagi banyak negara, termasuk Indonesia.

Kementerian Keuangan, dalam hal ini Bea Cukai, melihat perubahan ini sebagai sinyal kuat bahwa pengawasan kepabeanaan tidak bisa lagi bergantung pada pendekatan konvensional. Pengawasan berbasis dokumen manual dan data historis terbatas semakin sulit mengejar modus kejahatan yang adaptif dan lintas yurisdiksi. Di sinilah transformasi digital memainkan peran kunci. Salah satu langkah strategis yang kini disiapkan adalah *Trade AI*, sistem berbasis kecerdasan artifisial untuk memperkuat pengawasan impor, khususnya dalam

mendeteksi praktik *under-invoicing* dan *over-invoicing*.

Manipulasi nilai transaksi atau *misinvoicing* bukan isu abstrak. Praktik ini berdampak langsung pada penerimaan negara dan stabilitas ekonomi. *Under-invoicing* digunakan untuk menekan bea masuk dan Pajak Dalam Rangka Impor (PDRI). Sementara *over-invoicing* kerap menjadi pintu masuk praktik pencucian uang dan pelarian modal. Berbagai kajian menunjukkan bahwa kerugian fiskal akibat praktik ini mencapai puluhan miliar dolar AS setiap tahun. Angka tersebut mencerminkan besarnya potensi kebocoran yang harus ditutup melalui pengawasan yang lebih presisi.

Penelitian nilai pabean sangat bergantung pada enam metode penetapan yang dilakukan secara berurutan. Meski telah didukung sistem CEISA 4.0, petugas di lapangan menghadapi keterbatasan data pembanding harga global, tekanan waktu pelayanan, serta belum terintegrasinya data eksternal seperti marketplace dan *market intelligence*. Akibatnya, indikasi harga “terlalu rendah” atau

“terlalu tinggi” sering kali belum disertai gambaran seberapa besar disparitas terhadap harga pasar yang sebenarnya.

Transformasi Digital sebagai Fondasi

Transformasi digital di lingkungan Bea Cukai Kementerian Keuangan lahir dari kebutuhan struktural. Perdagangan lintas batas meningkat, ekspektasi pengguna jasa semakin tinggi, dan negara dituntut menjaga penerimaan sekaligus kelancaran arus barang. Dalam konteks ini, teknologi diposisikan sebagai fondasi tata kelola dan CEISA 4.0 menjadi pilar utama transformasi tersebut.

Dengan arsitektur *microservices*, sistem CEISA 4.0 memungkinkan integrasi menyeluruh dan pertukaran data secara *real-time* dari hulu ke hilir, mulai dari impor, ekspor, cukai, logistik, perizinan, hingga analitik. Integrasi dengan perbankan, pelabuhan, LNSW, NLE, dan sistem pemerintah lainnya membuat alur pelayanan lebih cepat dan transparan. Di atas fondasi inilah *Trade AI* dibangun sebagai penguat fungsi pengawasan.

Trade AI dirancang menjadi ekosistem agentik AI yang mendukung proses pengawasan secara menyeluruh. Mekanisme pengawasan dimulai sejak tahap awal melalui AI Agent Risk and Profiling. Agen ini bekerja dalam senyap menyelami rekam jejak importir di masa lalu serta dapat mengendus pola kepatuhan dan mendeteksi anomali perilaku dari transaksi yang dilakukan oleh importir. Ketika dokumen transaksi diajukan, rangkaian agen validasi langsung bekerja secara simultan. AI Agent Document Validation bertugas

bertugas mengekstraksi dan memvalidasi data dari invoice, packing list serta dokumen angkutan.

Proses ini diperkuat oleh AI Agent Classification untuk membantu memastikan ketepatan klasifikasi HS Code dengan penjelasan logis serta AI Agent Certificate of Origin Analysis yang memverifikasi keabsahan Surat Keterangan Asal Barang. Di sisi finansial, AI Agent Customs Valuation berperan vital mendeteksi indikasi *under* dan *over-invoicing* berbasis data historis dan perbandingan harga pasar global

Pengawasan kemudian berlanjut ke aspek fisik dan logistik. Untuk memastikan kebenaran muatan, AI Agent Logistic and Cargo bertugas memonitor kesesuaian volume dan berat muatan serta menjaga agar tidak ada kontainer yang “lebih berat” atau “lebih ringan” dari seharusnya sebagai indikator phantom shipping. Teknologi ini dilengkapi dengan pengembangan AI Agent X-Ray yang mencocokkan hasil pemindaian visual kontainer dengan uraian barang dalam dokumen sehingga anomali visual yang sulit ditangkap secara manual dapat terdeteksi lebih dini

Sebagai penutup rangkaian pengawasan, AI Agent Inspection bertugas melakukan *cross check* antara data hasil pemeriksaan fisik petugas di lapangan dengan dokumen pemberitahuan dan memastikan secara otomatis bahwa fisik barang yang ditemukan benar-benar sesuai dengan apa yang dideklarasikan. Seluruh agen tersebut terhubung dalam satu dasbor nasional yang menyajikan profil risiko per importir, per barang, per kontainer dan per rute perdagangan, menciptakan siklus pengawasan yang tertutup rapat dan terintegrasi

Keunggulan utama *Trade AI* terletak pada kemampuannya mengolah big data perdagangan. Sistem memanfaatkan jutaan baris data impor riil yang telah ditetapkan, lalu mengombinasikannya dengan data eksternal. Algoritma seperti analisis teks uraian barang, pengelompokan komoditas, dan deteksi anomali digunakan untuk mengidentifikasi pola yang menyimpang dari kewajaran.

Trade AI mampu mengenali beberapa pola utama kejahatan berbasis perdagangan, antara lain anomali harga, *phantom shipping* (ketidaksesuaian berat dan nilai), pemecahan transaksi, serta pergeseran perilaku impor yang ekstrem dan mendadak. Setiap transaksi dianalisis secara simultan dan diberi penanda risiko yang dilengkapi penjelasan. Pendekatan ini membantu petugas mengambil keputusan berbasis data, bukan sekadar intuisi.

Agar *Trade AI* berjalan optimal, Bea Cukai Kementerian Keuangan menyiapkan tiga pilar utama. Pertama, integrasi data lintas unit di lingkungan Kementerian Keuangan, termasuk data faktur pajak dan laporan keuangan, untuk validasi nilai transaksi. Kedua, pemanfaatan data eksternal global, seperti statistik perdagangan internasional dan data marketplace, sebagai pembanding harga pasar. Ketiga, infrastruktur komputasi berkapasitas besar, termasuk penyediaan GPU dan data lake nasional, agar pemodelan AI berjalan cepat dan akurat.

Namun teknologi saja tidak cukup. Penguatan regulasi menjadi kunci agar hasil analisis AI memiliki kepastian hukum. Petugas perlu landasan yang jelas untuk menindaklanjuti peringatan sistem tanpa ragu, sekaligus terlindungi dari risiko kriminalisasi. Dengan demikian, AI berfungsi sebagai sistem pendukung keputusan yang memperkuat akuntabilitas.

Komitmen perubahan ini ditegaskan langsung oleh Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa. “Transformasi digital di kepabeanaan bukan pilihan. Ini keharusan. Kita harus menjaga kepercayaan publik, daya saing ekonomi, dan memerangi penyelundupan dengan cara yang lebih modern,” tegasnya dalam Konferensi Pers Peluncuran *Trade AI* di Pelabuhan Tanjung Priok, pada 12 Desember 2025. Ia juga menekankan perubahan paradigma pelayanan dan pengawasan, “Saya ingin adanya perubahan. Dulu urusan di Bea Cukai bikin deg-degan. Sekarang yang deg-degan justru oknum penyelundup.”

Mengenai *Trade AI*, Menkeu menyatakan, “Berikutnya kita siapkan *Trade AI*. Sistem berbasis kecerdasan artifisial untuk memperkuat pengawasan impor.” Sistem ini diharapkan membuat pengawasan lebih tajam, keputusan lebih cepat, dan pelayanan tetap terjaga.

Dampak Nyata bagi Pengguna Jasa Transformasi digital ini tidak hanya dirasakan di sisi pengawasan, tetapi juga oleh dunia usaha. Ketua Asosiasi Pengusaha Kawasan Berikat (APKB), Iwa Koswara, dalam wawancara dengan Majalah Warta Bea Cukai Edisi Desember 2025 menyampaikan bahwa sistem IT Bea Cukai saat ini jauh lebih efektif dan efisien. Integrasi sistem kepabeanaan dengan sistem internal perusahaan membuat proses bisnis lebih sederhana dan terkontrol. Digitalisasi membantu pengguna jasa fokus pada kegiatan usaha, bukan pada proses administratif yang berbelit.

Transformasi digital yang mulai dirasakan dunia usaha tersebut pun menjadi fondasi penting untuk melangkah lebih jauh. Efisiensi dan kepercayaan yang terbentuk mendorong Kementerian Keuangan memperluas penerapan sistem secara bertahap agar manfaatnya dapat dirasakan merata di seluruh Indonesia. Pengembangan *Trade AI* dilakukan bertahap. Tahun 2025 difokuskan pada analisis kebutuhan dan pengembangan awal. Awal 2026 dilakukan piloting di beberapa kantor pelayanan. Pada pertengahan 2026, sistem ditargetkan diterapkan secara nasional. Pendekatan bertahap ini memastikan kesiapan infrastruktur, kualitas model, dan kompetensi sumber daya manusia.

Trade AI pun menjadi strategi negara untuk menutup kebocoran penerimaan, melawan kejahatan keuangan lintas negara, dan membangun pengawasan kepabeanaan yang modern. Di masa depan, keputusan pengawasan tidak lagi hanya bertumpu pada pengalaman, tetapi juga diperkuat analisis jutaan data perdagangan global dalam hitungan detik. Inilah wajah baru pengawasan kepabeanaan Indonesia yang semakin adaptif, berbasis data, dan siap menjaga kepentingan negara serta masyarakat.

APBN 2025 Dioptimalkan dan Program Stimulus Dijalankan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Secara Merata

Dalam APBN 2025, Asta Cita menjadi kerangka paradigma pembangunan yang menempatkan ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, hilirisasi, dan penguatan ekonomi kerakyatan sebagai fokus utama. Seiring itu, APBN 2025 menjalankan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo, seperti penguatan ketahanan pangan, percepatan peningkatan kualitas SDM (termasuk dukungan agenda makan bergizi), penguatan perlindungan sosial yang lebih tepat sasaran, serta dukungan bagi pertahanan-keamanan dan hilirisasi/industrialisasi untuk mendorong nilai tambah. Seluruh upaya tersebut dilaksanakan di tengah kendala dan ketidakpastian global, meliputi perlambatan ekonomi dunia, tensi geopolitik dan gangguan rantai pasok, volatilitas harga komoditas, yang menuntut APBN 2025 tetap adaptif, hati-hati, dan responsif agar stabilitas ekonomi dan daya beli masyarakat tetap terjaga. APBN 2025 kemudian berperan sebagai instrumen fiskal untuk mendukung agenda tersebut secara bertahap dan terukur.

Pada awal 2025 (22 Januari 2025) Presiden menetapkan Inpres Nomor 1/2025 tentang efisiensi belanja pemerintah pusat dan daerah. Kebijakan pelaksanaan efisiensi belanja K/L TA 2025 pada prinsipnya merupakan upaya prioritas anggaran sesuai arahan Presiden dan amanat konstitusi (Pasal 33 UUD 1945) agar belanja negara dikelola secara efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan. Efisiensi dilakukan dengan “menyisir” belanja yang kurang prioritas, seperti perjalanan dinas, kegiatan seremonial/rapat, ATK, seminar, kajian, dan pengadaan non-esensial, tanpa mengganggu belanja pegawai, belanja operasional esensial, pelayanan dasar, serta bantuan sosial. Ruang fiskal yang dihasilkan kemudian direalokasikan untuk mendukung belanja yang lebih berdampak dan menjadi prioritas pemerintah, antara lain Sekolah Rakyat, revitalisasi madrasah, program cetak sawah, serta peningkatan/rehabilitasi rumah sakit. Untuk memastikan layanan tetap berjalan optimal, pemerintah juga menyiapkan langkah mitigasi melalui pembukaan blokir secara selektif, mekanisme penyesuaian melalui ABT, dan penerapan prinsip kehati-hatian fiskal agar efisiensi tetap tepat sasaran serta tidak menimbulkan gangguan pada pelaksanaan program prioritas dan pelayanan publik.

APBN dioptimalkan sebagai *shock absorber* sekaligus

mendukung agenda pembangunan nasional untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah juga meluncurkan berbagai paket stimulus ekonomi yaitu :

Paket Stimulus Ekonomi Tahap I (Januari-Februari 2025)

Stimulus ekonomi tahap I sebesar Rp33 triliun yang ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat dan dunia usaha, antara lain berupa diskon listrik, Pajak Pertambahan Nilai ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Perumahan, PPN DTP Tiket Pesawat/ stimulus Hari Besar Keagamaan Nasional, bantuan diskon premi Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), peningkatan aksesibilitas Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), pembiayaan industri padat karya serta insentif otomotif. Paket stimulus ekonomi ini ditujukan untuk berbagai kalangan. Paket kebijakan ekonomi untuk masyarakat berpenghasilan rendah diberikan melalui program diskon listrik. Berbagai kebijakan di atas diharapkan akan menjadi mewujudkan stabilitas ekonomi dan meningkatkan konsumsi masyarakat. Sehingga dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sebagaimana



Foto: Kementerian Keuangan

Paket Stimulus Ekonomi Tahap III (September 2025)

Stimulus ekonomi Tahap III sebesar Rp15,6 triliun ditujukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, antara lain berupa diskon iuran JKK dan JKM, PPh pasal 21 sektor pariwisata, bantuan pangan, serta perpanjangan jangka waktu PPh final 0,5 persen bagi WP UMKM.

Paket Stimulus Ekonomi Tahap IV (Oktober-Desember 2025)

Stimulus ekonomi Tahap IV sebesar Rp37,4 triliun ditujukan untuk menjaga daya beli, mendorong aktivitas ekonomi dan pemberdayaan generasi muda,

antara lain berupa program magang nasional dengan target 100 ribu peserta, bantuan langsung tunai sementara (BLTS) serta diskon tiket transportasi selama periode Natal dan Tahun Baru.

Pemerintah juga memberikan respons yang cepat dan terukur untuk menangani bencana di Sumatera. Dukungan fiskal dirancang secara fleksibel agar dapat mendukung pemulihan, mulai dari tanggap darurat hingga rehabilitasi dan rekonstruksi antara lain melalui percepatan penyaluran dana darurat bantuan masyarakat, menyiagakan Dana Siap Pakai (DSP) dan Cadangan Bencana baik tahun 2025 dan 2026, relaksasi penyaluran TKD, percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, dan menyiagakan pooling fund bencana.

Dari TPG sampai dengan Penanganan Bencana, TKD Hadir untuk Masyarakat Daerah

Pemerintah melakukan penyempurnaan kebijakan penyaluran Tunjangan Profesi Guru Aparatur Sipil Negara Daerah (TPG ASND) melalui mekanisme penyaluran langsung ke rekening guru mulai 2025. Kebijakan ini menjawab permasalahan yang selama ini dihadapi dalam proses penyaluran TPG, seperti keterlambatan pencairan dan kendala administrasi di daerah, sehingga guru memperoleh kepastian waktu penerimaan haknya secara lebih tepat dan transparan.

Hingga akhir 2025, realisasi penyaluran TPG ASND mencapai Rp67,3 triliun atau hampir 100 persen APBN, meningkat 28,9 persen (yoy), dengan menjangkau sekitar 1,5 juta guru di seluruh Indonesia. Penyaluran langsung TPG mencerminkan komitmen pemerintah dalam memperkuat tata kelola belanja pendidikan sekaligus memastikan kesejahteraan guru sebagai bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia.

Dana Desa dan Koperasi Desa Merah Putih

Dalam rangka mendukung percepatan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih (KDKMP) Pemerintah mengatur syarat penyaluran Dana Desa Tahap II dengan tetap menjaga tata kelola yang baik. Selain mengatur mengenai syarat salur Dana Desa tersebut, diatur pula mengenai pengendalian fiskal melalui Dana Desa yakni kebijakan yang diterapkan berupa penghentian penyaluran sebagian sisa Dana Desa di Rekening Kas Umum Negara (RKUN), khususnya terhadap Dana Desa yang tidak ditentukan penggunaannya Tahap II 2025.

Kurang Bayar Dana Bagi Hasil (KB DBH)

Pada 2025 Pemerintah mengupayakan untuk menyelesaikan sebagian dari KB DBH sampai dengan Tahun Anggaran 2023. Jumlah penyaluran yang diselesaikan sebesar Rp18,5 triliun, yang dilakukan secara tunai ke RKUD.

KB DBH ditetapkan dalam suatu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) untuk menjaga tata kelola di sisi penganggaran APBN. Penetapan KB DBH dan LB DBH merupakan pengakuan atas utang-piutang Pemerintah. Adapun penyaluran KB DBH dilakukan dengan memperhatikan kemampuan keuangan negara dan dapat memperhitungkan penyelesaian lebih bayar DBH (LB DBH).

Tambahan DAU untuk THR dan Gaji 13 ASND

Total tambahan DAU 2025 dialokasikan Rp7,7 triliun yang disalurkan untuk 333 Pemerintah Daerah, meliputi 16 provinsi, 265 kabupaten dan 52 kota. Alokasi Tambahan DAU untuk masing-masing daerah tersebut termasuk di dalamnya alokasi untuk THR dan Gaji-13 Guru Agama ASND pada Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Tahun Anggaran 2025. Seluruh alokasi Tambahan DAU Tahun Anggaran 2025 telah disalurkan ke RKUD sebelum akhir tahun anggaran. Pemerintah Daerah yang menerima penyaluran Tambahan DAU diwajibkan untuk menganggarkan dan merealisasikan pembayaran komponen THR dan Gaji-13 tersebut kepada masing-masing guru ASND pada 2025, dengan ketentuan apabila tidak direalisasikan pada 2025,



Foto: shutter

pemerintah daerah wajib menganggarkan kembali dan merealisasikan pada tahun anggaran berikutnya.

Relaksasi penyaluran TKD untuk daerah bencana, 3 Provinsi di Sumatera

Sebagai bentuk dari dukungan dan kehadiran pemerintah, dalam rangka percepatan penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana alam berupa banjir, banjir bandang, dan tanah longsor

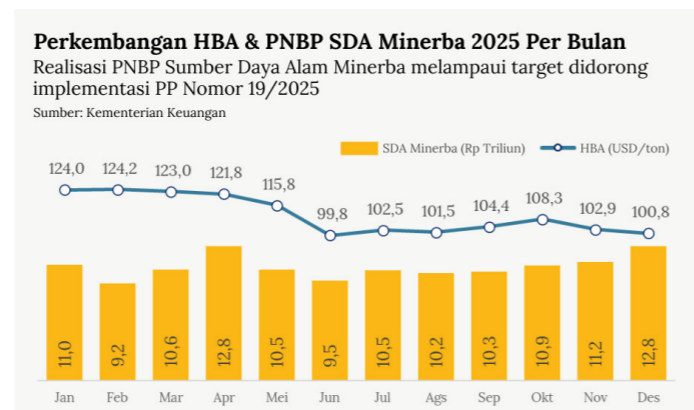
yang telah menimbulkan korban jiwa, kerusakan infrastruktur, serta kerugian material yang signifikan di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat, telah ditetapkan relaksasi kebijakan TKD untuk Tahun Anggaran 2025 dan Tahun Anggaran 2026.

Untuk 2025, relaksasi diberikan kepada 50 daerah terdampak (3 provinsi, 47 kabupaten/kota) dan Daerah lain di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh BNPB berdasarkan penetapan status keadaan darurat bencana oleh Kepala Daerah, meliputi: DAU, DBH, DAK Fisik, DAK Nonfisik, Hibah ke Daerah, Dana Otonomi Khusus, Dana Insentif Fiskal, dan Dana Desa. Untuk Dana Desa, total Dana Desa earmarked Tahap II yang disalurkan dalam rangka relaksasi ini pada 2025 mencapai Rp8,13 miliar dan diberikan kepada 37 desa di wilayah terdampak bencana. Relaksasi ini memungkinkan penyesuaian penyaluran dan/atau penggunaan anggaran sesuai kebutuhan penanganan bencana, dan pemberian relaksasi Pinjaman PEN Daerah, berupa perpanjangan tenor/jangka waktu pinjaman yang bertujuan menjaga ruang fiskal daerah agar tetap mampu membiayai penanganan darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi pascabencana

Penyusunan Regulasi di Tengah Moderasi Harga Telah Mendongkrak PNBP

Di tengah harga batubara acuan (HBA) yang cenderung menurun dan volume produksi yang juga tidak setinggi tahun sebelumnya, capaian PNBP dari Sumber Daya Alam Minerba justru tetap mampu bertahan, bahkan meningkat. Realisasi sementara PNBP hingga Desember 2025, SDA Minerba mencapai Rp130,2 triliun atau 104,4 persen dari Target. Salah satu kuncinya adalah terbitnya PP Nomor 19/2025 yang mengatur ulang jenis dan tarif PNBP di sektor mineral dan batubara

PP ini menjadi bukti bahwa penerimaan negara tidak hanya bergantung pada harga dan volume produksi, tetapi juga pada desain kebijakan yang tepat. Dengan sistem tarif yang lebih adaptif dan sumber penerimaan yang lebih beragam, negara tetap bisa memperoleh hasil optimal meski kondisi pasar tidak selalu menguntungkan.



Perubahan besar terjadi pada skema royalti. Jika sebelumnya banyak komoditas memakai tarif tetap, sekarang tarif dibuat progresif. Semakin tinggi

harga mineral di pasaran, maka semakin besar pula kontribusinya ke negara. Skema ini diterapkan pada komoditas seperti nikel, emas, tembaga, dan timah. Dengan tarif ini, saat harga melonjak negara ikut menikmati hasilnya. Sebaliknya saat harga turun, beban pelaku usaha tidak terlalu berat.

Untuk batubara, tarif juga disesuaikan agar tetap seimbang antara keberlanjutan usaha dan penerimaan negara. Bahkan, bagi perusahaan yang mengolah batubara menjadi produk bernilai tambah, pemerintah memberi ruang insentif berupa kemungkinan royalti nol persen untuk volume tertentu. Hal ini sejalan dengan kebijakan hilirisasi agar sumber daya alam tidak hanya dijual mentah, tetapi diolah di dalam negeri.

Dampak kebijakan ini mulai terlihat sejak PP tersebut berlaku pada akhir April 2025. Meski HBA turun dan produksi batubara tidak setinggi sebelumnya, penerimaan PNBP SDA Minerba justru tumbuh. Skema tarif baru yang lebih responsif terhadap harga,

ditambah sumber-sumber PNBP baru, membuat penerimaan negara tidak terlalu bergantung pada satu komoditas saja.

Dengan demikian, PP Nomor 19/2025 berhasil “mendongkrak” PNBP lewat dua cara. Pertama, memperbaiki struktur tarif agar lebih adil dan adaptif. Kedua, memperluas basis penerimaan melalui jenis-jenis PNBP baru. Kebijakan ini menunjukkan bahwa kekuatan penerimaan negara tidak hanya ditentukan oleh kondisi pasar, tetapi juga oleh kecerdasan dalam merancang aturan.

Pada akhirnya, PP Nomor 19/2025 adalah salah satu upaya Pemerintah dalam memastikan kekayaan alam Indonesia dikelola dengan lebih modern dan berkelanjutan. Negara mendapat penerimaan yang optimal, sedangkan dunia usaha memperoleh kepastian, begitu pula masyarakat bisa menikmati hasilnya dalam bentuk pembangunan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Komoditas	Tarif Awal	Tarif Menurut PP No.19/2025
Ni Nickel Bijih Nikel	Single Tarif 10% Kecuali Industri KBLBB 2%	Tarif progresif 14% -19% menyesuaikan HMA kecuali industri KBLBB Terintegrasi 2%
Ni Nickel Nikel Matte	Single Tarif 2% Windfall Profit tambah 1%	Tarif progresif 3,5% -5,5% menyesuaikan HMA
Fe-Ni Ferro-nickel Ferro Nikel	Single Tarif 2%	Tarif progresif 4% -6% menyesuaikan HMA
Au Gold Emas	Tarif progresif 3,75%-10% menyesuaikan HMA	Tarif progresif 7% -16% menyesuaikan HMA
Ag Silver Perak	Single Tarif 3,25%	Single Tarif 5%
Cu Copper Bijih Tembaga	Single Tarif 5%	Tarif progresif 10% -17% menyesuaikan HMA
Cu Copper Konsentrat Tembaga	Single Tarif 4%	Tarif progresif 7% -10% menyesuaikan HMA
Cu Copper Katoda Tembaga	Single Tarif 2%	Tarif progresif 4% -7% menyesuaikan HMA
C Coal Batubara	Tarif 5% -13,5%	Tarif Royalti naik 1% untuk HBA ≥ USD 90 sampai tarif maksimum 13,5%
Sn Timah	Single Tarif 3%	Tarif progresif 3% s.d 10%

Inovasi SBN, Memperluas Akses, Memperdalam Pasar dan Menjaga Keberlanjutan Pembiayaan

Dalam memenuhi kebutuhan pembiayaan APBN, SBN menjadi instrumen utama pembiayaan utang Pemerintah. Per akhir September 2025, posisi *outstanding* SBN mencapai Rp8.187,55 triliun atau sekitar 87,0 persen dari total utang pemerintah. Pada 2025, realisasi pembiayaan utang melalui SBN neto tercatat sebesar Rp639,3 triliun, dari total pembiayaan utang neto sebesar Rp736,29 triliun.

Sejalan dengan kebutuhan pembiayaan yang terus berkembang serta dinamika pasar keuangan, Pemerintah secara konsisten memperkuat inovasi dalam pengelolaan dan penerbitan SBN. Upaya tersebut diarahkan untuk meningkatkan efisiensi biaya pembiayaan, memperdalam pasar keuangan domestik, serta memperluas dan melakukan diversifikasi basis investor, sehingga dapat mendukung pembiayaan APBN yang lebih resilien dan berkelanjutan.

SBN Ritel Mendorong Partisipasi Publik dan Inklusi Keuangan

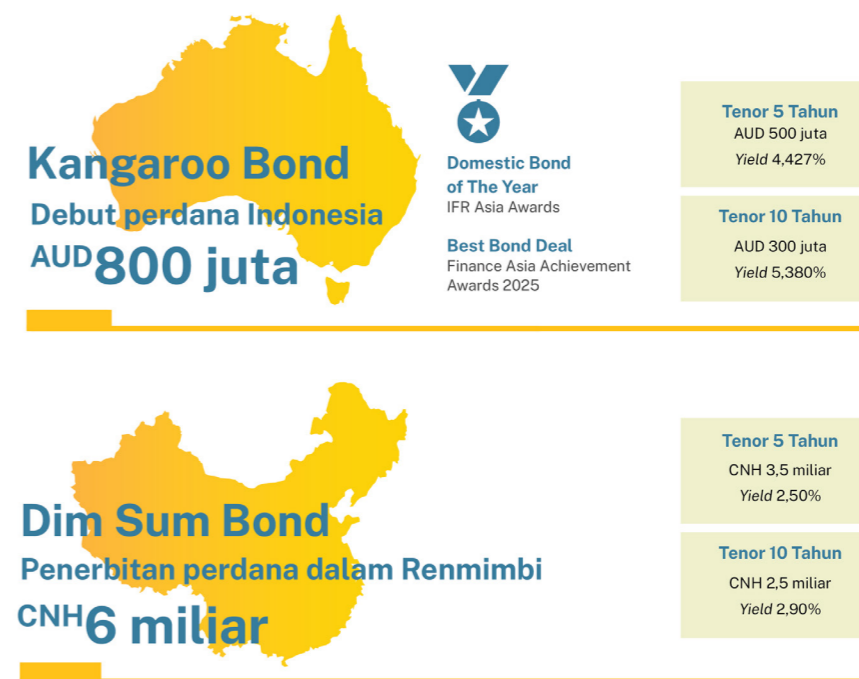
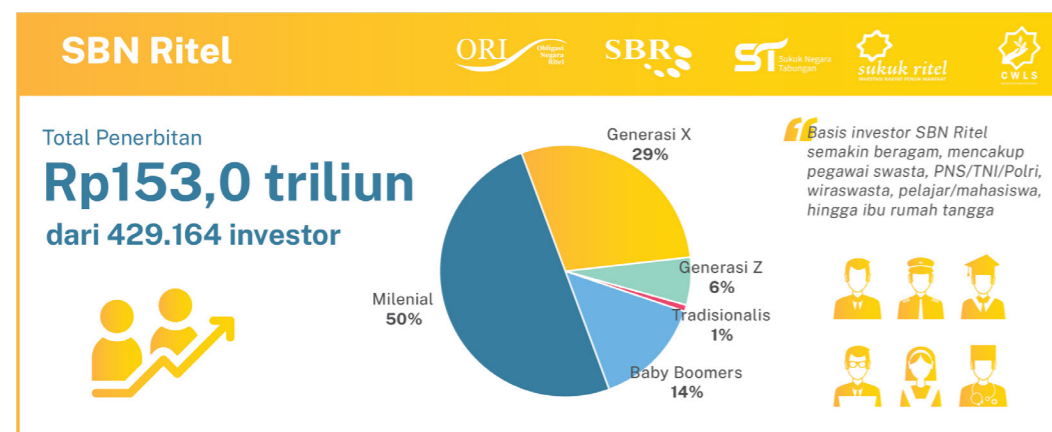
Di antara berbagai instrumen SBN, SBN Ritel menunjukkan perkembangan yang pesat. Selain berkontribusi langsung dalam pembiayaan APBN, SBN Ritel juga berperan sebagai alternatif instrumen investasi bagi masyarakat. SBN Ritel merupakan SBN yang diterbitkan Pemerintah dan ditawarkan kepada individu Warga Negara Indonesia (WNI), dengan karakteristik yang relatif aman dan terjangkau. Melalui skema ini, masyarakat tidak hanya memperoleh potensi imbal hasil yang kompetitif, tetapi juga

dapat berpartisipasi langsung dalam pembiayaan pembangunan nasional.

Sejak pertama kali diterbitkan melalui ORI001 pada 2006, SBN Ritel terus tumbuh signifikan, baik dari sisi nominal penerbitan maupun jumlah investor. Hingga tahun 2025, total investor SBN Ritel telah melampaui 1 juta investor, dengan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Perkembangan ini tak lepas dari upaya pemerintah dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan, memperluas basis investor domestik, memperkuat kemandirian pembiayaan melalui edukasi dan sosialisasi, serta mengembangkan instrumen dan mekanisme penerbitan SBN Ritel yang semakin adaptif.

Salah satu inovasi utama dalam pengembangan SBN Ritel adalah pemanfaatan platform elektronik (e-SBN). Melalui e-SBN, masyarakat dapat melakukan pemesanan SBN Ritel secara daring, kapan pun dan di mana pun selama masa penawaran. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan aksesibilitas, memperluas jangkauan investor, serta memperkuat transparansi melalui mekanisme *first come, first served*, sehingga SBN Ritel menjadi salah satu instrumen investasi yang diminati.

Untuk mengakomodasi preferensi investor yang semakin beragam, pemerintah terus mengembangkan variasi jenis dan fitur SBN Ritel. Hingga saat ini, terdapat lima jenis SBN Ritel, yaitu Obligasi Negara Ritel (ORI), Sukuk Ritel (Sukri), *Savings Bond Ritel* (SBR), Sukuk Tabungan (ST), serta Sukuk Wakaf Ritel (SWR). Selain itu, sejak 2023 Pemerintah memberikan opsi dual tenor dalam setiap kali penerbitan, yang



memberikan fleksibilitas bagi investor dalam memilih jangka waktu investasi sesuai kebutuhan.

Sepanjang 2025, Pemerintah telah menerbitkan 8 (delapan) seri SBN Ritel dengan total penerbitan sebesar Rp153,0 triliun, menjangkau 429.164 investor, termasuk Sukuk Wakaf Ritel seri SWR006 dengan total penerbitan Rp306 miliar yang berasal dari 799 wakif.

Hal ini menunjukkan tren pertumbuhan yang positif, baik dari sisi nominal penerbitan maupun partisipasi investor, yang mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap SBN Ritel sebagai instrumen investasi.

Dari sisi demografi, investor usia muda mendominasi kepemilikan SBN Ritel, dengan kontribusi investor milenial sebesar 50 persen dan Generasi Z sebesar 6 persen. Sementara itu, dari sisi profesi, basis investor SBN Ritel semakin beragam, mencakup pegawai swasta, PNS/TNI/Polri, wiraswasta, pelajar/mahasiswa, hingga ibu rumah tangga. Kondisi ini menunjukkan bahwa SBN Ritel telah menjangkau lapisan masyarakat yang semakin luas dan beragam, sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat inklusi keuangan dan partisipasi publik dalam pembiayaan negara.

Thematic Bond mendukung Komitmen terhadap Pembiayaan Berkelanjutan

Sejalan dengan komitmen untuk mendorong pembiayaan berkelanjutan yang memberikan dampak terukur bagi lingkungan, sosial, dan perekonomian jangka panjang, pemerintah melakukan pengembangan kerangka pembiayaan berkelanjutan secara bertahap dan konsisten. Dimulai dengan penerapan climate budget tagging pada 2016, pemerintah kemudian menerbitkan *Green and Green Sukuk Framework* pada

Januari 2018, serta *SDGs Framework* pada 2021.

Selain itu, seiring meningkatnya perhatian investor yang semakin mempertimbangkan aspek keberlanjutan dalam keputusan investasinya, pemerintah mengembangkan *thematic bonds*/sukuk sebagai bagian dari inovasi pembiayaan SBN. Dalam kerangka tersebut, pemerintah mengembangkan berbagai instrumen *thematic bonds*, antara lain *Green Sukuk*, *SDGs Bond*, dan *Blue Bond*, yang masing-masing memiliki fokus pemanfaatan yang spesifik dan sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Green Sukuk diarahkan untuk membiayai proyek-proyek ramah lingkungan, seperti energi terbarukan, efisiensi energi, pengelolaan limbah, serta mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Indonesia memulai penerbitan *Green Sukuk* sejak 2018, dan secara konsisten mengembangkannya di pasar internasional maupun domestik. Selain melalui penerbitan global dan lelang domestik, *Green Sukuk* juga ditawarkan kepada masyarakat melalui SBN Ritel, khususnya Sukuk Tabungan.

Penerbitan *SDGs Bond* bertujuan untuk mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) secara lebih komprehensif. Pemerintah menerbitkan *SDGs Bond* pertama pada 2021, yang menjadi tonggak penting dalam penguatan kerangka pembiayaan berkelanjutan Indonesia. Pada 2024, tema *SDGs* diperluas ke dalam SBN Ritel melalui penerbitan ORI026. Selanjutnya, pada 2025, Pemerintah kembali menerbitkan *SDGs Bond* di pasar internasional melalui penerbitan SUN Valas berdenominasi Euro. Penerbitan *SDGs Bond* tersebut mencatatkan hasil yang baik, tercermin dari orderbook lebih dari EUR1,2 miliar, dengan final yield sebesar 3,752 persen.

Sementara itu, *Blue Bond* dikembangkan untuk mendukung pembiayaan kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya kelautan dan perairan secara berkelanjutan, termasuk perlindungan ekosistem laut dan ketahanan wilayah pesisir. Pemerintah memulai penerbitan *Blue Bond* pada 2023 melalui Samurai Bond di pasar Jepang, dan hingga kini terus melanjutkan penerbitannya secara konsisten sebagai bagian dari penguatan pembiayaan berkelanjutan dan diversifikasi basis investor.

Atas penerbitan berbagai *thematic bonds* tersebut, Pemerintah secara konsisten memenuhi standar internasional dalam penerbitan obligasi tematik, antara lain melalui penerapan kerangka pembiayaan berkelanjutan yang selaras dengan praktik global, serta penyusunan laporan alokasi dan dampak (*allocation and impact reporting*) secara berkala guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kredibilitas pembiayaan negara kepada investor.

Pengembangan Pasar SBN Valas sebagai Diversifikasi dan Pendalaman Investor Global

Dalam rangka pengembangan pasar dan perluasan basis investor global, Pemerintah terus melakukan diversifikasi instrumen pembiayaan melalui penerbitan SBN valas. Pada 2025, Pemerintah melakukan penerbitan perdana SBN valas di pasar Australia dan Tiongkok sebagai bagian dari strategi diversifikasi. Pada Agustus 2025, Pemerintah menerbitkan *Kangaroo Bond* dalam denominasi dolar Australia (AUD) melalui program *Australian Medium-Term Notes (AMTN)*. Penerbitan ini merupakan langkah strategis yang tidak hanya mendukung diversifikasi pembiayaan APBN, tetapi juga memperluas basis investor dan memperkuat kerja sama ekonomi antara Indonesia dan Australia. Hasil penerbitan *Kangaroo Bond* mencatatkan minat investor yang sangat kuat, tercermin dari total permintaan yang mencapai sekitar AUD8,02 miliar, atau mengalami *oversubscription* sekitar 10 kali dari target penerbitan. Selain itu, timing penerbitan yang tepat memungkinkan Pemerintah memperoleh harga yang kompetitif, tercermin dari posisi yield yang berada di dalam kurva USD (4,427 persen untuk tenor 5 tahun dan 5,380 persen untuk tenor 10 tahun).

Pemerintah mengalokasikan sepertiga porsi penerbitan kepada investor Australia, guna memperkuat basis investor domestik Australia dan membuka peluang investasi lanjutan dari investor Australia. Selain itu, penerbitan *Kangaroo Bond* juga diharapkan dapat menjadi acuan bagi penerbitan obligasi korporasi di pasar Australia.

Selain *Kangaroo Bond*, Pemerintah juga mengembangkan pasar SBN valas melalui penerbitan *Dim Sum Bond* dalam denominasi *Chinese Renminbi (CNH)*. Penerbitan ini menjadi langkah strategis untuk menjangkau investor non-tradisional, memperdalam pasar keuangan regional, serta mendukung pengelolaan risiko nilai tukar secara lebih optimal. Indonesia tercatat sebagai *sovereign* pertama di Asia Tenggara yang menerbitkan *Dim Sum Bond*.

Penerbitan *Dim Sum Bond* juga mendapat respon yang sangat positif dari investor, dengan *oversubscription* mencapai sekitar tiga kali, disertai penurunan *yield* di seluruh tenor (2,50 persen untuk tenor 5 tahun dan 2,90 persen untuk tenor 10 tahun). Tingginya minat investor, termasuk dari investor domestik Tiongkok, mencerminkan kepercayaan terhadap stabilitas ekonomi, prospek pertumbuhan, serta kredibilitas pengelolaan fiskal Indonesia. Alokasi investor domestik Tiongkok (Mainland China) sebesar 22 persen untuk tenor 5 tahun dan 12 persen untuk tenor 10 tahun, sekaligus bertujuan untuk mendukung pembentukan benchmark pasar bagi penerbitan obligasi korporasi Indonesia dan negara berkembang lainnya.

Melalui berbagai inovasi SBN, baik ritel, *thematic bond*, maupun pengembangan pasar SBN valas, Pemerintah terus memperkuat strategi pembiayaan APBN yang adaptif, efisien, dan berkelanjutan. Inovasi ini tidak hanya mendukung pemenuhan kebutuhan pembiayaan, tetapi juga berdampak meningkatkan partisipasi investor ritel dan *investment society* tercapai. Selain itu, inovasi ini mendorong pendalaman pasar keuangan dan perluasan basis investor, menjadi benchmark bagi penerbitan obligasi korporasi, serta menjaga kredibilitas fiskal Indonesia dalam jangka panjang.

Menutup APBN 2025 dengan Kuat, Menyambut APBN 2026

Menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2025, Kementerian Keuangan memastikan seluruh proses pengelolaan berjalan secara tertib, disiplin, dan akuntabel hingga hari terakhir. Pengawasan tersebut dilakukan melalui rangkaian kegiatan terintegrasi yang mencakup kunjungan kerja pimpinan Kementerian Keuangan ke unit-unit vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) di daerah, pemantauan langsung proses pencairan belanja negara pada hari kerja terakhir tahun anggaran, serta penyelenggaraan Dialog Akhir Tahun dan Tutup Kas Tahun Anggaran 2025 sebagai forum evaluasi kinerja fiskal nasional.

Rangkaian kegiatan ini mencerminkan komitmen Kementerian Keuangan untuk tidak hanya memastikan optimalisasi pelaksanaan APBN 2025, tetapi juga mempersiapkan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 agar dapat berjalan lebih cepat, terkoordinasi, dan berorientasi pada dampak nyata bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.



Pada Senin, 29 Desember 2025, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara melakukan kunjungan kerja ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung I dan KPPN Sumedang yang berada di bawah koordinasi Kantor Wilayah DJPb Provinsi Jawa Barat. Kunjungan ini dilakukan untuk memantau langsung pelaksanaan APBN menjelang akhir tahun anggaran, yang merupakan fase paling krusial dalam siklus pengelolaan keuangan negara karena tingginya intensitas transaksi serta ketatnya batas waktu penyelesaian belanja.

Dalam kunjungan tersebut, Wamenkeu menekankan pentingnya ketelitian, kepatuhan terhadap ketentuan, serta konsistensi dalam menjaga kualitas pelaksanaan anggaran hingga seluruh transaksi ditutup. Periode

akhir tahun dinilai sebagai fase penentu yang memerlukan koordinasi yang kuat antara KPPN, satuan kerja, dan seluruh pemangku kepentingan agar tidak terjadi keterlambatan maupun permasalahan administrasi yang berpotensi memengaruhi laporan keuangan pemerintah.

Kinerja pengelolaan APBN di Provinsi Jawa Barat hingga akhir Desember 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Realisasi APBN regional tercatat mencapai 94,6 persen, dengan KPPN Sumedang mencatatkan realisasi tertinggi sekitar 98 persen, disusul KPPN Bandung I yang melampaui 95 persen. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan anggaran di wilayah Jawa Barat, meskipun tetap dipahami bahwa realisasi final baru dapat ditetapkan setelah seluruh transaksi APBN secara nasional ditutup pada 31 Desember 2025 dan melalui proses rekonsiliasi serta pelaporan.

Pada waktu yang hampir bersamaan, Wakil Menteri Keuangan Thomas A.M. Djiwandono melaksanakan kunjungan kerja ke Kantor Wilayah DJPb Provinsi DKI Jakarta serta KPPN Jakarta III dan KPPN Jakarta VII. Kunjungan ini difokuskan pada evaluasi pelaksanaan APBN Regional DKI Jakarta Tahun Anggaran 2025 sekaligus penguatan kesiapan pelaksanaan APBN 2026.

Realisasi belanja APBN Regional DKI Jakarta hingga akhir tahun tercatat sekitar 93,02 persen. Capaian ini dinilai positif mengingat kompleksitas pengelolaan belanja di wilayah DKI Jakarta yang menangani porsi signifikan belanja pemerintah pusat. Selain mengevaluasi kinerja tahun berjalan, Wamenkeu menekankan pentingnya memperkuat koordinasi antara Kementerian Keuangan dengan K/L agar akselerasi belanja APBN 2026 dapat dimulai sejak awal tahun anggaran.



Penguatan koordinasi tersebut dipandang krusial untuk memastikan program-program prioritas pemerintah dapat segera dieksekusi dan memberikan dampak ekonomi yang lebih cepat. Dalam konteks ini, Kanwil DJPb dan KPPN di wilayah DKI Jakarta didorong untuk terus berperan aktif tidak hanya sebagai pelaksana fungsi administratif, tetapi juga sebagai mitra strategis yang mampu memberikan masukan, inisiatif, dan solusi guna meningkatkan kualitas pengelolaan APBN serta efektivitas belanja negara.

Pengawasan APBN 2025 kemudian berlanjut pada hari kerja terakhir Tahun Anggaran 2025, Rabu (31/12), ketika Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan kunjungan kerja ke KPPN Jakarta I dan KPPN Jakarta II. Kunjungan ini bertujuan untuk memantau secara langsung kelancaran proses pencairan belanja APBN pada periode paling akhir tahun anggaran serta memastikan seluruh satuan kerja mematuhi ketentuan dan batas waktu penyelesaian pekerjaan.



Dalam kunjungan tersebut, Menteri Keuangan meninjau pelaksanaan tugas KPPN yang mencakup penyaluran dana atas permintaan satuan kerja Kementerian negara/lembaga, pembukuan dan akuntansi keuangan negara, serta pembinaan satuan kerja dalam pelaksanaan anggaran. KPPN Jakarta I dan II bermitra dengan sejumlah K/L strategis, antara lain Sekretariat Negara, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pertahanan, serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, termasuk dalam penyaluran Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada Badan Usaha Milik Negara.

Disiplin terhadap batas waktu penyelesaian pekerjaan akhir tahun menjadi perhatian utama, mengingat keterlambatan penyampaian dokumen atau penyelesaian kegiatan berpotensi menyebabkan anggaran tidak dapat dicairkan. Kelancaran pencairan belanja pada akhir tahun dinilai sangat krusial karena pada Tahun Anggaran 2025, KPPN di wilayah DKI Jakarta menangani mayoritas belanja pemerintah pusat, sehingga menuntut koordinasi yang solid, kepatuhan

prosedur, serta kesiapan sistem perbendaharaan.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan juga meninjau Pusat Komando (*Command Center*) yang menampilkan data realisasi APBN secara real time. Data tersebut bersumber dari aplikasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) serta SAKTI yang digunakan oleh seluruh K/L dalam memproses pelaksanaan anggaran. Informasi ini dimanfaatkan sebagai alat monitoring, evaluasi, dan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan fiskal.

Masih pada hari yang sama, Kementerian Keuangan menyelenggarakan Dialog Akhir Tahun dan Tutup Kas Tahun Anggaran 2025 secara *hybrid*. Kegiatan ini dihadiri oleh Menteri Keuangan, kedua Wakil Menteri Keuangan, pimpinan unit eselon I, serta diikuti secara daring oleh jajaran Kementerian Keuangan dari seluruh Indonesia.



Dalam dialog tersebut, para Kepala Kantor Wilayah dari empat regional—Regional Sumatera; Regional Jawa dan Kalimantan; Regional Sulawesi, Bali, dan Nusa Tenggara; serta Regional Papua dan Maluku—menyampaikan pemaparan evaluasi kinerja fiskal dan kondisi perekonomian nasional sepanjang tahun 2025. Evaluasi tersebut mencakup berbagai tantangan yang dihadapi selama tahun berjalan, antara lain tekanan ekonomi global, perlambatan ekonomi domestik, serta dampak bencana alam di sejumlah daerah yang turut memengaruhi pelaksanaan program-program fiskal nasional.

Secara umum, kondisi fiskal nasional dinilai tetap terjaga dan berkesinambungan di tengah berbagai tantangan tersebut, berkat kerja keras dan koordinasi seluruh jajaran Kementerian Keuangan. Dialog ini menjadi sarana konsolidasi nasional untuk menyamakan persepsi, memperkuat sinergi antarsatuan kerja, serta menyiapkan langkah-langkah perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan APBN ke depan.



Kegiatan Dialog Akhir Tahun ditutup dengan arahan dan deklarasi Tutup Kas Tahun Anggaran 2025 yang secara resmi menandai berakhirnya seluruh transaksi APBN tahun berjalan. Kinerja APBN sepanjang tahun 2025 mengantarkan posisi kas negara tetap pada level yang ample dan memadai, sehingga memberikan ruang yang cukup bagi Pemerintah untuk memastikan kesinambungan fiskal dan mendukung pelaksanaan APBN 2026 secara optimal.

Ke depan, Kementerian Keuangan berkomitmen untuk terus menjaga disiplin pengelolaan keuangan negara, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi guna kesiapan seluruh pemangku kepentingan yang lebih solid. Hal ini diharapkan pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2026 dapat tetap berjalan *on-track*, adaptif, dan responsif, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan perekonomian nasional untuk menyongsong Indonesia Emas 2045.



APBN KITA

KINERJA DAN FAKTA



ISSN : 2715-646X